

2022



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2022 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKIP berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Selain itu, LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2022 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2022 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2022 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sumber, Februari 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIREBON**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nanan Abdul Manan', written over a horizontal line.

NANAN ABDUL MANAN, S.STP., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19800703 199810 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3 Struktur Organisasi	3
1.4 Keadaan Pegawai	4
1.5 Pemanfaatan Aset	6
1.6 Keuangan	6
1.7 Landasan Hukum	7
1.8 Isu Strategis	7
1.9 Sistematika Penulisan	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
2.1 Perencanaan Strategis	9
2.2 Indikator Kinerja Utama	13
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	18
2.4 Rencana Kerja Tahun 2022.....	21
2.5 Rencana Anggaran Tahun 2022	25
2.6 Kriteria Pencapaian Indikator	26
2.7 Instrumen Pendukung.....	27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	29
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	31
3.3 Realisasi Anggaran	71
3.4 Analisis Efisiensi Sasaran	73
3.5 Inovasi	74
3.6 Penghargaan	75
BAB IV PENUTUP	77
4.1 Kesimpulan	77
3.2 Saran.....	78
LAMPIRAN	80
<i>Lampiran 1. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019</i>	
<i>Lampiran 2. SK Penetapan IKU Tahun 2020-2024</i>	
<i>Lampiran 3. Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2022</i>	
<i>Lampiran 4. Laporan Fisik dan Keuangan s.d Desember Tahun 2022</i>	
<i>Lampiran 5. SK Tim Penyusunan LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022</i>	
<i>Lampiran 6. Laporan Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kab Cirebon Tahun 2022</i>	
<i>Lampiran 7. Laporan Kegiatan Monev dan Pemingkatan Badan Publik Tahun 2022</i>	
<i>Lampiran 8. Laporan Hasil Self Assessment Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Tahun 2022</i>	
<i>Lampiran 9. Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022</i>	
<i>Lampiran 10. SOP Pengumpulan Data Kinerja</i>	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai ASN Menurut Golongan Ruang/Kepangkatan	4
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai ASN Berbasis Tingkat pendidikan dan Unit Kerja	4
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai ASN Menurut Jenis Kelamin	4
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Non ASN Berbasis Tingkat Pendidikan dan Unit Kerja	5
Tabel 1.4	Perbandingan Pegawai ASN dan Non ASN Tahun 2022	5
Tabel 1.5	Pemanfaatan Aset	6
Tabel 2.1	Domain, Aspek, Indikator, Pembobotan SPBE	10
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Tujuan/ Indikator Kinerja Daerah yang diampu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.....	14
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2022.....	15
Tabel 2.4	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022	21
Tabel 2.5	Target Belanja APBD Tahun 2022	26
Tabel 2.6	Alokasi Anggaran per Sasaran	26
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	29
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tujuan Diskominfo/ Capaian Kinerja Daerah Tahun 2022	29
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Utama Tahun 2022	30
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1	31
Tabel 3.5	Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran 1	32
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap Tahun Sebelumnya	32
Tabel 3.7	Perbandingan Capaian Kinerja Hingga Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2019-2024.....	33
Tabel 3.8	Alokasi Anggaran Sasaran Strategis 1	34
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2	39
Tabel 3.11	Rentang Nilai Predikat	40

Tabel 3.12	Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 2	40
Tabel 3.13	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap Tahun Sebelumnya	40
Tabel 3.14	Perbandingan Capaian Kinerja hingga Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2019-2024	41
Tabel 3.16	Alokasi Anggaran Sasaran Strategis 2	42
Tabel 3.17	Capaian Kinerja Sasaran Strategi ke-3	47
Tabel 3.18	Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 3	49
Tabel 3.19	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap Tahun Sebelumnya	49
Tabel 3.20	Perbandingan Capaian Kinerja hingga Tahun 2022 dengan target Akhir Renstra Tahun 2019-2024	49
Tabel 3.21	Alokasi Anggaran Sasaran Strategis 3	52
Tabel 3.22	Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-4	55
Tabel 3.23	Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 4	56
Tabel 3.24	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap Tahun Sebelumnya	57
Tabel 3.25	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2019-2024	57
Tabel 3.26	Alokasi Anggaran Sasaran Strategis 4	58
Tabel 3.27	Capaian Sasaran Strategis ke-5	61
Tabel 3.28	Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 5	61
Tabel 3.29	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap Tahun Sebelumnya	63
Tabel 3.30	Perbandingan Capaian Kinerja hingga Tahun 2022 terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2019-2024.....	63
Tabel 3.31	Alokasi Anggaran Sasaran Strategis 5	65
Tabel 3.33	Pendapatan dan Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022.....	72
Tabel 3.34	Capaian Anggaran per Sasaran	72
Tabel 3.35	Pengukuran Efisiensi Sasaran Tahun 2022	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	3
Gambar 2	Tampilan <i>Dashboard</i> Aplikasi <i>simonek.cirebonkab.go.id</i>	28
Gambar 3	<i>Dasboard</i> SIPD	48

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2022. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 – 2024. Visi tersebut yakni :

**“Terwujudnya Kabupaten Cirebon
Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman”**

Sesuai dengan visi tersebut, maka dijabarkan misi:

1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat;
2. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi;
3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika;
4. Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah;
5. Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

Sementara itu kontribusi langsung dalam mewujudkan tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon terkait dengan pelaksanaan pada Misi Keempat. Maka Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

**“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan
Yang Bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel”**

Tujuan tersebut menggunakan sasaran yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- 2) Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik;
- 3) Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- 4) Terwujudnya penyelenggaraan persandian;
- 5) Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2022 ini merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, visi dan misi seperti yang tertuang dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024, serta dalam rangka menjawab isu-isu aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022 Rp. 13.762.651.041,00 dengan realisasi Rp. 13.362.270.676,00 atau sebesar 97,09%. Berdasarkan uraian pada batang tubuh Laporan LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2022, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon telah menetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.
2. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon tahun 2022 berdasarkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi** ditunjukkan pada 5 (lima) indikator yaitu Indeks Domain Tata kelola SPBE dengan capaian kinerja 97,47%, Indeks Keterbukaan Informasi Publik dengan capaian kinerja 181,56%, Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral dengan capaian kinerja 117,46%, Indeks Keamanan

Informasi dengan capaian kinerja 100%, dan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian 100,14%.

No	Sasaran Strategis	% Capaian	Keterangan
1	Sasaran 1	97,47	Sangat Tinggi
2	Sasaran 2	181,56	Sangat Tinggi
3	Sasaran 3	117,46	Sangat Tinggi
4	Sasaran 4	100	Sangat Tinggi
5	Sasaran 5	100,14	Sangat Tinggi

Evaluasi atas sasaran strategis, pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon ke depan, sebagai berikut:

- 1) Melakukan perbaikan perencanaan dengan membuat pemetaan dalam rangka penyesuaian program dan kegiatan dalam upaya menyelaraskan target sasaran yang telah ditetapkan dengan regulasi yang ada;
- 2) Aspek perencanaan strategis SPBE dapat ditingkatkan dengan menyusun dokumen perencanaan SPBE lainnya seperti kebijakan Peta Rencana SPBE Instansi, kebijakan manajemen data, kebijakan pembangunan aplikasi SPBE, kebijakan layanan Pusat Data, dan kebijakan layanan jaringan intra instansi. Dan aspek penyelenggara SPBE dapat ditingkatkan dengan melakukan review fungsi Tim Koordinasi SPBE yang telah ada dengan program kerja yang terencana agar nilai SPBE dapat meningkat;
- 3) Melakukan kerjasama dengan penyelenggara pelatihan yaitu BKPSDM dan lembaga pelatihan swasta, khususnya untuk pelatihan teknis teknologi informasi, statistik, persandian, perencanaan dan kepegawaian.
- 4) Melakukan identifikasi/ pemetaan topologi jaringan di seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah kabupaten Cirebon, dalam rangka menangani permasalahan jaringan internet/ intranet yang lambat;
- 5) Meningkatkan pelayanan fasilitasi *Video Conference* dan *Video Live Streaming*.
- 6) Mendorong pengembangan *single data* dan *big data centre* yang terintegrasi, sehingga akan mempercepat dalam analisis terhadap berita dan opini, audit serta pengukuran indeks kepuasan, indeks pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang nantinya dikompilasi dalam sebuah direktori data internal agar bisa dipergunakan sebagai bahan sosialisasi namun tetap meningkatkan koordinasi validitas data dengan perangkat daerah terkait;
- 7) Meningkatkan peran dan fungsi PPID pada tiap Perangkat Daerah melalui pengembangan sistem informasi dan *portal/website* PPID pada seluruh Perangkat Daerah, dilaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi untuk memberikan penjelasan kepada PPID Perangkat Daerah mengenai tugas

pokok, fungsi PPID dan mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik;

- 8) Dilakukan penyusunan/ penetapan kebijakan standar keamanan informasi dan manajemen resiko, Pembentukan tim khusus, dan Pelaksanaan *IT Assessment* dan *Self Assessment*;
- 9) Melaksanakan penilaian mandiri penerapan sistem manajemen pengamanan informasi (Indeks KAMI), serta penyelenggaraan operasional persandian;

Dengan tersusunnya laporan kinerja instansi pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon kepada pihak-pihak terkait baik *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Cirebon

Sumber, Februari 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIREBON**



NANAN ABDUL MANAN, S.STP., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19800703 199810 1 001



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota/Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas



keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Penyusunan LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, sasaran dan realisasi pencapaian indikator kinerja utama dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah sebagaimana diatur Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon. Rincian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika tertuang dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2022, dengan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang diampu Sekretariat dan 3 (tiga) bidang (Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Teknologi dan Informatika, dan Bidang Statistik, Persandian dan E-Government dengan tugas pokok “Merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan Daerah.”

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan bahan perencanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- c. pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- d. pengelolaan aplikasi informatika;
- e. pengelolaan statistik sektoral;
- f. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan



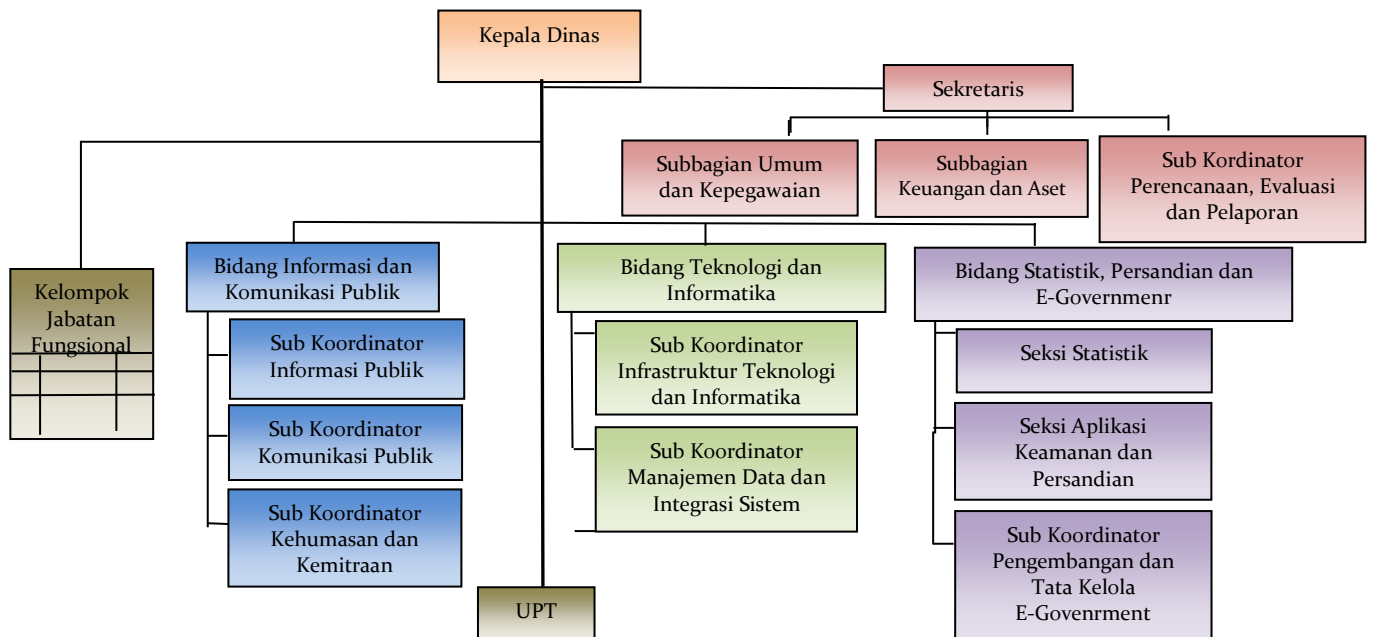
tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon yaitu :

1. Kepala
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Aset dan Keuangan
 - c. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari:
 - a. Kelompok Substansi Informasi Publik
 - b. Kelompok Substansi Komunikasi Publik
 - c. Kelompok Substansi Kehumasan dan kemitraan
4. Bidang Teknologi dan Informatika, terdiri dari:
 - a. Kelompok Substansi Infrastruktur Teknologi dan Informatika
 - b. Kelompok Substansi manajemen data dan Integrasi Sistem
5. Bidang Statistik, Persandian dan E-Government, terdiri dari:
 - a. Kelompok Substansi Pengembangan dan Tata Kelola E-Government
 - b. Seksi Statistik
 - c. Seksi Aplikasi Keamanan dan Persandian
6. Kelompok Jabatan Fungsional

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dapat disajikan pada gambar berikut :



Gambar 1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon



1.4 Keadaan Pegawai

Sumber daya aparatur di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon terbagi dalam 2 tingkatan secara kuantitas dan kualitas. Dari segi kualitas yang ada, pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Cirebon menurut golongan ruang/kepangkatan pada posisi Bulan 1 Desember 2022 terinci sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai ASN Menurut Golongan Ruang /Kepangkatan

No	Kepangkatan	Golongan Ruang	Jumlah
1.	Pembina Tk. I	IV/b	2
2.	Pembina	IV/a	1
3.	Penata Tk. I	III/d	9
4.	Penata	III/c	2
5.	Penata Muda Tk. I	III/b	4
6.	Penata Muda	III/a	5
7.	Pengatur Tk. I	II/d	1
8.	Pengatur	II/c	5
Jumlah			29

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo Kab Cirebon, Desember 2022

Sedangkan dari segi kualitas dan tanggung jawab kerja, sumber daya aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dibedakan berdasarkan basis tingkat pendidikan dan unit kerjanya terinci sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai ASN Berbasis Tingkat Pendidikan dan Unit Kerja

No	Unit Kerja/ Bidang	S3	S2	S1	D4	D3	SMA/ SMK	SMP	SD	Jumlah
1.	Sekretariat	-	2	4	-	-	2	-	-	8
2.	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	-	1	3	1	-	-	-	-	5
3.	Bidang Teknologi Informatika	-	1	3	1	-	1	-	-	6
4.	Bidang Statistik, Persandian dan E-Government	-	2	5	1	-	2	-	-	10
Jumlah		0	6	15	3	0	5	0	0	29

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo Kab Cirebon, Desember 2022

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai ASN Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persen (%)
1.	Laki-laki	19	65,52
2.	Perempuan	10	34,48
Jumlah		29	100

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo Kab Cirebon, Desember 2022



Disamping data ASN diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon terdapat pegawai Non ASN sebanyak 35 pegawai, dengan rincian sebagai berikut berdasarkan unit kerja.

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Non ASN Berbasis Tingkat Pendidikan dan Unit Kerja

No	Unit Kerja/ Bidang	S3	S2	S1	D4	D3	SMA/ SMK	SMP	SD	Jumlah
1.	Sekretariat	-	-	5	-	-	4	1	-	10
2.	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	-	-	7	-	-	1	-	-	8
3.	Bidang Teknologi Informatika	-	-	6	1	-	1	-	-	8
4.	Bidang Statistik, Persandian dan E-Government	-	-	6	-	-	3	-	-	9
Jumlah		0	0	24	1	0	9	1	0	35

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo Kab Cirebon, Desember 2022

Persentase Perbandingan Pegawai

Perbandingan jumlah pegawai ASN dan Non ASN di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon berdasarkan data terakhir Bulan Desember 2022 diinformasikan pada tabel berikut sebagai berikut :

Tabel 1.5
Perbandingan Pegawai ASN dan Non ASN Tahun 2022

No	Jenis Pegawai	Jumlah	Persentase (%)
1.	ASN	29	45,31
2.	Non ASN	35	54,69

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo Kab Cirebon, Desember 2022



1.5 Pemanfaatan Aset

Sarana dan prasarana yang ada saat ini digunakan seoptimal mungkin untuk menunjang pelaksanaan operasional kegiatan. Adapun keadaan sarana dan prasarana yang ada saat per 31 Desember 2022 adalah pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.6
Aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

NO.	URAIAN	NILAI ASET 2021	NILAI ASET 2022
1.	Piutang Retribusi Daerah	20.270.250,00	0,00
2.	Penyisihan Piutang	-101.351,25	0,00
3.	Beban dibayar Dimuka	1.777.508,33	1.979.033,33
4.	Persediaan	617.500,00	7.004.460,00
	Jumlah Aset Lancar	22.563.907,08	8.983.493,33
1.	Tanah	812.019.550,00	812.019.550,00
2.	Peralatan dan Mesin	11.971.667.170,68	12.059.542.090,68
3.	Gedung dan Bangunan	6.067.570.922,10	6.067.570.922,10
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.437.835.114,83	4.437.835.114,83
5.	Aset Tetap Lainnya	72.314.700,00	72.314.700,00
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Jumlah Aset Tetap	13.192.771.109,93	11.221.843.813,93
	Aset Tidak Berwujud	3.505.026.491,76	3.654.487.991,76
	Aset Lain-lain	175.007.348,77	175.007.348,77
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak berwujud	-2.128.359.891,76	-2.673.436.141,76
	Jumlah Aset Lainnya	1.551.673.948,77	1.156.059.198,77
	Jumlah Total Aset	14.767.008.965,78	12.386.886.506,03

Sumber : Neraca, 31 Desember 2022

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon pada tahun 2022 bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon.

Pada tahun anggaran 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon mengelola anggaran sebesar Rp 13.762.651.041,00 (DPPA TA 2022) yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan utama yang berkaitan langsung dengan sasaran strategis maupun program/kegiatan/sub kegiatan pendukung.



1.7 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
- 7) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024;
- 8) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 9) Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061/Kep.36-Org/2022 tentang Urusan Tugas Sub Koordinator pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.8 Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.



Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika Kabupaten Cirebon jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Diskominfo Kabupaten Cirebon yaitu :

- 1) Belum optimalnya fasilitas teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik;
- 2) Masih rendahnya diseminasi informasi mengenai kebijakan dan hasil pembangunan daerah dalam mendukung keterbukaan informasi publik;
- 3) Masih rendahnya integrasi dan kualitas data statistik sektoral;
- 4) Kurangnya pemahaman serta kesadaran keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah;
- 5) Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi.

1.9 Sistematika Penulisan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mengacu pada panduan Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I . PENDAHULUAN

Bab ini akan menjabarkan tentang : Latar Belakang, Tupoksi, Struktur Organisasi, Keadaan Pegawai, Pemanfaatan Aset, Keuangan, Landasan Hukum, Isu Strategis, dan Sistematika Penulisan

BAB II . PERENCANAAN KINERJA

Bab ini akan menjabarkan tentang : Rencana Strategis Organisasi yang terdiri dari Visi Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Cara mencapai tujuan dan sasaran. Pada Bab ini juga menjabarkan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang berisi sasaran, Indikator sasaran dan Program-program 2022

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini akan menjabarkan tentang: Kerangka Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Kinerja, Perbandingan Data Kinerja, Akuntabilitas Keuangan, Permasalahan dan Solusi.

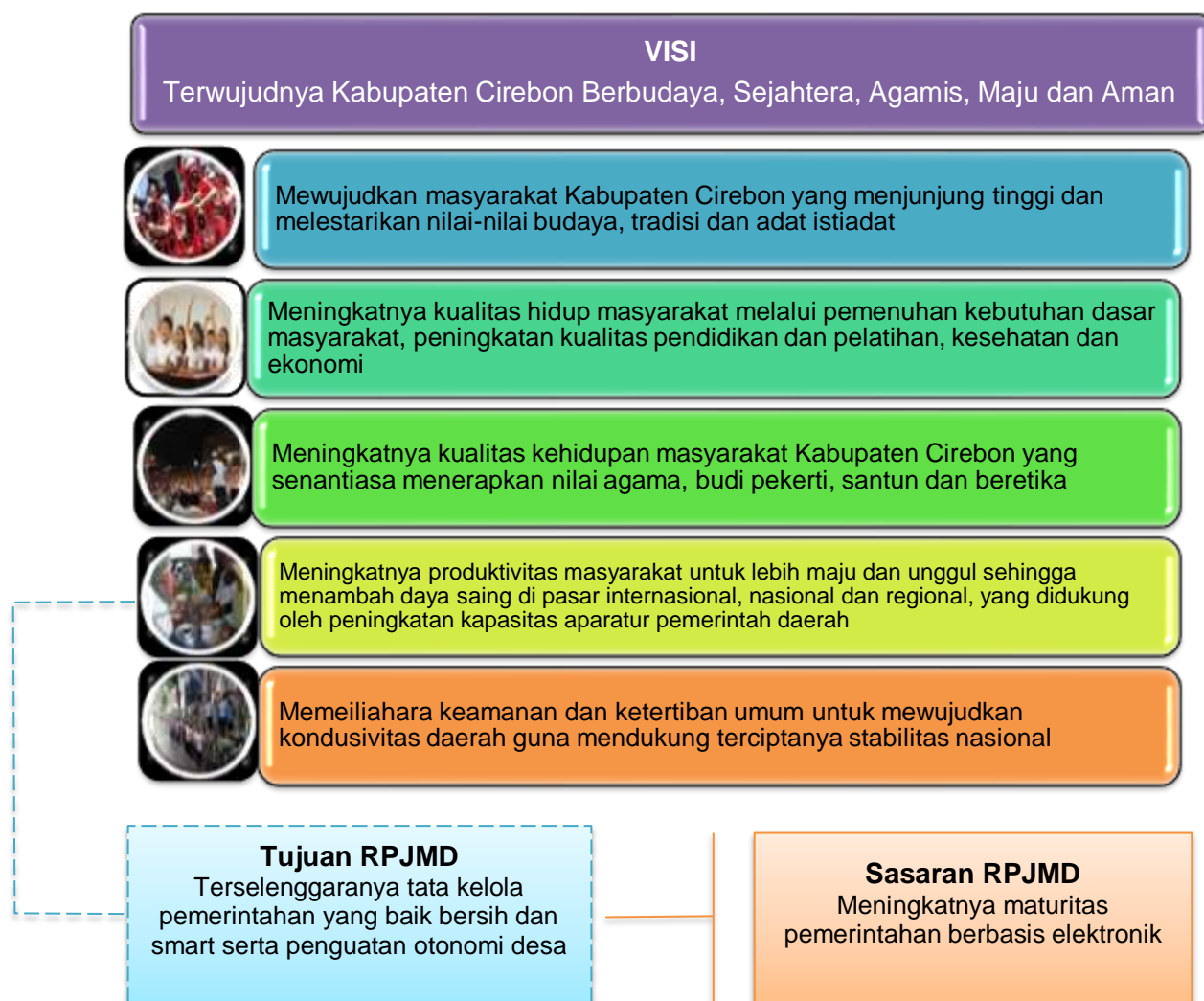
BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon yang ada pada dokumen Renstra 2019-2024 mengacu pada Visi dan Misi Bupati Cirebon Tahun 2019-2024, yaitu :



Salah satu tujuan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mencapai Visi Bupati Cirebon dan Misi keempat yaitu **“terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan smart serta penguatan otonomi desa”** dengan sasaran **“meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik”** sehingga pemerintahan Kabupaten Cirebon yang diharapkan kedepan adalah pelayanan publik



yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan berbasis teknologi informasi dengan mengedepankan layanan yang terintegrasi.

Untuk menjalankan tujuan dan sasaran RPJMD dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon menyusun tujuan dan sasaran sesuai dengan implementasi misi keempat yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan *smart* serta penguatan otonomi desa.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Sebagai upaya upaya mendukung pencapaian indikator keberhasilan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Cirebon khususnya misi ke-4 yaitu “**Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional**”, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, maka dalam RPJMD Tahun 2019-2024 telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang menjadi urusan/kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon yaitu **Indeks SPBE**.

Penetapan indeks SPBE sebagai salah satu indikator kinerja sasaran sejalan dengan tujuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sedangkan untuk instrumen evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pedoman Evaluasi SPBE. Struktur penilaian Indeks SPBE terdiri dari 4 (empat) domain, 8 (delapan) aspek serta 47 (empat puluh tujuh) indikator sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Domain, Aspek, Indikator, Pembobotan SPBE

DOMAIN	ASPEK	INDIKATOR
Kebijakan Internal SPBE	Kebijakan internal tata kelola SPBE	10
Tata Kelola SPBE	Perencanaan Strategi SPBE	4
	Teknologi Informasi dan Komunikasi	4
	Penyelenggara SPBE	2
Manajemen SPBE	Penerapan manajemen SPBE	7
	Pelaksanaan Audit TIK	3
Layanan SPBE	Layanan admin. Pemerintahan berbasis elektronik	10
	Layanan publik berbasis elektronik	6

Adapun tujuan jangka menengah yang akan dicapai Diskominfo Kabupaten Cirebon dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah selama tahun 2019-2024 yaitu:

**“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan
Yang Bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel”**

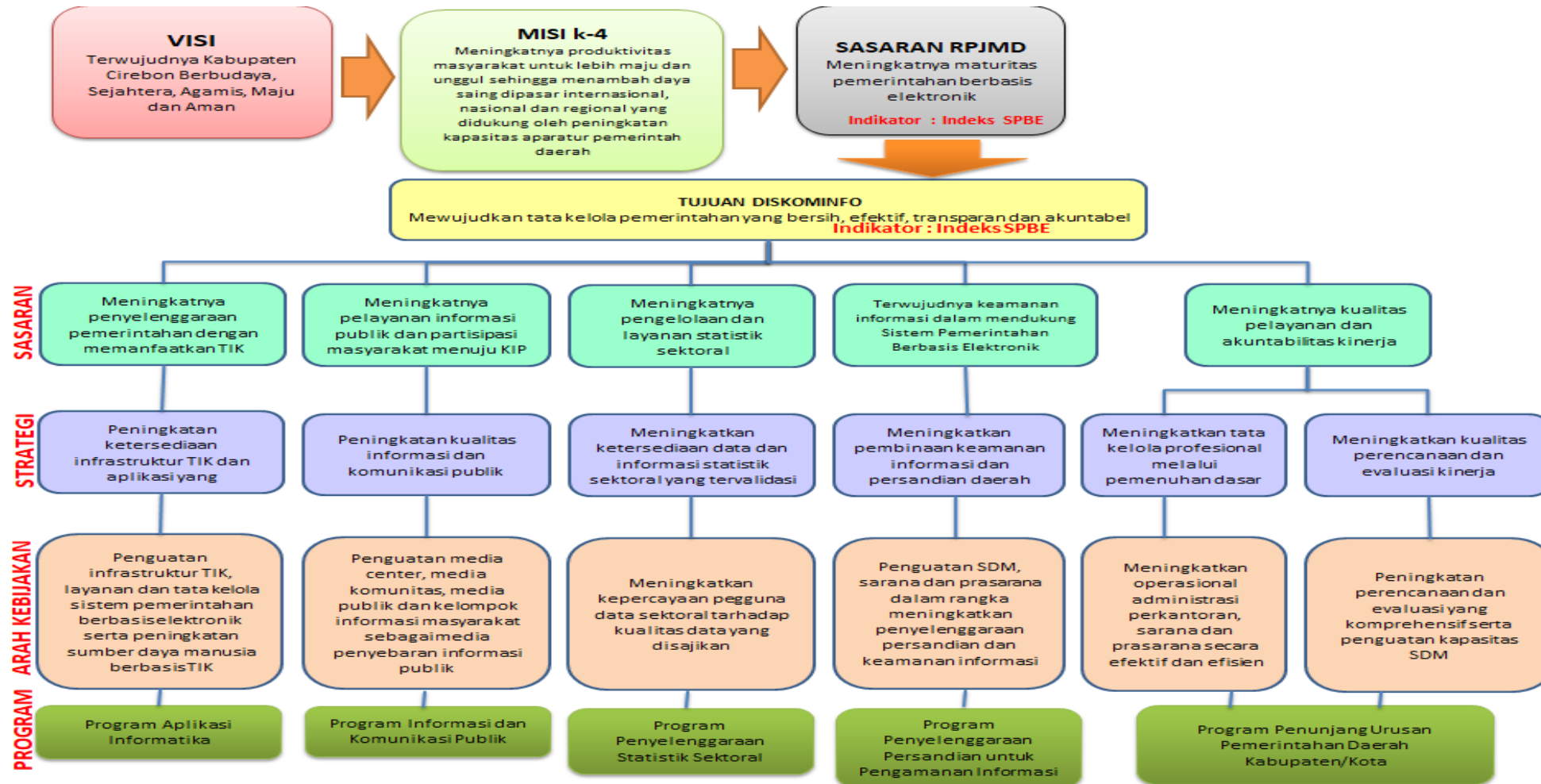


Pada tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon mengampu 5 (lima) sasaran, yaitu:

No	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks Domain Tata Kelola SPBE
2	Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik
3	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Persentase Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral
4	Terwujudnya penyelenggaraan persandian	Indeks Keamanan Informasi
5	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Indeks Kepuasan Masyarakat



Pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon berdasarkan rumusan misi beserta sasaran sebagai tolok ukur kinerja adalah sebagai berikut.





2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal apakah tujuan dan sasaran yang diukur berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang menggambarkan indikasi kinerja organisasi lebih baik dari sebelumnya.

Apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data yang memadahi, maka kondisi yang ada akan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) tentang apa saja yang berhasil diperoleh selama berkegiatan. Dengan indikator kinerja, perencanaan telah menetapkan alat ukur untuk menentukan ketercapaian tujuan dan sasaran.

Misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi serta harus didukung pencapaiannya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, yaitu :

Misi Keempat BUPATI	:	Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung olehn peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah
Tujuan RPJMD	:	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan smart serta penguatan otonomi desa
Sasaran RPJMD	:	Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik
Tujuan Diskominfo	:	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel
Sasaran Diskominfo	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2) Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik 3) Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah 4) Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 5) Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

Adapun Indikator Tujuan yang merupakan turunan dari sasaran RPJMD mengampu indikator Indeks SPBE. Sementara Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dari kelima sasaran tersebut masing-masing diukur oleh 1 (satu) indikator. Untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut:



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Tujuan / Indikator Kinerja Daerah yang
Diampu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
4.1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel	Indeks SPBE	POIN	<ul style="list-style-type: none">• Alasan Pemilihan Indikator: Peta kondisi penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan TIK• Formulasi Pengukuran: $= \frac{\sum \text{jawaban} \times \text{bobot}}{\sum \text{pertanyaan}}$• Jenis Data: Non Kumulatif• Sumber Data: Hasil <i>self assessment</i> dan observasi dari Kemenpan RB• Unit Kerja Penanggung Jawab: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon



Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
Tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
4.1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel				
4.1.1.		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Indeks Domain Tata Kelola	POIN	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Peta kondisi penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan TIK • Formulasi Pengukuran: $= \frac{\sum \text{jawaban} \times \text{bobot}}{\sum \text{pertanyaan}}$ • Jenis Data: Non Kumulatif • Sumber Data: Hasil <i>self assessment</i> dan observasi dari Kemenpan RB • Unit Kerja Penanggung Jawab: Bidang Teknologi dan Informatika
4.1.2.		Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	POIN	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Mewujudkan pemerintah Kabupaten Cirebon menuju informatif • Formulasi Pengukuran: $= \frac{(\text{Verifikasi SAQ} + \text{VLA} + \text{Visitasi})}{\text{Total Komponen}}$ SAQ = Self Assessment Quesioner VLA = Verifikasi Lanjutan Acak • Jenis Data: Non Kumulatif • Sumber Data: Hasil <i>self assessment</i> dan observasi dari Komisi Informasi • Unit Kerja Penanggung Jawab: Bidang Komunikasi dan Informasi Publik



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
4.1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel				
4.1.3.		Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral	PERSEN	<ul style="list-style-type: none">• Alasan Pemilihan Indikator: Urusan Pemerintahan statistik sektoral pada Pemkab Cirebon selain bertanggungjawab pada ketersediaan data statistik sektoral harus juga termanfaatkan• Formulasi Pengukuran: $= \frac{(\% \text{ dokumen yang dihasilkan} + \% \text{ keterisian data SIPD})}{\text{Total Komponen}} \times 100\%$• Jenis Data: Non Kumulatif• Sumber Data: Hasil pengolahan data• Unit Kerja Penanggung Jawab: Bidang Statistik, Persandian dan <i>E-Government</i>
4.1.4		Terwujudnya penyelenggaraan persandian	Indeks KAMI	LEVEL	<ul style="list-style-type: none">• Alasan Pemilihan Indikator: Alat evaluasi untuk menganalisis tingkat kematangan penerapan keamanan informasi di sebuah organisasi berdasarkan kriteria pada SNI ISO/IEC 27001:2013• Formulasi pengukuran: $= \frac{\sum \text{jawaban} \times \text{bobot}}{\sum \text{pertanyaan}}$• Jenis Data: Non Kumulatif• Sumber Data: Hasil <i>assessment</i> berdasarkan pedoman/instrumen <i>assessment</i> keamanan informasi• Unit Kerja Penanggung Jawab: Bidang Statistik, Persandian dan <i>E-Government</i>



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
4.1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel				
4.1.5.		Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Indeks kepuasan masyarakat	POIN	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon</p> <p>Formulasi pengukuran: $= \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$</p> <p>Jenis Data: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Hasil survey internal terhadap layanan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian</p> <p>Unit Kerja Penanggung Jawab: Sekretariat</p>



2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja tahun 2022 disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Perjanjian kinerja dilakukan berjenjang dari Eselon IV, Eselon III sampai dengan Kepala Perangkat Daerah atau Eselon II. Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, sedangkan Pihak Kedua (atasan) akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja sesuai dengan perjanjian, dan mengambil tindakan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon melaksanakan 5 (lima) program dengan 12 (dua belas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan yang didukung oleh anggaran sebesar Rp. 13.762.651.041,00.



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NANAN ABDUL MANAN, S.STP., M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. H. IMRON, M.Ag
Jabatan : Bupati Cirebon

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, November 2022

Pihak Kedua,

Drs. H. IMRON, M.Ag

Pihak Kesatu,


NANAN ABDUL MANAN, S.STP., M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19800703 199810 1 001



LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KABUPATEN CIRIBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Tempak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Setelah
(A)	(B)	(C)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	$\frac{\sum \text{jawaban} \times \text{Bobot}}{\sum \text{pertanyaan}}$	Non Kumulatif	Meningkat	Bidang Aplikasi Informatika (2020-2021) Bidang Statistik, Persandian dan Si-Governance (2022-2024)	3 POK	3 POK
4.1.01.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	$\frac{\sum \text{jawaban} \times \text{bobot}}{\sum \text{pertanyaan}}$	Non Kumulatif	Meningkat	Bidang Aplikasi Informatika (2020-2021) Bidang Statistik, Persandian dan Si-Governance (2022-2024)	2,77 POK	3,77 POK
4.1.01.	Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat melalui keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	$\frac{[\text{Verifikasi SAQ} + \text{vLA} + \text{Viditas}]}{\text{Total komponen}}$	Non Kumulatif	Meningkat	Bidang Pengelolan Komunikasi dan Informasi Publik (2020-2021) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (2022-2024)	85 POK	85 POK
4.1.03.	Meningkatnya pengelolaan dan layanan publik sesuai dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Persentase pengelolan dan layanan statistik sektoral	$\frac{\sum \text{Jumlah pengelolan} \times \text{Bobot} + \sum \text{Jumlah layanan}}{\text{Total komponen}}$	Non Kumulatif	Meningkat	Bidang Statistik dan Persandian	85 PERSEN	85 PERSEN
4.1.04.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Keamanan Informasi (IKM)	$\frac{\sum \text{jawaban} \times \text{Bobot}}{\sum \text{pertanyaan}}$	Non Kumulatif	Meningkat	Bidang Statistik dan Persandian	2 LEVEL	2 LEVEL
4.1.06.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\sum (\text{Nilai} - \text{Nilai} \text{ terendah}) \times \text{Bobot}}{\sum \text{Bobot} \text{ seluruh}} + \text{Nilai} \text{ terendah}$	Non Kumulatif	Meningkat	Sekunder	3,33 POK	3,33 POK

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Setelah	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
4.1.01.01.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	1.838.005.740,00	4.388.786.134,00	Sumber Dana: DDU-DAL, DDU-DAL, PPK/PA Jalin
4.1.01.02.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.600.126.000,00	2.863.403.000,00	Sumber Dana: DDU-DAL, DDU-DAL, PPK/PA Jalin, Pk Ren Jn
4.1.03.02.	PROGRAM PENYELINGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	314.736.800,00	319.800.000,00	Sumber Dana: DDU-DAL
4.1.04.02.	PROGRAM PENYELINGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGUMUMAN SIPRUKAS	105.004.000,00	105.004.000,00	Sumber Dana: DDU-DAL

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Setelah	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
4.1.06.01.	PROGRAM PENGUKUR URAIAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN CIRIBON	6.041.900.205,00	6.965.996.717,00	Sumber Dana: DDU-DAL, DDU-DAL, Pk Ren Jn
J U M L A H		12.991.848.895,00	13.762.851.841,00	

Pihak Kedua

Drs. H. IMRON, M.Ag

Sumber, November 2022
 Pihak Kedua
 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,

NANAN ABDUL MANAN, S.STP., M.Si.
 Pembina Tk I
 NP. 19800703 199610 3 001



2.4 Rencana Kerja Tahun 2022

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis dilakukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang selaras dengan pencapaian indikator sasaran sebagai berikut.

Tabel 2.4
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90 PERSEN	5.983.966.717
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90 PERSEN	
		Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100 PERSEN	
		Persentase dokumen perencanaan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 PERSEN	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang dibuat dalam satu tahun	12 Dokumen	92.445.850
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	2 dokumen	43.946.400
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	12 dokumen	48.499.450
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan keuangan daerah yang dibuat	14 Dokumen	4.730.999.500
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan	23 Pegawai	4.683.999.700
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	12.999.900
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	13 dokumen	33.999.900
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 jenis	38.529.345
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 paket	38.529.345
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah	9 Layanan	229.891.870
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah lampu yang disediakan	30 buah	2.385.000
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	9 jenis	88.821.920



No	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.)
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya bahan bakar untuk genset setiap bulannya	331,2 liter	2.693.400
		Tersedianya isi ulang tabung gas	6 Tabung	
4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya jumlah makanan dan minuman rapat pegawai	90 dus	1.500.000
4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan setiap bulan	12 paket	14.266.500
4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan koran lokal dan nasional	5.280 Eksemplar	26.958.000
4.7	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya paket Alat Tulis Kantor setiap bulan	12 paket	50.010.200
4.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya jumlah makanan dan minuman tamu	120 dus	1.500.000
4.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	30 Laporan	41.756.850
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan yang disediakan	6 Jenis	787.578.152
5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik selama 1 tahun	36 Tagihan	349.348.352
5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor (pramu kantor/operator komputer) setiap bulannya	12 orang	438.229.800
		Tersedianya jumlah petugas jasa keamanan dan ketertiban kantor tiap bulan	12 orang	
		Jumlah luasan kantor yang dibersihkan	1.896 M2	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang dipelihara	100 Jenis	104.522.000
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda dua dan roda empat yang diberikan bahan bakar	5 Unit	77.380.000
6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mengurus perizinannya	21 Unit	11.302.000
6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan AC	15 kali	15.840.000
		Jumlah pemeliharaan komputer	15 kali	
		Jumlah pemeliharaan printer	10 kali	
II	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	65 Persen	2.893.403.900
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media informasi dan komunikasi publik yang digunakan	5 Media	2.893.403.900
1.1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Tertindakannya Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi (SAIK) Temu Bakohumas Tk Nasional	0 Kegiatan	48.030.400
1.2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah layanan monitoring opini dan aspirasi publik	1 paket	53.350.000



No	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.)
1.3	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten informasi publik yang dibuat dan dipublikasikan	365 Konten	150.635.800
1.4	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah eksemplar majalah yang diterbitkan	3,150 Eksemplar	211.603.300
1.5	Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	76 Badan Publik	616.894.700
		Terlaksananya penyebarluasan informasi melalui wawar keliling	24 Kali	
		Terpublikasikannya program- program pembangunan dan hasil-hasil di media TV	10 publikasi	
		Terpublikasikannya program- program pembangunan dan hasil-hasil di media lain	78 Publikasi	
1.6	Layanan Hubungan Media	Jumlah diseminasi informasi melalui media cetak	138 Terbit	1.220.935.900
		Jumlah diseminasi informasi melalui media radio	4 Tayang	
1.7	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah wartawan yang menjadi peserta uji kompetensi wartawan dan mendapat sertifikat	150 orang wartawan	228.603.800
1.8	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Terpenuhinya operasional kegiatan Komisi Informasi Kabupaten Cirebon	12 bulan	253.665.000
		Tersedianya jumlah Komisioner Komisi Informasi Kabupaten Cirebon	5 Komisioner	
1.9	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Cirebon	1 Kali	109.685.000
III	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan pengelolaan aplikasi informatika	85,5 Persen	4.369.786.724
1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 Persen	2.905.521.904
1.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah domain utama yang diperpanjang layanannya	1 Domain	19.800.000
		Dilaksanakannya koordinasi dengan perangkat daerah lain lintas sektor dalam rangka pelayanan berbasis elektronik	15 kali	
1.2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas	73 Perangkat daerah	2.885.721.904
		Terpenuhinya pemeliharaan jaringan TIK fiber optik	12 Bulan	
		Terpenuhinya pemeliharaan perangkat keras router wireless yang difasilitasi Dinas Kominfo	12 Bulan	
		Jumlah peralatan dan perlengkapan suku cadang fiber optik yang dibelanjakan	39 Unit	
		Jumlah peralatan dan perlengkapan suku cadang WAN yang dibelanjakan	37 Unit	



No	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.)
2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	71 layanan	1.464.264.820
2.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan e- government	1 Dokumen	119.024.300
2.2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan NOC yang difasilitasi Dinas Kominfo	12 bulan	716.442.220
		Jumlah perangkat daerah yang menggunakan dan menyimpan data di pusat data pemerintah	73 Perangkat Daerah	
		Jumlah peralatan dan perlengkapan suku cadang NOC yang dibelanjakan	32 Unit	
2.3	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah aplikasi yang mendukung keterbukaan informasi	1 Aplikasi	67.116.450
2.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah promosi dan sosialisasi Smart City berbasis elektronik	1 Kegiatan	
2.5	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang dibangun dan dikembangkan dalam mendukung pemerintahan berbasis elektronik	2 Aplikasi	202.748.000
		Jumlah Pembangunan sistem informasi untuk mendukung smart city	1 aplikasi	
2.6	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Tersedianya fasilitas operasional Cirebon Katon Respon 112	1 Kegiatan	295.666.800
		Jumlah aplikasi yang mendukung pelayanan masyarakat Kab Cirebon	2 Aplikasi	
2.7	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah peserta seminar dalam rangka mendukung implementasi smart city	70 Orang	63.267.050
		Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city	71 Persen	
		Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city	3 Perangkat Daerah	
		Jumlah peserta seminar dalam rangka mendukung implementasi smart city	60 Orang	
2.9	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah ASN, PPPK, dan Non PNS pengelola TIK yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikasi	204 Orang	
		Jumlah ASN pengelola TIK yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikasi	60 Orang	
		Jumlah remaja dan dewasa (pelajar/masyarakat) yang dilatih dengan keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi	50 Orang	



No	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.)
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	40 Persen	319.609.650
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100 perangkat daerah	319.609.650
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah buku statistik daerah/profil daerah	1 Dokumen	17.744.150
1.2	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	1 Jenis	14.700.000
1.3	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah aplikasi satu data yang akan dibangun dan dikembangkan	1 Aplikasi	114.576.000
		Jumlah elemen data pada SIPD yang sudah terisi oleh perangkat daerah	1.350 data	
1.4	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	1 Survey	172.589.500
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	26 Persen	195.884.050
1	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi dan atau aplikasi persandian	18 sistem elektronik	175.146.200
1.1	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi/bimtek dan monev sertifikasi elektronik	1 Kegiatan	175.146.200
		Jumlah pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi	40 Kali	
2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah titik yang diamankan pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS)	25 Titik	20.737.850
2.1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya pemeliharaan jaringan santel setiap bulannya	12 Bulan	20.737.850
		Jumlah sosialisasi dalam menyelenggarakan jaring komunikasi sandi	2 Kegiatan	
			JUMLAH	13.762.651.041

2.5 Rencana Anggaran Tahun 2022

Pada tahun Anggaran 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon mengelola anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon sejumlah Rp.13.762.651.041,00 dan menargetkan PAD dari retribusi menara telekomunikasi sebesar Rp. 2.405.286.375,00. Berikut ialah rincian pengelolaan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon Pada Tahun Anggaran 2022.



Tabel 2.5
Target Belanja APBD Tahun 2022

Kode Rek	Uraian	Jumlah (Rp.)
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.405.286.375
	JUMLAH PENDAPATAN	2.405.286.375
5.	BELANJA DAERAH	13.762.651.041
5.1.	BELANJA OPERASI	13.500.601.581
5.1.01.	BELANJA PEGAWAI	4.673.349.700
5.1.02.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.827.251.881
5.2.	BELANJA MODAL	262.049.460
5.2.02.	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	262.049.460
	JUMLAH BELANJA	13.762.651.041

Sumber : DPPA Diskominfo Kabupaten Cirebon, 2022

Anggaran Belanja Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Cirebon yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Alokasi Anggaran per Sasaran

No	Sasaran	Anggaran (Rp.)	Prosentase	Keterangan
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	4.369.786.724	31,75	Didukung oleh 1 (satu) program : • Program Aplikasi Informatika
2	Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	2.893.403.900	51,02	Didukung oleh 1 (satu) program : • Program Informasi dan Komunikasi Publik
3	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	319.609.650	2,32	Didukung oleh 1 (satu) program : • Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4	Terwujudnya penyelenggaraan persandian	195.884.050	1,42	Didukung oleh 1 (satu) program : • Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
5	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	5.983.966.717	43,48	Didukung oleh 1 (satu) program : • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota

Sumber : Diskominfo Kab Cirebon, 2022

2.6 Kriteria Pencapaian Indikator

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus dibawah ini:



Pengukuran **INDIKATOR POSITIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya dalam % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

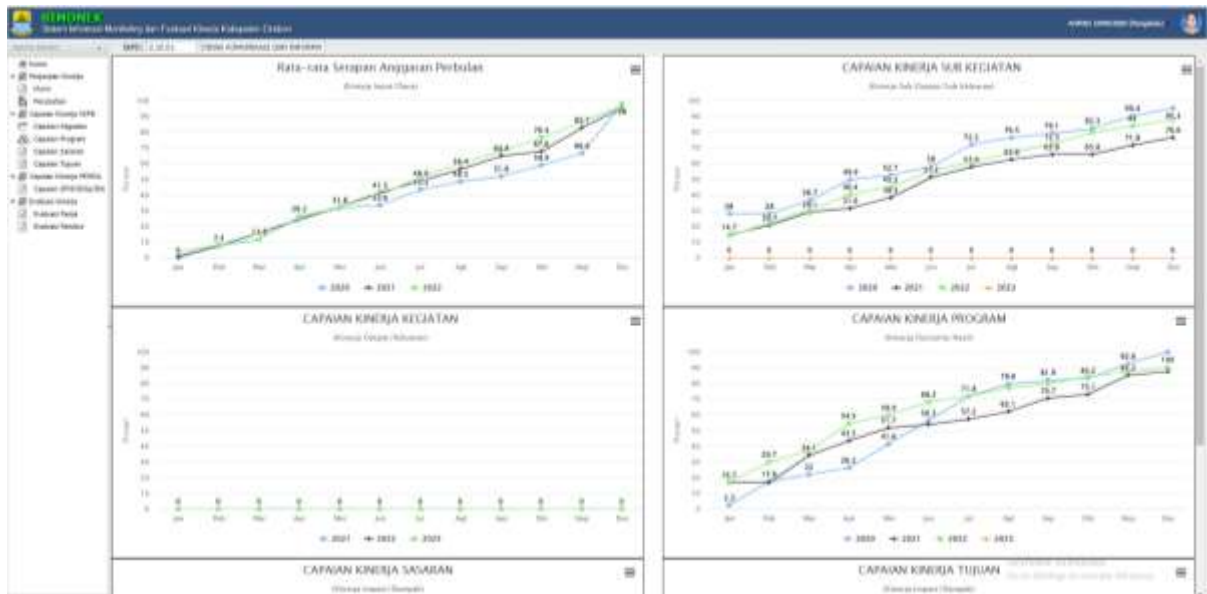
Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya BUKAN DALAM % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} 100\%$$

Untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran.

2.7 Instrumen Pendukung

Pengelolaan data kinerja dan pengukuran kinerja pada masing-masing Perangkat Daerah telah dilakukan secara terpusat dan berkala setiap bulannya mempergunakan aplikasi/sistem informasi berbasis *web* yaitu melalui simonek.cirebonkab.go.id



Gambar 2. Tampilan Dashboard Aplikasi *simonek.cirebonkab.go.id*



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri No 86 Tahun 2017, Hal. 494

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tujuan Diskominfo / Capaian Kinerja Daerah Tahun 2022

No	Tujuan Diskominfo	Indikator Kinerja	Tahun 2022		% Capaian	Kriteria/ Kode
			Target	Realisasi		
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel	Indeks SPBE	3 poin	2.66 poin	88,67	Tinggi



Tabel 3.3
Capaian Kinerja Utama Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		% Capaian	Kriteria/ Kode
			Target	Realisasi		
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2.77 poin	2.70 poin	97,47	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	45 poin	81.70 poin	181.56	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral	65%	76.35%	117.46	Sangat Tinggi
4	Terwujudnya penyelenggaraan persandian	Indeks Keamanan Informasi	Level 2	Level 2	100	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.590 poin	3.594 poin	100.14	Sangat Tinggi

Sumber : Diskominfo Kab Cirebon, 2022

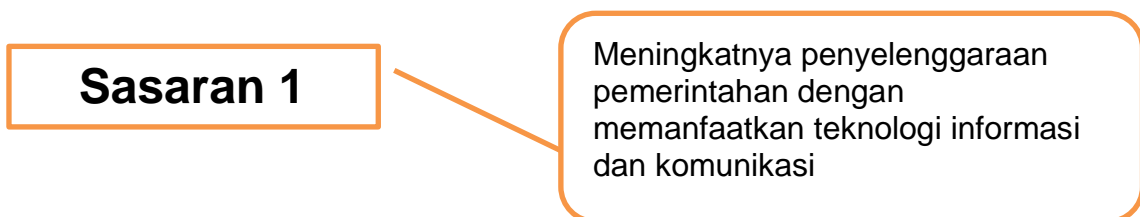
Dari tabel di atas dijabarkan sebagai berikut :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon mengampu 5 (lima) sasaran dengan masing-masing 1 (satu) indikator kinerja;
2. Dari kelima indikator tersebut terdapat (4) empat indikator kinerja yang telah memenuhi target dan 1 (satu) tidak mencapai target;
3. Faktor keberhasilan keempat indikator kinerja salah satunya adalah komitmen serta dukungan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik, pengelolaan statistik, pengamanan informasi pemerintah daerah serta pelayanan kepada masyarakat.
4. Sementara 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Domain Tata kelola SPBE” tidak mencapai target dikarenakan ada beberapa faktor diantaranya kebijakan internal SPBE yang belum memenuhi standar.
5. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 terkait Skala Nilai Peringkat Kinerja, capaian kelima sasaran tersebut masuk kategori “Sangat Tinggi”, karena capaian kinerja melebihi 90%.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diuraikan melalui pencapaian indikator kinerja masing-masing sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, sebagai berikut :

3.2.1 Sasaran Strategis ke-1



Tolok ukur capaian sasaran “*meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi*”, diukur oleh 1 (satu) indikator yaitu Indeks Domain Tata Kelola SPBE, dengan hasil capaian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Kriteria
		Target	Realisasi	% Capaian	
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2.77 poin	2.70 poin	97,47	Sangat Tinggi

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian indikator kinerja pada sasaran strategis 1 “*meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi*” dengan target yang ditetapkan tahun 2022 pada indikator sasaran ini adalah 2.77 poin. Pada tahun 2022, pelaksanaan evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan, dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator, dengan berdasarkan Permenpan RB Nomor 59 tahun 2020. Berdasarkan hasil pemantauan Menpan RB tersebut nilai indeks Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan domain tata kelola SPBE



adalah 2.70 poin. Dengan demikian capaian target indikator sasaran tersebut sebesar 97,47% dengan kategori **Sangat Tinggi**.

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran 1

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Kriteria
	Target	Realisasi	% Capaian	
Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2.77 poin	2.70 poin	97,47	Sangat Tinggi

Hasil pencapaian indeks domain tersebut merupakan salah satu kontribusi dalam pencapaian nilai Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon yang menjadi indikator tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, serta masuk dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD) Bupati Cirebon. Nilai Indeks SPBE hasil pemantauan Menpan RB yaitu 2.66 poin dan masuk dalam kategori **Tinggi**. Bila dibandingkan dengan target pada RPJMD 2019-2024 sebesar 3.00 poin (tahun 2022) sehingga untuk capaian tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dan salah satu sasaran dari RPJMD Kabupaten Cirebon belum memenuhi target.

**Pencapaian Indikator Tujuan Diskominfo /
Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon**

No	Indikator Tujuan Diskominfo/ Indikator Sasaran RPJMD	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks SPBE	3.00 poin	2.66 poin	88,67

B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Apabila kita membandingkan capaian Indeks Domain Tata Kelola SPBE tahun 2022 (2.66 poin) terhadap tahun 2021 (2.00 poin) dan tahun 2020 (2.57) maka terjadi kenaikan capaian kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Capaian%
Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2.57 poin	2.00 poin	2.66 poin	33



Berdasarkan tabel diatas menunjukkan realisasi indikator tersebut dari tahun 2022 terhadap tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 33%.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2022 dengan Target Renstra Periode Tahun 2019-2024

Penjelasan perbandingan realisasi hingga Tahun 2022 dengan Target Renstra dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Kinerja hingga Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2019-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Target Akhir Tahun Renstra	% Capaian
	Target	Realisasi	% Capaian		
Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2.77 poin	2.70 poin	97,47 poin	2,97 poin	90,91

Berdasarkan tabel tersebut bahwa sasaran “*Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi*” diukur melalui 1 indikator yaitu Indeks Domain Tata kelola SPBE. Pada target akhir Renstra, capaian mengenai Indeks Domain Tata Kelola SPBE sebesar 2.97 poin. Sementara capaian indikator ini hingga tahun 2022 yang merupakan tahun ketiga Renstra sebesar 2.70 poin. Dengan demikian nilai pencapaiannya sebesar 90,91% sehingga **belum memenuhi target** akhir Renstra.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisis kesenjangan adalah analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan antara kondisi target yang akan dicapai dengan kondisi saat ini yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam penerapan layanan SPBE. Identifikasi terhadap adanya kesenjangan ini dapat menjadi *feedback* untuk rekomendasi tindak lanjut dalam rangka perbaikan penerapan layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Faktor yang mempengaruhi kegagalan pencapaian kinerja sasaran ini antara lain:

- (1) Belum terpenuhinya kebijakan tata kelola SPBE
- (2) Belum optimalnya Tim Koordinasi SPBE
- (3) Mengoptimalkan atas Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra dan Sistem Penghubung Layanan



Terkait hal tersebut, maka upaya-upaya agar meningkatkan capaian kinerja sasaran ini yaitu antara lain :

- (1) Aspek perencanaan strategis SPBE dapat ditingkatkan dengan menyusun dokumen perencanaan SPBE lainnya seperti kebijakan Peta Rencana SPBE Instansi, kebijakan manajemen data, kebijakan pembangunan aplikasi SPBE, kebijakan layanan Pusat Data, dan kebijakan layanan jaringan intra instansi.
- (2) Aspek penyelenggara SPBE dapat ditingkatkan dengan melakukan *review* fungsi Tim Koordinasi SPBE yang telah ada dengan program kerja yang terencana.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada point 3.4.

F. Analisis Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis ke-1

Dalam mencapai sasaran strategis ke-1 ini didukung oleh 1 (satu) program 2 (dua) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan, dengan total anggaran Rp. 4.369.786.724,00 atau 31,75% dari anggaran total Belanja, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 4.362.712.801,00 atau 99,84% dan realisasi fisik 100%, terdapat efisiensi/sisa anggaran sebesar Rp. 7.073.923,00.

Tabel 3.8
Alokasi Anggaran Sasaran Strategis 1

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Realisasi Fisik (%)	Efisiensi/ Sisa Anggaran	
			(Rp)	(%)		(Rp)	(%)
I	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	4.369.786.724	4.362.712.801	99,84		7.073.923	0,16
1	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah	2.905.521.904	2.902.253.120	99,89		3.268.784	0,11
1.1	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.800.000	19.800.000	100	100	0	0
1.2	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.885.721.904	2.882.453.120	99,89	100	3.268.784	0,11
2	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1.464.264.820	1.460.459.681	99,74		3.805.139	0,26



No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Realisasi Fisik	Efisiensi/ Sisa Anggaran	
		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(%)
2.1	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	119.024.300	119.024.300	100	100	0	0
2.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	716.442.220	714.981.110	99,80	100	1.461.110	0,20
2.3	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	67.116.450	67.112.130	99,99	100	4.320	0,01
2.5	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	202.748.000	202.743.68	100	100	4.320	0,01
2.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	295.666.800	293.469.5530	99,26	100	2.197.247	0,74
2.7	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	63.267.050	63.128.908	99,78	100	138.142	0,22
JUMLAH		4.369.786.724	4.362.712.801	99,84		7.073.923	0,16

Untuk mendukung capaian kinerja sasaran strategis ke-1 ini, dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut.

(1) Program Aplikasi Informatika

Alokasi anggaran untuk Program Aplikasi Informatika sebesar Rp. 4.369.786.724,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.362.712.801,00, sisa sebesar Rp. 7.073.923,00 atau tercapai sebesar 99,84 %. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.905.521.904,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.902.253.120,00, sisa sebesar Rp. 3.268.784,00 atau tercapai sebesar 99,89 %. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.19.800.000,00 sisa sebesar Rp.0,00 atau tercapai sebesar 100%. **Output** sub kegiatan adalah jumlah domain utama yang diperpanjang layanannya dan dilaksanakannya koordinasi dengan perangkat



daerah lain lintas sektor dalam rangka pelayanan berbasis elektronik

2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.885.721.904,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.882.453.120,00 sisa sebesar Rp. 3.268.784,00 atau tercapai sebesar 99.89%. **Output** sub kegiatan adalah jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas, terpenuhinya pemeliharaan jaringan TIK fiber optik yang difasilitasi Dinas Kominfo, terpenuhinya pemeliharaan perangkat keras router wireless yang difasilitasi Dinas Kominfo, pengembangan infrastruktur jaringan TIK (FO dan WAN)
- b. Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.464.264.820,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.460.459.681,00, sisa sebesar Rp.3.805.139,00 atau tercapai sebesar 99,74%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
1. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.119.024.300,00 dan terealisasi sebesar Rp.119.024.300,00 sisa sebesar Rp.0,00 atau tercapai sebesar 100%. **Output** sub kegiatan adalah jumlah dokumen perencanaan e-government.
 2. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.716.442.220,00 dan terealisasi sebesar Rp.714.981.110,00 sisa sebesar Rp.1.461.110,00 atau tercapai sebesar 99,80%. **Output** sub kegiatan adalah terpenuhinya pemeliharaan NOC yang difasilitasi Dinas Kominfo, jumlah pengelolaan suku cadang NOC dan jumlah perangkat daerah yang menggunakan dan menyimpan data di pusat data pemerintah.
 3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.67.116.450,00 dan terealisasi sebesar Rp.67.112.130,00 sisa sebesar Rp.4.320,00 atau tercapai sebesar 99,99%. **Output** sub kegiatan adalah Jumlah aplikasi yang dikembangkan dan dipelihara dalam meningkatkan komunikasi berbasis elektronik Pemerintah Daerah.

4. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.202.748.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.202.743.680,00 sisa sebesar Rp.4.320,00 atau tercapai sebesar 99,99%. **Output** sub kegiatan adalah jumlah aplikasi yang dibangun dan dikembangkan dalam mendukung pemerintahan berbasis elektronik.
5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.295.666.800,00 dan terealisasi sebesar Rp.293.469.553,00 sisa sebesar Rp.2.197.247,00 atau tercapai sebesar 99,26%. **Output** sub kegiatan adalah Jumlah titik pembangunan videotron, video conference dan kelengkapannya.
6. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.63.267.050,00 dan terealisasi sebesar Rp.63.128.908,00 sisa sebesar Rp.138.142,00 atau tercapai sebesar 99,78%. **Output** sub kegiatan adalah jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city dan jumlah peserta seminar dalam rangka mendukung implementasi smart city.

Berikut dokumentasi kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada sasaran ini dengan ditunjang infrastruktur yang cukup memadai.



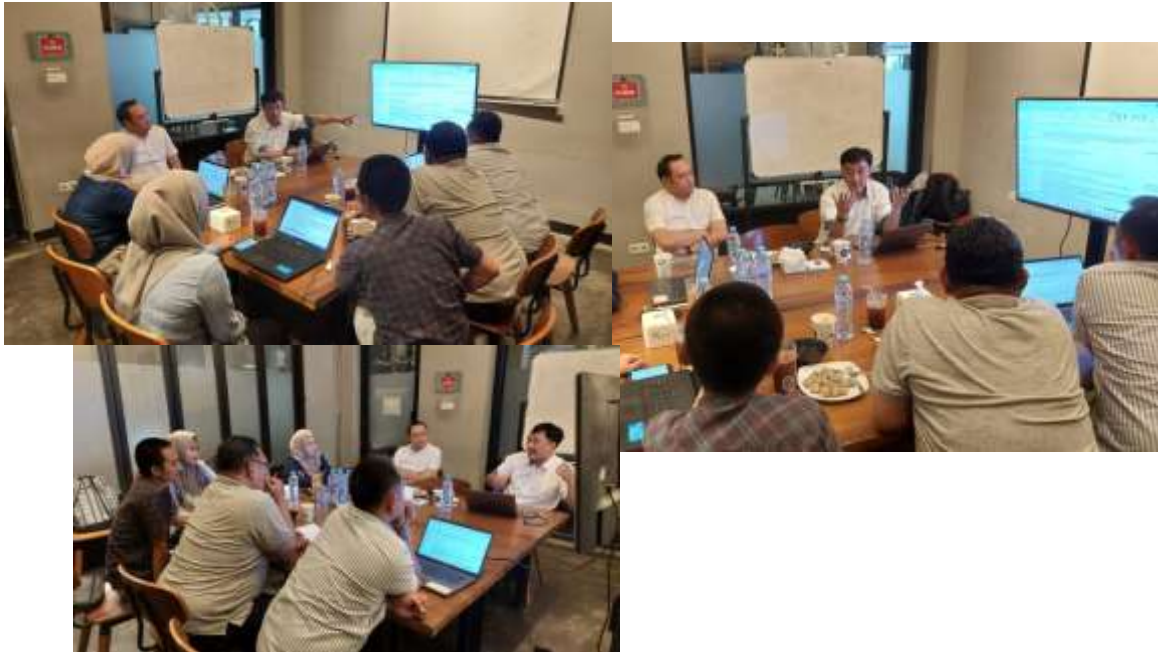
Fasilitasi koneksi internet dalam pemantauan kegiatan vaksinasi anak serentak di seluruh Indonesia Melalui Zoom Meeting di SDN 1 Megu Gede Kec. Weru



Kegiatan Tim IT di lapangan saat melakukan pengecekan ketika cuaca ekstrim



Kegiatan Zoom Meeting di Cirebon Command Center



Kegiatan FGD Arsitektur SPBE Kab. Cirebon

3.2.2 Sasaran Strategis ke-2

Sasaran 2

Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik

Tolok ukur capaian sasaran “*meningkatnya pelayanan informasi dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik*”, diukur oleh 1 (satu) indikator yaitu Indeks Keterbukaan Informasi Publik, dengan hasil capaian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Kriteria
		Target	Realisasi	% Capaian	
Meningkatnya pelayanan informasi dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	45 poin	81.70 poin	181,56	Sangat Tinggi

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian indikator kinerja pada sasaran strategis 2 “*meningkatnya pelayanan informasi dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik*” dengan target yang ditetapkan tahun 2022 pada indikator sasaran ini adalah 45 poin. Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Hasil Monitoring, Evaluasi dan Peningkatan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Jawa Barat tahun 2022 menetapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Cirebon memperoleh nilai akhir yaitu 81.70 poin atau tercapai 181,56% dari target yang ditetapkan sehingga masuk dalam kriteria **Sangat Tinggi**.

Kategori peringkat nilai indeks keterbukaan informasi publik seperti pada tabel di bawah, Kabupaten Cirebon masuk pada peringkat **Informatif**. Dengan nilai target KIP 45 poin, posisi indeks KIP tahun 2022 dengan nilai 81.70 poin menunjukkan bahwa semua komponen penunjang KIP sudah optimal.



Tabel 3.11
Rentang Nilai Predikat

No	Predikat	Nilai
1	Informatif	80% - 100%
2	Menuju Informatif	60% - 79,9%
3	Cukup Informatif	40% - 59,9%
4	Kurang informatif	20% - 39,9%
5	Tidak Informatif	0% - 19,9%

Sumber : Laporan Kegiatan Monev dan Pemeringkatan Badan Publik, 2022

Nilai akhir penerapan Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Cirebon yaitu 81.70 poin dengan peringkat **Informatif**.

Tabel 3.12
Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Kriteria
	Target	Realisasi	% Capaian	
Indeks Keterbukaan Informasi Publik	45 poin	81.70 poin	181,56	Sangat Tinggi

B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Apabila kita membandingkan capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020 (31.87 poin) dan tahun 2021 (76,69 poin) terhadap tahun 2022 (81.70 poin) maka terjadi peningkatan capaian kinerja yang cukup signifikan yaitu 6,53%. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.13
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	%Capaian
Indeks Keterbukaan Informasi Publik	31.87 poin	76.69 poin	81.70 poin	6,53



C. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2022 dengan Target Renstra Periode Tahun 2019-2024

Penjelasan perbandingan realisasi hingga Tahun 2022 dengan Target Renstra dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14
Perbandingan Capaian Kinerja hingga Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2019-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Target Akhir Tahun Renstra	% Capaian
	Target	Realisasi	% Capaian		
Indeks Keterbukaan Informasi Publik	45 poin	81.70 poin	181,56	57 poin	143,33

Berdasarkan tabel di atas bahwa sasaran “Meningkatnya pelayanan informasi dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik” diukur melalui 1 indikator yaitu Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Pada target akhir Renstra, capaian mengenai Indeks Keterbukaan Informasi Publik sebesar 57 poin. Sementara capaian indikator ini hingga tahun 2022 yang merupakan tahun ketiga Renstra sebesar 81.70 poin. Dengan demikian nilai pencapaiannya sebesar 134,33% sehingga **telah melampaui target** akhir Renstra.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini antara lain:

- (1) Komunikasi antara pembuat kebijakan dengan para implementor sudah berjalan dengan cukup baik karena pelayanan dan ketepatan waktu yang jelas oleh pegawai. Namun, komunikasi antara implementor dengan publik dalam menyebarluaskan informasi perlu dioptimalkan.
- (2) Sumber daya yang ada dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik cukup memadai dengan mengoptimalkan sumber daya manusia dan *portal website* dalam mempublikasikan data dan informasi.
- (3) Sikap-sikap implementor dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik, dapat dikatakan baik karena berupaya mematuhi peraturan, saling mendukung antara pihak-pihak yang terkait juga adanya kerjasama yang dilakukan oleh implementor merupakan sikap-sikap yang mampu menunjang terjadinya implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik menjadi lebih maksimal
- (4) Adanya transparansi informasi publik namun belum maksimal.



Terkait hal tersebut, maka upaya-upaya agar meningkatkan capaian kinerja sasaran ini yaitu antara lain :

- (1) Agar komunikasi KIP antar pegawai dengan masyarakat lebih diutamakan dibanding penyampaian informasi melalui media.
- (2) Agar pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang mengacu pada UU KIP dan Menambah Staff/ Petugas dalam mensosialisasikan UU KIP.
- (3) Agar petugas perlu segera memenuhi kapasitas sumber daya yang kurang memadai agar dapat menunjang kinerja yang lebih maksimal.
- (4) Agar keterbukaan informasi publik disampaikan secara transparan, jelas dan wajar.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada point 3.4.

F. Analisis Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis ke-2

Dalam mencapai sasaran strategis ke-2 ini didukung oleh 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan, dengan total anggaran Rp2.893.403.900,00 atau 21,02% dari anggaran total Belanja, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 2.881.549.528,00 dan realisasi fisik 100%, terdapat efisiensi /sisa anggaran sebesar Rp 11.854.372,00.

Tabel 3.16
Alokasi Anggaran Sasaran Strategis 2

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Realisasi Fisik	Efisiensi/ Sisa Anggaran	
		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(%)
I	Program Informasi dan Komunikasi Publik	2.893.403.900	2.881.549.528	99,59		11.854.372	0,41
1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.893.403.900	2.881.549.528	99,59		11.854.372	0,41
1.1	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	48.030.400	48.022.000	99,98	100	8.400	0,02
1.2	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	53.350.000	53.350.000	100	100	0	0
1.3	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	150.635.800	150.448.954	99,88	100	186.846	0,12



No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Realisasi Fisik	Efisiensi/ Sisa Anggaran	
		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(%)
1.4	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	211.603.300	211.053.300	99,74	100	550.000	0,26
1.5	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	616.894.700	616.614.894	100	100	279.806	0,05
1.6	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	1.220.935.900	1.220.935.900	96,05	100	0	0
1.7	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	228.603.800	219.584.800	99,98	100	9.019.000	3,95
1.8	Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	253.665.000	253.621.680	98,39	100	43.320	0,02
1.9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	109.685.000	107.318.000		100	1.767.000	1,61
JUMLAH		2.893.403.900	2.881.549.528	99,59		11.854.372	0,41

Untuk mendukung capaian kinerja sasaran strategis ke-2 ini, dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut.

(1) Program Informasi dan Komunikasi Publik

Alokasi anggaran untuk Program Informasi dan Komunikasi Publik sebesar Rp.2.893.403.900,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.881.549.528,00 sisa sebesar Rp.11.854.372,00 atau tercapai sebesar 99,59%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.893.403.900,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.881.549.528,00 sisa sebesar Rp.11.854.372,00 atau tercapai sebesar 99,59%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.48.030.400,00 dan terealisasi sebesar Rp.48.022.000,00 sisa sebesar Rp.8.400,00 atau tercapai sebesar 99,98 %. **Output** sub kegiatan adalah jumlah rekomendasi hasil kegiatan Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi Temu Bakohumas Tingkat Nasional sebagai bahan perumusan kebijakan teknis.



2. Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.53.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.53.350.000,00 sisa sebesar Rp.0,00 atau tercapai sebesar 100%. **Output** sub kegiatan adalah jumlah monitoring dan aspirasi publik melalui media online.
3. Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.635.800,00 dan terealisasi sebesar Rp.150.448.954,00 sisa sebesar Rp.186.864,00 atau tercapai sebesar 99,88%. **Output** sub kegiatan adalah jumlah konten informasi publik yang dibuat dan dipublikasikan.
4. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.211.603.300,00 dan terealisasi sebesar Rp.211.053.300 sisa sebesar Rp.550.000,00 atau tercapai sebesar 99,74%. **Output** sub kegiatan adalah jumlah eksemplar majalah yang diterbitkan
5. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.616.894.700,00 dan terealisasi sebesar Rp.616.614.894,00 sisa sebesar Rp.279.806,00 atau tercapai sebesar 99,95%. **Output** sub kegiatan adalah tersedianya badan publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terlaksananya penyebaran informasi melalui wawar keliling, terpublikasinya program-program pembangunan dan hasil-hasil di media TV dan media lain
6. Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.220.935.900,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.220.935.900,00 sisa sebesar Rp.0,00 atau tercapai sebesar 100%. **Output** sub kegiatan adalah jumlah diseminasi informasi melalui media cetak dan media radio
7. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.228.603.800,00 dan terealisasi sebesar Rp.219.584.800,00 sisa sebesar Rp.9.019.000,00 atau tercapai sebesar 96,05%. **Output** sub kegiatan adalah jumlah wartawan yang menjadi peserta uji kompetensi wartawan dan mendapat sertifikat
8. Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.253.665.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.253.621.680,00 sisa sebesar Rp.43.320,00 atau tercapai sebesar 99,98%. **Output** sub kegiatan adalah terpenuhinya operasional Komisi Informasi kabupaten Cirebon

setiap bulannya dan tersedianya jumlah komisioner Komisi Informasi Kabupaten Cirebon

9. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.109.685.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.107.918.000,00 sisa sebesar Rp.1.767.000,00 atau tercapai sebesar 98,39%. **Output** sub kegiatan adalah jumlah kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Cirebon

Berikut kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada sasaran ini.



Kegiatan peliputan



Kegiatan diseminasi informasi melalui TV lokal



Pusat Pelayanan Informasi sebagai tempat layanan informasi kepada masyarakat



Kegiatan diseminasi informasi melalui Radio Pilaradio



Kegiatan saat Sidang Sengketa Informasi Publik oleh KID Kabupaten Cirebon



Penguatan dan Pendampingan PPID di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon



Penertbitan Majalah Paseban setiap 2 bulan sekali



Rilis berita melalui website diskominfo.cirebonkab.go.id



Kegiatan Tim Saber Hoaks Kabupaten Cirebon

3.2.3 Sasaran Strategis ke-3

Sasaran 3

Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah

Tolok ukur capaian sasaran “meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah”, diukur oleh 1 (satu) indikator yaitu Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral, dengan hasil capaian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.17
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Kriteria
		Target	Realisasi	% Capaian	
Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral	65 %	76,35%	117,46	Sangat Tinggi

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian indikator kinerja pada sasaran strategis 3 “*meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah*” dengan target yang ditetapkan tahun 2022 pada indikator sasaran ini adalah 65% dengan realisasi 76,35% atau 117,46% sehingga masuk kriteria **sangat tinggi**. Perhitungan dari capaian sasaran ini terdiri dari 2 (dua) komponen penunjang yaitu:

- 1) Persentase dokumen statistik yang dihasilkan, dengan target 60% dari target akhir Renstra
- 2) Persentase keterisian data yang dikelola, dengan target 70% pada tahun 2022.

Dan rumus perhitungannya sebagai berikut:

$$= \frac{(\% \text{ dokumen yang dihasilkan} + \% \text{ keterisian data SIPD})}{\text{Total Komponen}} \times 100\%$$

Pada komponen “persentase dokumen statistik yang dihasilkan”, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon melalui Bidang Statistik, Persandian dan E-Government telah menyusun Buku Statistik Daerah, Buku Profil Daerah dan Buku Survei Ekonomi Daerah Tingkat Kecamatan, sehingga dapat dikatakan bahwa target **60%** telah didapat.

Sementara maksud dari komponen “presentase keterisian data yang dikelola” adalah keterisian data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon. Sampai dengan Bulan Desember 2022, keterisian data SIPD melebihi ekspektasi yang berawal target hanya 70% justru keterisian Data SIPD mencapai 92,7%, yang terdiri dari :

- Jenis data sejumlah 112 jenis data
- Total elemen data adalah 2081 data; dan
- Elemen data yang sudah terisi adalah 1929 data.



Gambar 3. Dashboard SIPD

Dengan demikian, kita dapat melakukan pengukuran dalam pencapaian sasaran kinerja ini:

$$\begin{aligned} &= \frac{(\% \text{ dokumen yang dihasilkan} + \% \text{ keterisian data SIPD})}{\text{Total Komponen}} \times 100 \\ &= \frac{(60\% + 92,7\%)}{2} \times 100\% \\ &= \frac{(152,7\%)}{2} \times 100\% \\ &= 76,35\% \end{aligned}$$



Tabel 3.18

Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Kriteria
	Target	Realisasi	% Capaian	
Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral	65%	76,35%	117,46	Sangat tinggi

B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Apabila kita membandingkan capaian *Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral* tahun 2022 (76,35%) terhadap tahun 2021 (57,50%) dan tahun 2020 (58,05%) maka terjadi kenaikan capaian kinerja sebesar 32,78%.

Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.19
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	%Capaian
Persentase pegelolaan dan layanan statistik sektoral	58,05%	57,50%	76,35%	32,78

C. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2022 dengan Target Renstra Periode Tahun 2019-2024

Penjelasan perbandingan realisasi hingga Tahun 2022 dengan target Renstra dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.20
Perbandingan Capaian Kinerja hingga Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2019-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Target Akhir Tahun Renstra	% Capaian
	Target	Realisasi	% Capaian		
Persentase pegelolaan dan layanan statistik sektoral	65%	76,35%	117,46	90%	130,51

Berdasarkan tabel di atas bahwa sasaran "*meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah*" diukur melalui 1 indikator yaitu persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral. Pada target akhir Renstra, capaian mengenai



persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral sebesar 90%. Sementara capaian indikator ini hingga tahun 2022 yang merupakan tahun ketiga Renstra sebesar 76,35%. Dengan demikian nilai pencapaiannya sebesar 84,83% sehingga **belum memenuhi target** akhir Renstra.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian ini antara lain :

- 1) Adanya komitmen pimpinan dalam mencapai target keterisian data SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) sehingga melampaui dari target yang ditetapkan.
- 2) Terpenuhinya target penyusunan dokumen statistik yang merupakan salah satu komponen dalam pengukuran capaian kinerja.
- 3) Terkait Data Statistik, sudah ada portal data yang dapat diakses oleh umum pada alamat opendata.cirebonkab.go.id dan satudata.cirebonkab.go.id yang hanya dapat diakses oleh internal Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- 4) Pengumpulan data statistik sektoral oleh Perangkat Daerah sudah menggunakan format data yang distandarkan sesuai Standardisasi Data BPS dan Diskominfo Provinsi.
- 5) Untuk pengelola data di masing-masing perangkat daerah, telah dibentuk Tim Pengelola Data pada setiap Perangkat Daerah sesuai Keputusan Bupati No. 048/Kep.455-DISKOMINFO/2022 tentang Pengelola Data Statistik Sektoral dan Geospasial pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- 6) Mekanisme Pengumpulan Data dari OPD:
 - a. Diskominfo selaku walidata telah menyusun daftar data statistik sektoral dan data geospasial yang ada pada seluruh Perangkat Daerah. Daftar data itu menjadi acuan bagi Perangkat Daerah untuk mengirimkan data-data yang sesuai kewenangannya untuk dikirimkan kepada Diskominfo selaku Walidata.
 - b. Dari masing-masing data yang ada dibuat format data yang terstandar untuk mempermudah dalam hal interoperabilitas/berbagi pakai data baik dengan Perangkat Daerah lain atau dengan publik.
 - c. Data dikirimkan oleh Perangkat Daerah kepada Walidata melalui sistem elektronik (satudata.cirebonkab.go.id) dengan terlebih dahulu



diklasifikasikan apakah data tersebut merupakan data publik (data yang bisa diakses oleh umum) atau data internal/dikecualikan. Jika merupakan data publik maka akan masuk kepada portal opendata.cirebonkab.go.id dan dapat diakses oleh publik, tetapi jika masuk ke dalam kategori data internal/dikecualikan maka data tersebut hanya akan bisa diakses oleh pemegang akses yang telah diotorisasi.

- d. Setelah Perangkat Daerah mengirimkan data-data yang ditentukan, Peran Walidata adalah memverifikasi kesesuaian data yang masuk apakah sudah sesuai prinsip Satu Data Indonesia atau belum.
- 7) Data-data yang dikelola pada portal Satu Data Kabupaten Cirebon menjadi pusat data Kabupaten Cirebon dan dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Cirebon No. 56 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Cirebon Pasal 4 Huruf (b) dan (d) yang berbunyi: "*Peraturan Bupati ini bertujuan untuk : mengatur tata kelola data di Pemerintah Daerah agar terwujud satu basis data pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan (Interoperabilitas)*"; dan "*mewujudkan perencanaan yang berkualitas, pelaksanaan dan pengendalian yang efektif, monitoring dan evaluasi pembangunan yang terukur dan komprehensif serta perumusan kebijakan pembangunan Daerah yang berbasis data dan tepat sasaran*".
- 8) Data sudah digunakan dalam perencanaan anggaran sesuai pasal 31 ayat 7 Perbup Nomor 56 tentang Satu Data Kabupaten Cirebon menyatakan bahwa: "Data yang dikumpulkan dan dikirimkan digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan perencanaan anggaran pada Perangkat Daerah".

Terkait hal tersebut diatas, maka upaya-upaya agar capaian kinerja sasaran ini tetap baik atau bahkan lebih baik yaitu antara lain :

- 1) Menyusun Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengelola Data Statistik dan Pengelola data Geospasial.
- 2) Bekerjasama dengan BPS untuk melaksanakan penyusunan metadata ke perangkat daerah.
- 3) Melaksanakan Temu Tim Teknis SIPD secara berkala.
- 4) Melaksanakan TOT Pengelolaan Data.
- 5) Melaksanakan pelatihan data geospasial dan pengelola aplikasi Satu Data.
- 6) Melaksanakan pembinaan bagi Petugas Pengelola Data.



E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada point 3.4.

F. Analisis Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis ke-3

Dalam mencapai sasaran strategis ke-3 ini didukung oleh 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, dengan total anggaran Rp 319.609.650,00 atau 2,32% dari anggaran total Belanja, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.318.933.311,00 dan realisasi fisik 100%, terdapat efisiensi/sisa anggaran sebesar Rp 676.339,00.

Tabel 3. 21
Alokasi Anggaran Sasaran Strategis 3

No	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Realisasi Fisik	Efisiensi/ Sisa Anggaran	
		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(%)
I	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	319.609.650	318.933.311	99,79		676.339	0.21
1	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	319.609.650	318.933.311	99,79		676.339	0.21
1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	17.744.150	17.622.300	99,31	100	121.850	99,31
1.2	Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	14.700.000	14.700.000	100	100	0	0
1.3	Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur	114.576.000	114.560.011	99,99	100	15.989	99,99
1.4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	172.589.500	172.051.000	99,69	100	538.500	99,69
	JUMLAH	319.609.650	318.933.311	99,79		676.339	0.21

Program dan kegiatan pendukung capaian sasaran strategis 3 yaitu :

- (4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebesar Rp. 319.609.650,00 dan terealisasi sebesar Rp. 318.933.311,00 sisa sebesar Rp. 676.339,00 atau tercapai sebesar 99,79%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penympulan, pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.744.150,00 dan terealisasi sebesar Rp.17.622.300,00 sisa sebesar Rp.121.850,00 atau tercapai sebesar 99,31%. **Output** sub kegiatan adalah tersedianya buku statistik daerah.
- 2) Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.14.700.000,00 sisa sebesar Rp.0,00 atau tercapai sebesar 100%. **Output** sub kegiatan adalah jumlah kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral.
- 3) Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.114.576.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.114.560.011,00 sisa sebesar Rp.15.989,00 atau tercapai sebesar 99,99%. **Output** sub kegiatan adalah terisinya data pada SIPD.
- 4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.172.589.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.172.051.000,00 sisa sebesar Rp.538.500,00 atau tercapai sebesar 99,69%. **Output** sub kegiatan adalah tersedianya buku Ekonomi Daerah Tingkat Kecamatan.

Berikut *output* dari sub kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada sasaran ini.



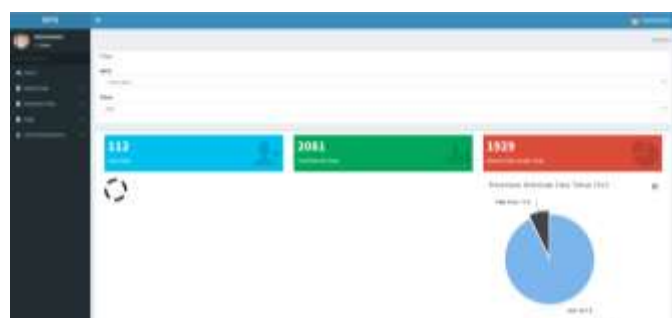
Rapat Temu Tim Teknis



Rapat Temu Tim Teknis



Beberapa dokumen statistik yang telah disusun pada tahun 2022



Tampilan dashboard pada aplikasi SIPD dengan hasil akhir berupa Buku Laporan SIPD

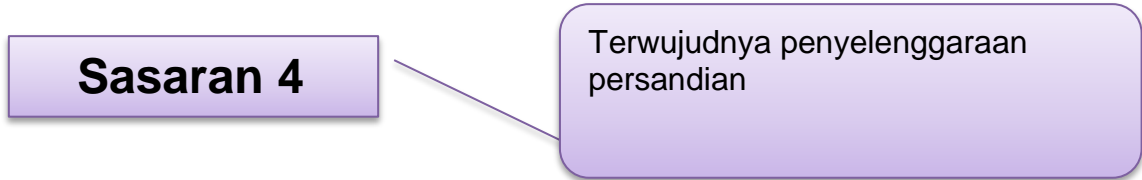


Portal yang dapat diakses yaitu opendata.cirebonkab.go.id dan satudata.cirebonkab.go.id.



Kegiatan Monitoring Menara Telekomunikasi

3.2.4 Sasaran Strategis ke-4



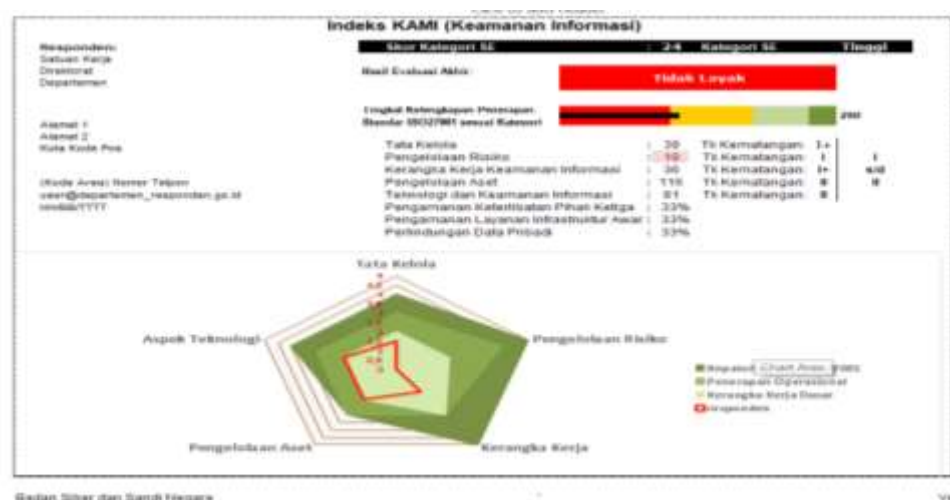
Tolok ukur capaian sasaran “*Terwujudnya penyelenggaraan persandian*”, diukur oleh 1 (satu) indikator yaitu Indeks Keamanan Informasi, dengan hasil capaian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.22
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Kriteria
		Target	Realisasi	% Capaian	
Terwujudnya penyelenggaraan persandian	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Level II	Level II	100	Sangat tinggi

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian indikator kinerja pada sasaran strategis 4 “*terwujudnya penyelenggaraan persandian*” dengan target yang ditetapkan tahun 2022 pada indikator sasaran ini adalah Level II. Pada tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan penilaian mandiri Indeks KAMI capaian kinerja untuk indikator ini adalah 290 poin dan masuk pada kategori Level II atau tercapai 100% dari target yang ditetapkan, sehingga masuk kriteria **Sangat tinggi**. Berikut hasil evaluasi tingkat kematangan keamanan informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.



Gambar 5. Hasil Penilaian Tingkat Kematangan KAMI



Dari gambar diatas, dapat dilihat hasil penilaian Indeks KAMI terdiri dari masing-masing area berikut:

- 1) Tata Kelola Keamanan Informasi, dengan total nilai 39 poin
- 2) Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi, dengan total nilai 19 poin
- 3) Kerangka Kerja Keamanan Informasi, dengan total nilai 36 poin
- 4) Pengelolaan Aset Informasi, dengan total nilai 115 poin
- 5) Teknologi dan Keamanan Informasi, dengan total nilai 81 poin
- 6) Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga penyedia Layanan, dengan nilai 33%
- 7) Pengamanan Layanan Infrastruktur, dengan nilai 33%
- 8) Perlindungan Data Pribadi, dengan nilai 33%

KATEGORI SISTEM ELEKTRONIK				
Rendah		Skor Akhir		Status Kesiapan
10	15	0	174	Tidak Layak
		175	312	Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar
		313	535	Cukup Baik
		536	645	Baik
Tinggi		Skor Akhir		Status Kesiapan
16	34	0	272	Tidak Layak
		273	455	Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar
		456	583	Cukup Baik
		584	645	Baik
Strategis		Skor Akhir		Status Kesiapan
35	50	0	333	Tidak Layak
		334	535	Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar
		536	609	Cukup Baik
		610	645	Baik

Tabel 3.23

Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 4

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Kriteria
	Target	Realisasi	% Capaian	
Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Level II	Level II	100	Sangat tinggi

B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Apabila kita membandingkan capaian Indeks KAMI tahun 2022 (Level II skor 290) terhadap tahun 2021 (level II skor 282) dan tahun 2020 (level II skor 282) maka terjadi kesamaan capaian kinerja. Pada tahun 2022, Indeks KAMI berdasarkan penilaian adalah 290 poin atau berada pada level II. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan pada tabel berikut.



Tabel 3.24

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	%Capaian
Indeks Keamanan Informasi	Level II	Level II	Level II	100

A. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2022 dengan Target Renstra Periode Tahun 2019-2024

Penjelasan perbandingan realisasi hingga Tahun 2022 dengan Target Renstra dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.25

Perbandingan Capaian Kinerja hingga Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2019-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Target Akhir Tahun Renstra	% Capaian
	Target	Realisasi	% Capaian		
Indeks Keamanan Informasi	Level II	Level II	100	Level II	100

Berdasarkan tabel di atas bahwa *sasaran "terwujudnya penyelenggaraan persandian"* diukur melalui 1 indikator yaitu Indeks Keamanan Informasi. Pada target akhir Renstra, capaian mengenai Indeks KAMI adalah Level II. Sementara capaian indikator ini hingga tahun 2022 yang merupakan tahun ketiga Renstra sebesar Level II. Dengan demikian nilai pencapaiannya sebesar 100% sehingga **memenuhi target** akhir Renstra.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian ini antara lain :

- 1) Adanya dukungan dari konsultan dalam penyelenggaraan persandian.

Meskipun memenuhi target yang diharapkan, namun terdapat hambatan dalam mencapai sasaran strategis ini, diantaranya :

- 1) Urusan persandian masih dianggap sebelah mata dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan



- 2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang belum sesuai dengan kompetensi.
- 3) Sarana dan prasarana belum memenuhi standar dalam mendukung pengelolaan persandian.

Terkait hal tersebut diatas, maka upaya-upaya agar capaian kinerja sasaran ini tetap baik atau bahkan lebih baik yaitu antara lain :

- 1) Melakukan perekrutan Tenaga Ahli disesuaikan dengan keadaan anggaran
- 2) Mengarahkan para SDM di perangkat daerah untuk mengikuti program pelatihan Pemograman melalui Digitalent Kominfo.
- 3) Melakukan kerja sama dengan akademisi mahasiswa yang memiliki kemampuan keamanan siber.
- 4) Dilakukan tahap persiapan dalam penyusunan dokumen SMKI dengan meminta informasi kepada Kementerian, provinsi Jawa Barat dan daerah lain.
- 5) Dilakukan persiapan dalam pelaksanaan ISO 27001:2013.

C. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada point 3.4.

D. Analisis Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis ke-4

Dalam mencapai sasaran strategis ke-4 ini didukung oleh 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, dengan total anggaran Rp 195.884.050,00 atau 1,42% dari anggaran total Belanja, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.195.875.410,00 dan realisasi fisik 100%, terdapat efisiensi /sisa anggaran sebesar Rp 8.640,00.

Tabel 3.26
Alokasi Anggaran Sasaran Strategis 4

No	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Realisasi Fisik	Efisiensi/ Sisa Anggaran	
		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(%)
I	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	195.884.050	195.875.410	99,99		8.640	0,01
1	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	175.146.200	175.137.560	99,99		8.640	0,01
1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	175.146.200	175.137.560	99,99	100	8.640	0,01



No	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Realisasi Fisik	Efisiensi/ Sisa Anggaran	
		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(%)
2	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	20.737.850	20.737.850	100		0	0
2.1	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20.737.850	20.737.850	100	100	0	0
	JUMLAH	195.884.050	195.875.410	99,99		8.640	0,01

Untuk mendukung capaian kinerja sasaran strategis ke-4 ini, dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut.

(1) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi sebesar Rp.195.884.050,00 dan terealisasi sebesar Rp.195.875.410,00 sisa sebesar Rp.8.640,00 atau tercapai sebesar 99,99%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.195.884.050,00 dan terealisasi sebesar Rp.195.875.410,00 sisa sebesar Rp.8.640,00 atau tercapai sebesar 99,99%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 175.146.200,00 dan terealisasi sebesar Rp.175.137.560,00 sisa sebesar Rp.8.640,00 atau tercapai sebesar 99,99%. **Output** sub kegiatan adalah jumlah sosialisasi/bimtek dan monev sertifikasi elektronik dan jumlah pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi.
- b. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.737.850,00 dan terealisasi sebesar Rp.20.737.850,00 sisa sebesar Rp.0,00 atau tercapai sebesar 100%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.737.850,00 dan terealisasi sebesar Rp.20.737.850,00 sisa sebesar Rp.0,00 atau tercapai sebesar 100%. **Output** sub kegiatan



adalah Jumlah paket pemeliharaan jaringan santel dan jumlah sosialisasi dalam menyelenggarakan jaring komunikasi sandi.



Sosialisasi Penerapan Tanda Tangan Elektronik melalui aplikasi *e-sign*

3.2.5 Sasaran Strategis ke-5

Sasaran 5

Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

Tolok ukur capaian sasaran “*meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon*”, diukur oleh 1 (satu) indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan hasil capaian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.27
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-5

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Kriteria
		Target	Realisasi	% Capaian	
Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.590	3.594	100,14	Sangat tinggi

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian indikator kinerja pada sasaran strategis 6 “*meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon*” dengan target yang ditetapkan tahun 2022 pada indikator sasaran ini adalah 3.590 poin dengan realisasi 3.594 poin atau tercapai 100,14%. Dengan demikian masuk pada kriteria **sangat tinggi**.

Tabel 3.28
Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran 5

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Kriteria
	Target	Realisasi	% Capaian	
Indeks Kepuasan Masyarakat	3.590 poin	3.594 poin	100,14	Sangat tinggi

Pada tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Cirebon melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat yang dimulai dari tanggal 23 Mei 2022 s.d. 01 Juli 2022. Adapun pelayanan yang dinilai adalah pelayanan jaringan internet di 40 Kecamatan lingkup Kabupaten Cirebon. Jumlah responden adalah 265 aparatur. Hasil survey diperoleh data sebagai berikut :



Hasil Rata-rata Setiap Unsur Pelayanan

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan
U1	Persyaratan pelayanan	3.642
U2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3.706
U3	Waktu penyelesaian	3.698
U4	Biaya/tariff	3.811
U5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3.555
U6	Kompetensi pelaksana	3.562
U7	Perilaku pelaksana	3.525
U8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3.340
U9	Sarana dan prasarana	3.834

Dari tabel hasil rata-rata setiap unsur pelayanan diatas, maka dapat disimpulkan pendapat responden yang menyatakan bahwa:

- Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dalam pelayanan dengan nilai rata-rata 3.340 (menyatakan cukup responsif);
- Unsur pelayanan lainnya mempunyai nilai unsur pelayanan diatas nilai unsur Sarana dan Prasarana menyatakan hasil yang sangat baik, yaitu menyatakan hasilnya baik, meliputi kesesuaian persyaratan pelayanan, kemudahan prosedur pelayanan, kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan, kewajaran tarif/baya, kesesuaian produk pelayanan, kompetensi petugas dalam pelayanan, kesopanan dan keramahan dalam pelayanan sudah baik.

a. Nilai Indeks Pelayanan

Untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan tersebut dikaitkan dengan 0,11 sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang. Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$(3.642 \times 0,11) + (3.706 \times 0,11) + (3.698 \times 0,11) + (3.811 \times 0,11) + (3.555 \times 0,11) + (3.562 \times 0,11) + (3.525 \times 0,11) + (3.340 \times 0,11) + (3.834 \times 0,11) = 3,594.$$

Dengan demikian nilai indeks pelayanan diperoleh 3,594

b. Nilai Survei Pelayanan

Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, ke 9 unsur dari rata-rata tertimbang tersebut dijumlahkan, sebagai berikut:

- Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar = $3,594 \times 25 = 89.85$
- Mutu Pelayanan termasuk kategori **A**.
- Kinerja unit pelayanan adalah **Sangat Baik**.



Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Nilai Survei Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00-2,5996	25,00–64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Apabila kita membandingkan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2022 (3.594 poin) terhadap tahun 2021 (3.572 poin) dan tahun 2020 (3.558 poin) maka terjadi kenaikan capaian kinerja sebesar 0.62%.

Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.29
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	%Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat	3.558 poin	3.572 poin	3.594 poin	0.62

C. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2022 dengan Target Renstra Periode Tahun 2019-2024

Penjelasan perbandingan realisasi hingga Tahun 2022 dengan Target Renstra dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.30
Perbandingan Capaian Kinerja hingga Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2019-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Target Akhir Tahun Renstra	% Capaian
	Target	Realisasi	% Capaian		
Indeks Kepuasan Masyarakat	3.590 poin	3.594 poin	100,14	3.63 poin	99,01

Berdasarkan tabel di atas bahwa sasaran “*meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon*” diukur melalui 1 indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat. Pada target akhir Renstra Capaian mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 3.63 poin. Sementara capaian indikator ini hingga tahun 2022 yang merupakan tahun ketiga Renstra sebesar 3.594 poin. Dengan demikian nilai pencapaiannya sebesar 99,01% sehingga **belum memenuhi target** akhir Renstra.



D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian ini antara lain :

- 1) Adanya sarana dan prasarana yang mendukung dalam objek pelayanan;
- 2) Adanya komitmen dari pimpinan untuk bekerja tanggap dan akurat dengan mengedepankan pelayanan prima.

Terkait hal tersebut diatas, maka upaya-upaya agar capaian kinerja sasaran ini tetap baik atau bahkan lebih baik yaitu antara lain :

- 1) Melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama mempertahankan atribut pendukung petugas pelayanan;
- 2) Diperlukan upaya kemudahan dalam mendapatkan informasi mengajukan keluhan dengan adanya operator pelayanan publik;
- 3) Memberikan penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi dan terus memberikan motivasi untuk mendapatkan prestasi di masa mendatang serta mempertimbangkan kesejahteraan petugas pelayanan dalam bentuk insentif khusus.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada point 3.4.

F. Analisis Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis ke-6

Dalam mencapai sasaran strategis ke-6 ini didukung oleh 1 (satu) program, 6 (enam) kegiatan dan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan, dengan total anggaran Rp 5.983.966.717,00 atau 43,48% dari anggaran total Belanja, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 5.603.199.626,00 atau 93,64% dan realisasi fisik 100%, terdapat efisiensi /sisa anggaran sebesar Rp 380.767.091,00.



Tabel 3.31

Alokasi Anggaran Sasaran Strategis 5

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Realisasi Fisik (%)	Efisiensi/ Sisa Anggaran	
			(Rp)	(%)		(Rp)	(%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.946.400	43.946.400	100	100	0	0
1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48.499.450	48.499.450	100	100	0	0
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.683.999.700	4.332.907.900	92,50	100	351.091.761	7,50
2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	33.999.900	33.999.900	100	100	0	0
2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	38.529.345	38.529.345	100	100	0	0
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						
3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.385.000	2.385.000	100	100	0	0



No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Realisasi Fisik (%)	Efisiensi/ Sisa Anggaran	
			(Rp)	(%)		(Rp)	(%)
3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.821.920	88.821.920	100	100	0	0
3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.693.400	2.693.400	100	100	0	0
3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.500.000	1.500.000	100	100	0	0
3.5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.266.500	14.266.500	100	100	0	0
3.6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.958.000	25.138.189	93,25	100	1.819.811	6,75
3.7	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	50.010.200	50.010.200	100	100	0	0
3.8	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.500.000	1.500.000	100	100	0	0
3.9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.756.850	51.756.850	100	100	0	0
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	349.348.352	328.933.310	94.16	100	20.415.042	5,84
5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	438.229.800	437.115.423	99,75	100	1.114.377	0.25
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						



No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Realisasi Fisik	Efisiensi/ Sisa Anggaran	
			(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(%)
6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77.380.000	76.750.000	99,75	99.19	630.000	0.81
6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.302.000	5.605.900	49,60	49,60	5.696.100	50,40
6.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.840.000	15.800.000	100	100	0	0
	JUMLAH	5.983.966.717	5.603.199.626	93,64		380.767.091	6,36

Untuk mendukung capaian kinerja sasaran strategis ke-6 ini, dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut.

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.5.983.966.717,00 dan terealisasi sebesar Rp.5.603.199.626,00 sisa sebesar Rp.380.767.091,00 atau tercapai sebesar 93,64%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.92.445.850,00 dan terealisasi sebesar Rp.92.445.850,00 sisa sebesar Rp.0,00 atau tercapai sebesar 100%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.43.946.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 43.946.400,00 sisa sebesar Rp.0,00 atau tercapai sebesar 100%. **Output** sub kegiatan adalah jumlah dokumen perencanaan yang tersusun.
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.48.499.450,00 dan terealisasi sebesar Rp.



48.499.450,00 sisa sebesar Rp.0,00 atau tercapai sebesar 100%.

Output sub kegiatan adalah jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.683.999.700,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.379.907.739,00 sisa sebesar Rp.351.091.761,00 atau tercapai sebesar 92,58%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.683.999.700,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.332.907.939,00 sisa sebesar Rp.351.091.761,00 atau tercapai sebesar 92,50%. **Output** sub kegiatan adalah jumlah pegawai ASN yang terbayar gaji dan tunjangan setiap bulan.
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.999.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.999.900,00 sisa sebesar Rp.0,00 atau tercapai sebesar 100%. **Output** sub kegiatan adalah jumlah laporan keuangan akhir tahun
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.33.999.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 33.999.900,00 sisa sebesar Rp.0,00 atau tercapai sebesar 100%. **Output** sub kegiatan adalah jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran

c. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.38.529.345,00 dan terealisasi sebesar Rp. 38.529.345,00 sisa sebesar Rp.0,00 atau tercapai sebesar 100%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 38.529.345,00 dan terealisasi sebesar Rp.38.529.345,00 sisa sebesar Rp.0,00 atau tercapai sebesar 100%. **Output** sub kegiatan adalah jumlah paket pengadaan pakaian hari-hari tertentu.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.229.891.870,00 dan terealisasi sebesar Rp.228.072.059,00 sisa sebesar Rp.1.819.811,00 atau tercapai



sebesar 99,21%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.385.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.385.000,00 sisa sebesar Rp.0,- atau tercapai sebesar 100%. **Output** sub kegiatan adalah jumlah lampu yang disediakan.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.88.821.920,00 dan terealisasi sebesar Rp. 88.821.920,00 sisa sebesar Rp.0,00 atau tercapai sebesar 100%. **Output** sub kegiatan adalah jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.
3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.693.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.693.400,00 sisa sebesar Rp.0,00 atau tercapai sebesar 100%. **Output** sub kegiatan adalah tersedianya bahan bakar untuk genset setiap bulannya dan tersedianya isi ulang tabung gas.
4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.500.000,00 sisa sebesar Rp.0,00 atau tercapai sebesar 100%. **Output** sub kegiatan adalah tersedianya jumlah makanan dan minuman rapat pegawai.
5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.266.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.14.266.500,00 sisa sebesar Rp.0,00 atau tercapai sebesar 100%. **Output** sub kegiatan adalah tersedianya paket cetakan dan penggandaan yang disediakan setiap bulan
6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.958.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.819.811,00 sisa sebesar Rp.477.500,- atau tercapai sebesar 93,25%. **Output** sub kegiatan adalah tersedianya bahan bacaan koran lokal dan nasional
7. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.010.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 50.010.200,00 sisa sebesar Rp.0,00 atau tercapai sebesar 100%. **Output** sub kegiatan adalah tersedianya paket alat tulis kantor setiap bulan
8. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.500.000,00



- sisa sebesar Rp.0,00 atau tercapai sebesar 100%. **Output** sub kegiatan adalah tersedianya jumlah makanan dan minuman tamu.
9. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.41.756.850,00 dan terealisasi sebesar Rp.41.756.850,00 sisa sebesar Rp.0,00 atau tercapai sebesar 100%. **Output** sub kegiatan adalah jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.787.578.152,00 dan terealisasi sebesar Rp.766.048.733,00 sisa sebesar Rp.21.529.419,00 atau tercapai sebesar 97,27%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.349.348.352,00 dan terealisasi sebesar Rp.328.933.310,00 sisa sebesar Rp.20.415.042,00 atau tercapai sebesar 94,16%. **Output** sub kegiatan adalah jumlah jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik selama 1 tahun.
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.438.229.800,00 dan terealisasi sebesar Rp.437.115.423,00 sisa sebesar Rp.1.114.377,00 atau tercapai sebesar 99,75%. **Output** sub kegiatan adalah terbayarnya jasa pelayanan umum kantor (pramu kantor/operator komputer) setiap bulannya, tersedianya jumlah petugas jasa keamanan dan ketertiban kantor tiap bulan dan jumlah luasan kantor yang dibersihkan.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.104.522.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.98.195.900,00 sisa sebesar Rp.6.326.100,00 atau tercapai sebesar 93,95%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.77.380.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.76.750.000,00 sisa sebesar Rp.630.000,00 atau tercapai sebesar 99,19%. **Output** sub kegiatan adalah jumlah kendaraan dinas rida dua dan roda empat yang diberikan bahan bakar.

2. Sub Kegiatan Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.302.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.5.605.900.00 sisa sebesar Rp.5.696.100.00 atau tercapai sebesar 49,60%. **Output** sub kegiatan adalah jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus perijinannya.
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.840.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 15.840.000,00 sisa sebesar Rp.0,- atau tercapai sebesar 100%. **Output** sub kegiatan adalah jumlah pemeliharaan AC, komputer dan printer.



Lampiran II
BERES BOPORAN MASYARAKAT (BM)
PELAYANAN ANGGARAN OPERASIONAL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2022

NILAI RMK		PELAYANAN JUMBUH OPERASIONAL	
RMK		MUTU PELAYANAN	
No	URAIAN PELAYANAN	Nilai Rata-Rata	Nilai Rata-Rata
101	Pelayanan	3.542	100 (100%)
102	Waktu	3.706	100 (100%)
103	Waktu Pelayanan	3.580	100 (100%)
104	Melayan	3.511	100 (100%)
105	Waktu Layanan	3.502	100 (100%)
106	Kompetensi Pelayanan	3.542	100 (100%)
107	Perilaku Pelayanan	3.525	100 (100%)
108	Pengawasan, Saran dan Masukan	3.340	100 (100%)
109	Sarana dan Prasarana	3.534	100 (100%)

Total Nilai rata-rata pelayanan yang BMK nilai tertinggi
 (Mendapat nilai sangat memuaskan untuk kategori nilai tinggi yang akan terus dipertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang akan datang)

Uraian	801	802	803	1010	842	844	938	885	1010	
RMK /	3.642	3.706	3.688	3.611	3.555	3.592	3.525	3.540	3.534	
RMK /	0.401	0.408	0.407	0.419	0.391	0.392	0.388	0.387	0.402	
RMK Unit pelayanan										89,85

Keterangan :

- UR = ul. U/14
- RMK = Nilai rata-rata
- RMK = Indeks Kepuasan Masyarakat
- % = Jumlah RMK RMK tertinggi
- % = Jumlah RMK Tertinggi x 25
- RMK Per Urus = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah responden yang terisi
- RMK tertinggi per unsur = RMK per unsur x 0,071

No.	URAIAN PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
101	Pelayanan	3.542
102	Waktu, Mutu, dan Proses	3.706
103	Waktu Pelayanan	3.580
104	Melayan	3.511
105	Waktu Layanan (Per Pelayanan)	3.502
106	Kompetensi Pelayanan	3.542
107	Perilaku Pelayanan	3.525
108	Pengawasan, Saran dan Masukan	3.340
109	Sarana dan Prasarana	3.534

Hasil kegiatan berupa laporan SKM Tahun 2022

3.3 Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika mengelola anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon sejumlah Rp.13.762.651.041,00 dengan realisasi sejumlah Rp.13.362.270.676,00 atau



97,09%. Sedangkan sisa Anggaran yang tidak diserap sejumlah Rp.400.380.365,00,00. Berikut ialah rincian pengelolaan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon Pada Tahun Anggaran 2022.

Tabel 3.33
Pendapatan dan Belanja
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2022

KODE REK.	URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.405.286.375	2.607.014.250	(201.727.875)	108,39
JUMLAH PENDAPATAN		2.405.286.375	2.607.014.250	(201.727.875)	108,39
5.	BELANJA DAERAH	13.762.651.041	13.362.270.676	400.380.365	97,09
5.1.	BELANJA OPERASI	13.500.601.581	13.100.464.306	400.137.275	97,04
5.1.01.	BELANJA PEGAWAI	4.673.349.700	4.321.707.939	351.641.761	92,48
5.1.02.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.827.251.881	8.778.756.367	48.495.514	99,45
5.2.	BELANJA MODAL	262.049.460	261.806.370	243.090	99,91
5.2.02.	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	262.049.460	261.806.370	243.090	99,91
JUMLAH BELANJA		13.762.651.041	13.362.270.676	400.380.365	97,09

Dalam rangka perbaikan ke depan diperlukan perencanaan yang lebih matang pada saat penyusunan anggaran sehingga dapat meminimalkan anggaran yang tidak terserap. Gambaran pencapaian sasaran strategis dengan alokasi anggaran dibandingkan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.34
Capaian Anggaran per Sasaran

No	Sasaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi	% Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	4.369.786.724	4.362.712.801	99,84	Didukung oleh 1 (satu) program : • Program Aplikasi Informatika
2	Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	2.893.403.900	2.881.549.528	99,59	Didukung oleh 1 (satu) program : • Program Informasi dan Komunikasi Publik
3	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	319.609.650	318.933.311	99,79	Didukung oleh 1 (satu) program : • Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4	Terwujudnya penyelenggaraan persandian	195.884.050	195.875.410	99,99	Didukung oleh 1 (satu) program : • Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
5	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	5.983.966.717	5.603.199.626	93,64	Didukung oleh 1 (satu) program : • Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota

Sumber : Hasil Pengolahan Data



Berdasarkan data tersebut diatas dapat dilihat bahwa alokasi terbesar adalah untuk mendukung sasaran kesatu yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon”, sedangkan sasaran yang paling sedikit alokasi anggarannya adalah pada sasaran keempat “Terwujudnya penyelenggaraan persandian”.

3.4 Analisis Efisiensi Sasaran

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut.

$$\text{IE} = \frac{\% \text{CAPAIAN OUTPUT}}{\% \text{CAPAIAN INPUT}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\text{SE} = \frac{\% \text{RENCANA CAPAIAN OUTPUT}}{\% \text{RENCANA CAPAIAN INPUT}}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Efisiensi ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Apabila $\text{IE} \geq \text{SE}$: Kegiatan Efisien
Apabila $\text{IE} < \text{SE}$: Kegiatan Tidak Efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$\text{TE} = \frac{\text{IE} - \text{SE}}{\text{SE}}$$



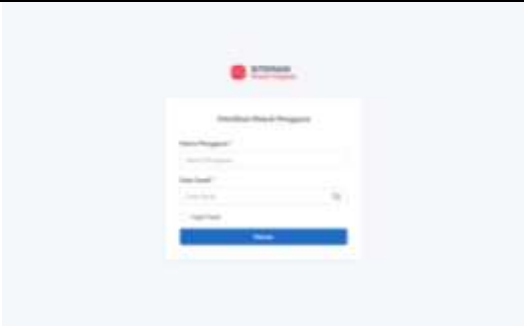
Tabel 3.35
Pengukuran Efisiensi Sasaran Tahun 2022

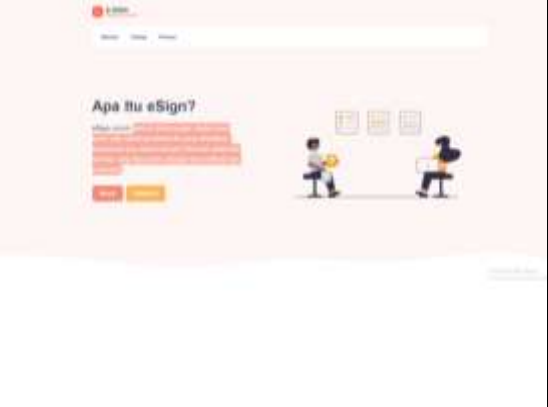

NO	SASARAN STRATEGIS	%RENCANA CAPAIAN (SE)		%CAPAIAN (IE)		TE	KATEGORI
		INPUT	OUTPUT	INPUT	OUTPUT		
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	100	100	99,84	97,47	-0.02	Tidak Efisien
2	Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	100	100	99,59	181,56	0,8231	Efisien
3	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	100	100	99,79	117,46	0,1771	Efisien
4	Terwujudnya penyelenggaraa persandian	100	100	99,99	100	0,0001	Efisien
5	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	100	100	93,64	100,14	0,0694	Efisien

Berdasarkan tabel diatas, 4 (empat) sasaran dikategorikan efisien karena hasil pengukuran menunjukkan bahwa $IE \geq SE$, sementara 1 (satu) sasaran tidak efisien karena hasil pengukuran menunjukkan bahwa $IE \leq SE$.

3.5 Inovasi

Berikut inovasi yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon tahun 2022 sebagai berikut :

No	Screenshoot	Aplikasi	Deskripsi
1		Siterasi	Siterasi merupakan aplikasi sistem penghubung layanan Pemerintah Kabupaten Cirebon lokal yang saat ini baru mengintegrasikan open data dan sikaton. Diharapkan kedepan semua aplikasi dapat diintegrasikan melalui aplikasi siterasi ini. Selain itu aplikasi ini sebagai tempat share API (Application Programming Interface) yaitu suatu penghubung antara server dengan aplikasi, sehingga dapat Portal yang dapat diakses http://siterasi.diskominfo.cirebonkab.go.id .

No	Screenshoot	Aplikasi	Deskripsi
2		E-sign	Esign merupakan bentuk tanda tangan digital yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya, yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Portal yang diakses https://esign.cirebonkab.go.id .
3		CIKA-Cirebon Katon Mobile	CIKA-Cirebon Katon Mobile merupakan aplikasi layanan pemerintah berbasis android yang berisi konten berita seputar program kegiatan pemerintah kabupaten Cirebon, konten aduan masyarakat, call center, dan layanan informasi lainnya. Aplikasi ini dapat diunduh di playstore

3.6 Penghargaan

Penghargaan yang diraih Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon selama tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Keterangan
1	Penghargaan Viral 2022 	Relawan Teknologi Informasi Komunikasi (RTIK) Kabupaten Cirebon mendapat penghargaan Dalam Ajang Festival Literasi Digital (Viral) Jawa Barat, tanggal 8 Oktober 2022
2	Juara II Penyelenggaraan Tata Kelola Data Terbaik se- Jawa Barat Tahun 2022 	Pemerintah Kabupaten Cirebon meraih juara II Penyelenggaraan Tata Kelola Data terbaik se-Jawa Barat Tahun 2022 pada ajang Satu Data Jabar Awards Tahun 2022 pada tanggal 29 Oktober 2022

No	Uraian	Keterangan
3	<p>Predikat Kabupaten Informatif Tingkat Jawa Barat tahun 2022</p> 	<p>Pemerintah Kabupaten Cirebon raih penghargaan Kabupaten Informatif dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Jawa Barat tahun 2022 pada tanggal 8 Desember 2022</p>
4	<p>Person of the Year 2022 Inovative Government Organization – Inovasi Layanan Satu Data</p> 	<p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon menerima penghargaan "<i>Person of the Year 2022 Inovative Government Organization – Inovasi Layanan Satu Data</i>" yang diselenggarakan oleh Radar Cirebon, pada tanggal 19 Desember 2022</p>



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dilaksanakan dari bulan Januari – Desember 2022, Rencana Kerja dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon telah dilaksanakan 100%. Selain kegiatan operasional rutin, beberapa kegiatan yang menjadi tugas pokok telah terlaksana sesuai target yang ditetapkan, maka kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama tahun 2022 sebagaimana uraian data tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Hasil pengukuran capaian rata-rata sasaran strategis kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2022 sebesar 119,33%
- 2) Pencapaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi” dengan indikator sasaran “Indeks Domain Tata Kelola SPBE” yaitu 2.70 poin dari target 2,77 poin sehingga masuk kriteria **Sangat Tinggi**.
- 3) Pencapaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik” dengan indikator sasaran “Indeks Keterbukaan Informasi Publik” yaitu 81.70 poin dari target 45 poin sehingga masuk kriteria **Sangat Tinggi..**
- 4) Pencapaian sasaran strategis 3 “Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangkapy penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah” dengan indikator sasaran “Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral” yaitu 76,35 persen dari target 65 persen sehingga masuk kriteria **Sangat Tinggi..**
- 5) Pencapaian sasaran strategis 4 “Terwujudnya penyelenggaraan persandian” dengan indikator sasaran “Indeks Keamanan Informasi” yaitu Level II dari target Level II sehingga masuk kriteria **Sangat Tinggi..**
- 6) Pencapaian sasaran strategis 5 “Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon” dengan indikator sasaran “Indeks Kepuasan Masyarakat” yaitu 3,594 poin dari target 3,590 poin sehingga masuk kriteria **Sangat Tinggi..**
- 7) Realisasi anggaran pada tahun 2022 adalah Rp. 13.362.270.676,00 dengan presentase 97,09% dari keseluruhan anggaran Belanja sebesar Rp.13.762.651.041,00.
- 8) Realisasi efisiensi anggaran belanja sebesar Rp 400.380.365,00 atau sebesar 2,91%



- 9) Efisiensi sasaran tahun 2022, 4 (empat) sasaran dikategorikan efisien karena hasil pengukuran menunjukkan bahwa $IE \geq SE$, sementara 1 (satu) sasaran tidak efisien karena hasil pengukuran menunjukkan bahwa $IE \leq SE$.

4.2. Saran

Guna meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon di masa mendatang, diperlukan strategi-strategi terukur, antara lain :

- 1) Melakukan perbaikan perencanaan dengan membuat pemetaan dalam rangka penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan dalam upaya menyelaraskan target sasaran yang telah ditetapkan dengan regulasi yang ada;
- 2) Melakukan kerjasama dengan penyelenggara pelatihan yaitu BKPSDM dan lembaga pelatihan swasta, khususnya untuk pelatihan teknis teknologi informasi, statistik, persandian, perencanaan dan kepegawaian.
- 3) Aspek perencanaan strategis SPBE dapat ditingkatkan dengan menyusun dokumen perencanaan SPBE lainnya seperti kebijakan Peta Rencana SPBE Instansi, kebijakan manajemen data, kebijakan pembangunan aplikasi SPBE, kebijakan layanan Pusat Data, dan kebijakan layanan jaringan intra instansi. Dan aspek penyelenggara SPBE dapat ditingkatkan dengan melakukan *review* fungsi Tim Koordinasi SPBE yang telah ada dengan program kerja yang terencana agar nilai SPBE dapat meningkat.
- 4) Meningkatkan peran dan fungsi PPID pada tiap Perangkat Daerah melalui pengembangan sistem informasi dan *portal/website* PPID pada seluruh Perangkat Daerah, dilaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi untuk memberikan penjelasan kepada PPID Perangkat Daerah mengenai tugas pokok, fungsi PPID dan mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik;
- 5) Mendorong pengembangan *single data* dan *big data centre* yang terintegrasi, sehingga akan mempercepat dalam analisis terhadap berita dan opini, audit serta pengukuran indeks kepuasan, indeks pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang nantinya dikompilasi dalam sebuah direktori data internal agar bisa dipergunakan sebagai bahan sosialisasi namun tetap meningkatkan koordinasi validitas data dengan instansi atau perangkat daerah terkait;
- 6) Melakukan perekrutan Tenaga Ahli disesuaikan dengan keadaan anggaran.
- 7) Mengarahkan para SDM di perangkat daerah untuk mengikuti program pelatihan Pemograman melalui Digitalent Kominfo.



Dengan tersusunnya laporan kinerja instansi pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon tahun 2022 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Cirebon.

Sumber, Februari 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIREBON**

NANAN ABDUL MANAN, S.STP., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19800703 199810 1 001



LAMPIRAN



**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PERIODE 2019-2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2020		2021		2022		2023		2024				Kondisi Akhir	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,63 POIN	2,78	26.368.402.000	2,93	40.508.154.800	3	44.829.004.800	3,1	125.758.000.000	3,2	133.388.800.000	3,2	370.852.361.600		
			Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2,57 POIN	2,57	14.230.000.000	2,67	21.521.000.000	2,77	28.130.800.000	2,87	98.778.000.000	2,97	100.808.000.000	2,97	263.467.800.000		
		03.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks aspek teknologi informasi dan komunikasi	2,67 POIN	2,97	14.210.000.000	3	150.000.000	0	0	0	0	0	0	3	14.360.000.000		
				Cakupan pengelolaan aplikasi informatika	0 Persen	0	20.000.000	85,5	21.371.000.000	88	28.130.800.000	91	98.778.000.000	94	100.808.000.000	94	249.107.800.000		
		03.2.01.	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	0 Perangkat daerah	73	3.555.000.000	73	5.170.000.000	73	12.580.800.000	73	30.148.000.000	73	30.248.000.000	365	81.701.800.000		
				Jumlah domain utama yang diperpanjang layanannya	0 Domain	0	0	0	0	1	12.580.800.000	1	30.148.000.000	1	30.248.000.000	3	72.976.800.000		
		03.2.01.02.	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Diperpanjangnya layanan domain utama dan layanan sub domain	1 Domain	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah layanan domain utama dan layanan sub domain	0 Domain	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	1	50.000.000		
				Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan subdomain Instansi Penyelenggara Negara	0 Subdomain	0	0	15	250.000.000	0	0	0	0	0	0	15	250.000.000		
				Dilaksanakannya koordinasi dengan perangkat daerah lain lintas sektor dalam rangka pelayanan berbasis elektronik	0 kali	0	0	26	50.000.000	0	0	0	0	0	0	26	50.000.000		
				Jumlah domain utama yang diperpanjang layanannya	0 Domain	0	0	1	20.000.000	1	50.000.000	0	0	0	0	2	70.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Dilaksanakannya koordinasi dengan perangkat daerah lain lintas sektor dalam rangka pelayanan berbasis elektronik	0 Kali	0	0	0	0	60	98.000.000	0	0	0	0	60	98.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	148.000.000	1	248.000.000	2	396.000.000		
		03.2.01.03.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Belanja bandwidth internet, jumlah downline akses dan jumlah penerima akses	1 layanan	1	3.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000.000		BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas	0 Perangkat daerah	0	0	73	800.000.000	73	4.000.000.000	0	0	0	0	73	4.800.000.000	BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas	0 Perangkat daerah	73	5.000.000	73	2.550.000.000	0	0	0	0	0	73	2.555.000.000		BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Terpenuhinya pemeliharaan jaringan TIK fiber optik yang difasilitasi Dinas Kominfo	0 Bulan	0	0	3	100.000.000	12	500.000.000	0	0	0	15	600.000.000		BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah pemeliharaan Fiber Optik yang difasilitasi Dinas Kominfo	0 Bulan	0	0	12	150.000.000	0	0	0	0	0	12	150.000.000		BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Terpenuhinya pemeliharaan perangkat keras router wireless yang difasilitasi Dinas Kominfo	0 Bulan	0	0	3	100.000.000	12	500.000.000	0	0	0	15	600.000.000		BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah pemeliharaan router wireless yang difasilitasi Dinas Kominfo	0 Bulan	0	0	12	300.000.000	0	0	0	0	0	12	300.000.000		BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Pengembangan infrastruktur jaringan TIK (Live Streaming fiber optik)	0 Unit	0	0	20	100.000.000	55	500.000.000	0	0	0	75	600.000.000		BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah peralatan dan perlengkapan suku cadang fiber optik yang dibelanjakan	0 Unit	0	0	50	200.000.000	0	0	0	0	0	50	200.000.000		BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Pengembangan infrastruktur jaringan TIK (WAN)	0 Unit	0	0	20	100.000.000	50	500.000.000	0	0	0	70	600.000.000		BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah peralatan dan perlengkapan suku cadang WAN yang dibelanjakan	0 Unit	0	0	45	300.000.000	0	0	0	0	0	45	300.000.000		BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah titik hotspot area publik yang dibangun	0 Titik	0	0	0	0	15	500.000.000	0	0	0	0	15	500.000.000	BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah Perangkat Daerah yang terkoneksi jaringan intra pemerintah	0 Perangkat Daerah	0	0	73	100.000.000	0	0	0	0	0	73	100.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon	
				Pengendalian Bandwidth dan monitoring jaringan TIK (Belanja sewa fiber optik)	0 Titik	0	0	0	412	5.932.800.000	0	0	0	0	412	5.932.800.000	BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
				Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	0 Unit	0	0	0	0	0	0	2	30.000.000.000	2	30.000.000.000	2	60.000.000.000		
		03.2.02.	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	0 layanan	9	10.675.000.000	9	16.351.000.000	9	15.550.000.000	9	68.630.000.000	9	70.560.000.000	9	181.766.000.000		
		03.2.02.01.	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi dan kebijakan mengenai domain dan indeks SPBE	0 Regulasi	1	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1	350.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon	
				Jumlah peraturan Kepala Daerah yang mendukung Implementasi e-government	0 Regulasi	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	1	50.000.000			
				Jumlah dokumen perencanaan e-government	0 Dokumen	0	0	2	150.000.000	0	0	0	0	0	2	150.000.000			
				Jumlah regulasi yang terbit dalam mendukung Implementasi e-government	0 Dokumen	0	0	0	0	3	150.000.000	0	0	0	3	150.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
				Jumlah dokumen perencanaan e-government	0 Dokumen	0	0	1	50.000.000	1	450.000.000	0	0	0	2	500.000.000			
				Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	10	600.000.000	10	700.000.000	20	1.300.000.000		
		03.2.02.03.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Cakupan operasional Kabupaten Cirebon Command Center	1 layanan	1	305.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	305.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon	
				Terpenuhinya pemeliharaan NOC yang difasilitasi Dinas Kominfo	0 Bulan	0	0	3	30.000.000	12	400.000.000	0	0	0	15	430.000.000	BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Sertifikasi Data Center dan presentase operasional Data Center	0 layanan	1	8.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah pengelolaan suku cadang NOC	0 Unit	0	0	20	200.000.000	55	400.000.000	0	0	0	0	75	600.000.000	BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Presentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan dan menyimpan data di pusat data pemerintah	0 Persen	0	0	71	9.500.000.000	0	0	0	0	0	0	71	9.500.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah perangkat daerah yang menggunakan dan menyimpan data di pusat data pemerintah	0 Perangkat Daerah	0	0	73	70.000.000	73	7.500.000.000	0	0	0	0	73	7.570.000.000	BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah pemeliharaan NOC	0 Bulan	12	5.000.000	12	400.000.000	0	0	0	0	0	0	24	405.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Pengembangan Disaster Recovery Center (DRC)	0 DRC	0	0	0	0	1	1.000.000.000	0	0	0	0	1	1.000.000.000	BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah peralatan dan perlengkapan suku cadang NOC yang dibelanjakan	0 Unit	32	5.000.000	45	400.000.000	0	0	0	0	0	0	45	405.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	0 Unit	0	0	0	0	0	2	10.300.000.000	2	11.300.000.000	2	21.600.000.000	BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
		03.2.02.04.	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah website lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan yang dapat diakses	0 Sistem informasi	5	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5	150.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Persentase data yang dapat berbagi pakai	0 Persen	0	0	26	50.000.000	0	0	0	0	0	0	26	50.000.000		
				Jumlah aplikasi yang mendukung keterbukaan informasi	0 Aplikasi	0	0	2	100.000.000	0	0	0	0	0	0	2	100.000.000		
				Terlaksananya seminar terkait teknologi untuk masyarakat	0 orang	0	0	100	50.000.000	0	0	0	0	0	0	100	50.000.000		
				Jumlah aplikasi yang dikembangkan dan dipelihara dalam meningkatkan komunikasi berbasis elektronik Pemerintah Daerah	0 Aplikasi	0	0	1	300.000.000	5	300.000.000	0	0	0	0	6	600.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	300.000.000	1	500.000.000	2	800.000.000		
	03.2.02.06.		Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah promosi dan sosialisasi layanan publik berbasis elektronik	0 kegiatan	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Tersedianya sistem informasi elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	0 sarana media	0	0	2	100.000.000	0	0	0	0	0	0	2	100.000.000		
				Jumlah promosi dan sosialisasi Smart City berbasis elektronik	0 Kegiatan	0	0	2	100.000.000	0	0	0	0	0	0	2	100.000.000		
				Tersedianya sistem informasi elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	0 Sistem informasi	0	0	0	2	100.000.000	0	0	0	0	2	100.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
				Jumlah promosi dan sosialisasi Smart City berbasis elektronik	0 Kegiatan	0	0	1	10.000.000	2	100.000.000	0	0	0	3	110.000.000			
				Jumlah monitoring dan evaluasi SPBE	0 Kegiatan	0	0	0	1	300.000.000	0	0	0	0	1	300.000.000			
				Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	0 Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	73	550.000.000	73	750.000.000	73	1.300.000.000			
	03.2.02.07.		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi umum dan aplikasi khusus yang terintegrasi	0 Aplikasi	2	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2	250.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon	
				Jumlah Pembangunan sistem informasi untuk mendukung smart city	0 aplikasi	0	0	4	250.000.000	0	0	0	0	0	4	250.000.000			
				Jumlah aplikasi yang dibangun dan dikembangkan dalam mendukung pemerintahan berbasis elektronik	0 Aplikasi	0	0	2	200.000.000	5	600.000.000	0	0	0	7	800.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
				Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	0 Unit	0	0	0	0	0	5	600.000.000	5	800.000.000	10	1.400.000.000			
	03.2.02.08.		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah layanan publik dan pemerintahan yang terintegrasi	0 Layanan Publik	2	700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2	700.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Tersedianya fasilitas operasional Cirebon Katon Respon 112	0 Kegiatan	0	0	1	2.000.000.000	1	1.000.000.000	0	0	0	0	2	3.000.000.000	BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	0 Persen	0	0	26	300.000.000	0	0	0	0	0	26	300.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon	
				Jumlah titik pembangunan CCTV, videotron, video conference dan kelengkapannya	0 Lokasi	0	0	10	500.000.000	10	2.500.000.000	0	0	0	20	3.000.000.000	BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
				Jumlah aplikasi yang mendukung pelayanan masyarakat Kab Cirebon	0 Aplikasi	0	0	3	450.000.000	0	0	0	0	0	3	450.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon	
				Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	0 Layanan	0	0	0	0	0	9	55.500.000.000	9	55.500.000.000	9	111.000.000.000	BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
				Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah lain	0 tahun	0	0	1	71.000.000	0	0	0	0	0	1	71.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon	
		03.2.02.09.	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Penyelenggaraan koordinasi dalam rangka mewujudkan Kabupaten Cirebon Smart City	1 kegiatan	1	155.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1	155.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon	
				Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city	0 Persen	62	5.000.000	71	60.000.000	0	0	0	0	0	71	65.000.000			
				Jumlah peserta seminar dalam rangka mendukung implementasi smart city	0 Orang	0	0	60	100.000.000	0	0	0	0	0	60	100.000.000			
				Jumlah peserta seminar dalam rangka mendukung implementasi smart city	0 Orang	0	0	70	30.000.000	70	100.000.000	0	0	0	140	130.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
				Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city	0 Perangkat Daerah	0	0	3	70.000.000	3	70.000.000	0	0	0	3	140.000.000			
				Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	0 Dokumen	0	0	0	0	0	12	180.000.000	12	390.000.000	24	570.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		03.2.02.10.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah aparatur SDM TIK pemerintah daerah tersertifikasi	0 orang	20	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20	100.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan/bimtek	0 orang	110	350.000.000	100	150.000.000	0	0	0	0	0	0	210	500.000.000		
				Jumlah ASN pengelola TIK yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikasi	0 Orang	0	0	80	100.000.000	0	0	0	0	0	0	80	100.000.000		
				Jumlah remaja dan dewasa (pelajar/masyarakat) yang dilatih dengan keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi	0 Orang	0	0	130	350.000.000	0	0	0	0	0	0	130	350.000.000		
				Jumlah remaja dan dewasa (pelajar/masyarakat) yang dilatih dengan keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi	0 Orang	0	0	0	140	280.000.000	0	0	0	0	0	140	280.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah ASN, PPPK, dan Non PNS pengelola TIK yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikasi	0 Orang	0	0	210	40.000.000	250	200.000.000	0	0	0	0	460	240.000.000		
				Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	0 Dokumen	0	0	0	0	0	12	500.000.000	12	520.000.000	24	1.020.000.000			
		03.2.02.11.	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Sertifikasi kompetensi GCIO	0 orang	7	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	7	100.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon	
				Jumlah aparatur yang mendapat sertifikasi kompetensi GCIO	0 Orang	0	0	10	120.000.000	0	0	0	0	0	0	10	120.000.000		
				Jumlah aparatur yang mendapat sertifikat kompetensi GCIO	0 Orang	0	0	0	15	100.000.000	0	0	0	0	0	15	100.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	0 Dokumen	0	0	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	2	200.000.000			
			Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	55,52 POIN	56,63	3.030.000.000	40	6.728.000.000	45	4.415.000.000	50	4.725.000.000	57	6.435.000.000	57	25.333.000.000		
		02.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan informasi dan komunikasi publik	52,5 Persen	52,5	3.030.000.000	0	495.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.525.000.000		
				Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	0 Persen	60	0	65	6.233.000.000	70	4.415.000.000	75	4.725.000.000	80	6.435.000.000	80	21.808.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		02.2.01.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media informasi dan komunikasi publik yang digunakan	0 Media	5	3.030.000.000	5	6.728.000.000	5	4.415.000.000	5	4.725.000.000	5	6.435.000.000	5	25.333.000.000		
	02.2.01.01.	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		Jumlah koordinasi bidang informasi dan komunikasi publik	0 tahun	1	70.000.000	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	2	90.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah kebijakan teknis daerah (Perbup dan/ Keputusan Bupati dan/ Keputusan Kadis) bidang informasi dan komunikasi publik yang diterbitkan	0 Kebijakan	0	0	0	0	1	35.000.000	0	0	0	0	1	35.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah peraturan daerah atau peraturan kepala daerah bidang informasi dan komunikasi publik	0 Regulasi	0	0	1	30.000.000	0	0	0	0	0	0	1	30.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah rekomendasi hasil kegiatan Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi (SAIK) Temu Bakohumas Tk Nasional sebagai bahan perumusan kebijakan teknis	0 Rekomendasi	0	0	1	25.000.000	1	65.000.000	0	0	0	0	2	90.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Terlaksananya Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi (SAIK) Temu Bakohumas Tk Nasional	0 Kegiatan	0	0	1	30.000.000	0	0	0	0	0	0	1	30.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	3	200.000.000	3	350.000.000	6	550.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
	02.2.01.02.	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		Jumlah bintek dan monitoring opini dan aspirasi publik	0 paket	1	150.000.000	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	2	155.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah layanan opini dan aspirasi publik melalui media cetak	0 Layanan	0	0	0	0	26	45.000.000	0	0	0	0	26	45.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah bulan layanan opini dan aspirasi publik melalui media cetak	0 Buah	0	0	12	50.000.000	0	0	0	0	0	0	12	50.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah layanan opini dan aspirasi publik melalui media online	0 Layanan	0	0	0	0	12	80.000.000	0	0	0	0	12	80.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah bulan layanan opini dan aspirasi publik melalui media online	0 Buah	0	0	12	50.000.000	0	0	0	0	0	0	12	50.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah layanan opini dan aspirasi publik melalui Kelompok Informasi Masyarakat	0 Layanan	0	0	0	0	12	40.000.000	0	0	0	0	12	40.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah bulan layanan opini dan aspirasi publik melalui Kelompok Informasi Masyarakat	0 Buah	0	0	12	50.000.000	0	0	0	0	0	0	12	50.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik	0 Dokumen	0	0	0	0	12	165.000.000	12	265.000.000	24	430.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
	02.2.01.04.		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten informasi publik yang dibuat dan dipublikasikan	200 konten	365	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	365	400.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon	
				Jumlah konten informasi publik yang dibuat dan dipublikasikan	0 Konten	0	0	90	50.000.000	365	300.000.000	0	0	0	455	350.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
				Jumlah konten informasi publik yang dibuat dan dipublikasikan	0 Konten	0	0	365	400.000.000	0	0	0	0	0	365	400.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	0 Dokumen	0	0	0	0	12	300.000.000	12	400.000.000	24	700.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
	02.2.01.05.		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi yang dikelola	1 media	1	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah eksemplar majalah yang diterbitkan	0 Eksemplar	0	0	1.200	100.000.000	3.430	250.000.000	0	0	0	0	4.630	350.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah eksemplar majalah yang diterbitkan	0 Eksemplar	0	0	3.000	250.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000	250.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah media luar ruang yang dicetak	0 Lembar	0	0	0	0	2.000	60.000.000	0	0	0	0	2.000	60.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah media luar ruang yang dicetak	0 Lembar	0	0	2.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000	50.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	14	310.000.000	14	410.000.000	28	720.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		02.2.01.06.	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah layanan peningkatan kapasitas PPID dan publikasi yang disampaikan kepada masyarakat	2 layanan	4	600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah PPID yang mengikuti pelatihan/peningkatan kapasitas dan mempunyai sertifikat untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsinya	0 orang PPID	0	0	85	120.000.000	85	150.000.000	0	0	0	0	170	270.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	0 Badan Publik	0	0	76	100.000.000	0	0	0	0	0	0	76	100.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah penyebaran informasi melalui pemutaran film	0 Kali	0	0	0	0	12	10.000.000	0	0	0	0	12	10.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Terlaksananya penyebaran informasi melalui pemutaran film	0 Kali	0	0	12	20.000.000	0	0	0	0	0	0	12	20.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah penyebarluasan informasi melalui wawar keliling	0 Kali	0	0	10	5.000.000	36	20.000.000	0	0	0	0	46	25.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Terlaksananya penyebarluasan informasi melalui wawar keliling	0 Kali	0	0	36	20.000.000	0	0	0	0	0	0	36	20.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah terpublikasikannya program-program pembangunan dan hasil-hasil di media TV	0 Publikasi	0	0	3	300.000.000	13	400.000.000	0	0	0	0	16	700.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Terpublikasikannya program-program pembangunan dan hasil-hasil di media TV	0 publikasi	0	0	12	360.000.000	0	0	0	0	0	0	12	360.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah terpublikasikannya program-program pembangunan dan hasil-hasil di media lain	0 Publikasi	0	0	30	100.000.000	100	120.000.000	0	0	0	0	130	220.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Terpublikasikannya program-program pembangunan dan hasil-hasil di media lain	0 Publikasi	0	0	100	150.000.000	0	0	0	0	0	0	100	150.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	0 layanan	0	0	0	0	12	100.000.000	0	0	0	0	12	100.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	12	810.000.000	12	1.000.000.000	24	1.810.000.000		
		02.2.01.07.	Layanan Hubungan Media	Jumlah media yang digunakan dalam diseminasi informasi	2 media	1	460.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah diseminasi informasi melalui media cetak	0 Terbit	0	0	20	600.000.000	180	1.500.000.000	0	0	0	0	200	2.100.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah diseminasi informasi melalui media cetak	0 Terbit	0	0	130	950.000.000	0	0	0	0	0	0	130	950.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah diseminasi informasi melalui media radio	0 Tayang	0	0	5	20.000.000	12	60.000.000	0	0	0	0	17	80.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah diseminasi informasi melalui media radio	0 Tayang	0	0	12	90.000.000	0	0	0	0	0	0	12	90.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah diseminasi informasi melalui media TV	0 Tayang	0	0	0	0	12	70.000.000	0	0	0	0	12	70.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah diseminasi informasi melalui media TV	0 Tayang	0	0	12	90.000.000	0	0	0	0	0	0	12	90.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah Layanan Hubungan Media	0 Layanan	0	0	0	0	0	0	36	1.830.000.000	36	2.500.000.000	72	4.330.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		02.2.01.10.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM bidang komunikasi dan informasi	0 paket	1	230.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	230.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan/bimtek bidang komunikasi dan informasi	0 Orang	0	0	0	0	150	100.000.000	0	0	0	0	150	100.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM bidang komunikasi dan informasi	0 Kegiatan	0	0	3	400.000.000	0	0	0	0	0	0	3	400.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah peserta yang memiliki inovasi dalam websitenya dan mengikuti ajang Diskominfo Awards	0 Orang	0	0	0	0	100	60.000.000	0	0	0	0	100	60.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah wartawan yang menjadi peserta uji kompetensi wartawan dan mendapat sertifikat	0 orang	0	0	200	250.000.000	200	250.000.000	0	0	0	0	400	500.000.000		
				Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	0 Orang	0	0	0	0	0	0	400	410.000.000	400	510.000.000	800	920.000.000		
		02.2.01.11.	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Terlaksananya penanganan sengketa informasi publik di lingkup Kabupaten Cirebon	1 tahun	1	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1	350.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon	
				Terpenuhinya operasional kegiatan Komisi Informasi Kabupaten Cirebon setiap bulannya	0 Bulan	0	0	3	400.000.000	12	400.000.000	0	0	0	15	800.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
				Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	0 Persen	0	0	85	375.000.000	0	0	0	0	0	85	375.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon	
				Tersedianya jumlah Komisioner Komisi Informasi Kabupaten Cirebon	0 Komisioner	0	0	5	210.000.000	0	0	0	0	0	5	210.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
				Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	12	400.000.000	12	500.000.000	24	900.000.000		
		02.2.01.12.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah diseminasi informasi melalui media tradisional dan media interpersonal	2 media	2	470.000.000	2	470.000.000	0	0	0	0	0	4	940.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon	
				Jumlah kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Cirebon	0 Kali	0	0	3	400.000.000	8	300.000.000	0	0	0	11	700.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
				Jumlah kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Cirebon	0 Kali	0	0	6	188.000.000	0	0	0	0	0	6	188.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon	
				Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	12	300.000.000	12	500.000.000	24	800.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah			Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral	36,5 PERSEN	40	740.617.000	52,5	2.730.000.000	65	1.540.000.000	77,5	2.560.000.000	90	3.890.000.000	90	11.460.617.000		
		02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase dokumen hasil pengolahan dan analisis statistik sektoral yang dihasilkan	20 PERSEN	20	467.617.000	0	368.000.000	0	0	0	0	0	0	0	835.617.000		
				Persentase ketersediaan data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Cirebon	60 PERSEN	60	273.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273.000.000		
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	0 Persen	0	0	40	2.362.000.000	60	1.540.000.000	80	2.560.000.000	100	3.890.000.000	100	10.352.000.000		
		02.2.01.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	0 perangkat daerah	32	740.617.000	32	2.730.000.000	31	1.540.000.000	31	2.560.000.000	31	3.890.000.000	31	11.460.617.000		
		02.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Penyelenggaraan pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	1 Dok	1	99.617.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	99.617.000	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah buku statistik daerah/profil daerah	0 Dokumen	0	0	1	80.000.000	1	110.000.000	0	0	0	0	2	190.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Tersedianya buku statistik daerah/profil daerah	0 Dok	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	110.000.000	1	500.000.000	2	610.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		02.2.01.03.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Cakupan pelaksanaan koordinasi statistik sektoral	0 tahun	1	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	60.000.000	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	0 Jenis	0	0	1	40.000.000	1	200.000.000	0	0	0	0	1	240.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Persentase metadata statistik sektoral yang dibangun	0 Persen	0	0	25	150.000.000	0	0	0	0	0	0	25	150.000.000	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	3	200.000.000	3	400.000.000	6	600.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
	02.2.01.05.		Pengembangan Infrastruktur	Persentase ketersediaan data yang dikelola	60 Prosen	60	213.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	213.000.000		BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon	
				Jumlah aplikasi satu data yang dibangun dan dikembangkan	0 Aplikasi	0	0	0	1	200.000.000	1	0	1	0	3	200.000.000		BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
				Jumlah aplikasi satu data yang akan dibangun dan dikembangkan	0 Aplikasi	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	1	200.000.000		BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon	
				Jumlah elemen data pada SIPD yang sudah terisi oleh perangkat daerah	0 data	0	0	1.350	90.000.000	1.457	250.000.000	1.561	0	1.665	0	1.665	340.000.000		BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang dikelola	0 Persen	0	0	65	200.000.000	0	0	0	0	0	65	200.000.000		BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon	
				Jumlah Infrastruktur Statistik	0 Unit	0	0	0	0	0	0	2	450.000.000	2	650.000.000	4	1.100.000.000		BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
	02.2.01.06.		Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah IKM yang disusun	0 dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0 Survey	0	0	1	320.000.000	3	780.000.000	4	0	5	0	13	1.100.000.000		BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah dokumen PDRB Kec yang disusun	1 dokumen	1	368.000.000	1	368.000.000	0	0	0	0	0	2	736.000.000		BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon	
				Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	3	1.800.000.000	3	2.340.000.000	6	4.140.000.000		BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah dokumen IPM yang disusun	1 dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah dokumen SUSEDA yang disusun	0 dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Jumlah dokumen NTP yang disusun	0 dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Jumlah dokumen PDRB Kec yang disusun	0 Dokumen	0	0	1	1.182.000.000	0	0	0	0	0	0	1	1.182.000.000		
			Terwujudnya penyelenggaraan persandian	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	2 LEVEL	2	1.170.000.000	2	1.365.000.000	2	2.050.000.000	2	2.050.000.000	2	2.900.000.000	2	9.535.000.000		
		02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	0 PERSEN	6	1.170.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.170.000.000		
				Tingkat keamanan informasi pemerintah	0 Persen	56,4	0	56,6	1.365.000.000	56,8	2.050.000.000	57	2.050.000.000	57,2	2.900.000.000	57,2	8.365.000.000		
		02.2.01.	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi dan atau aplikasi persandian	0 sistem elektronik	0	0	0	0	1	1.450.000.000	1	1.450.000.000	1	2.050.000.000	1	4.950.000.000		
		02.2.01.02.	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengamanan informasi	0 paket	1	600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	600.000.000	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah dokumen kebijakan teknis persandian dalam pengamanan informasi	0 Dokumen	0	0	0	0	1	50.000.000	1	0	1	0	3	50.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah paket pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengamanan informasi	0 Paket	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah sarana prasarana operasional pengamanan informasi sesuai ketentuan	0 Paket	0	0	0	0	1	200.000.000	1	0	1	0	3	200.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0 Laporan	0	0	0	0	0	0	12	250.000.000	12	450.000.000	24	700.000.000		
		02.2.01.03.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah koordinasi bidang persandian yang terfasilitasi	0 tahun	1	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	70.000.000	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah aplikasi yang diamankan	0 Aplikasi	0	0	0	0	10	200.000.000	10	0	10	0	30	200.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah sosialisasi/bimtek melalui sertifikat elektronik	0 kegiatan	2	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	50.000.000	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah manajemen akses dan identitas yang dikelola	0 Dokumen	0	0	0	0	2	200.000.000	2	0	2	0	6	200.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi	0 Regulasi	0	0	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	1	150.000.000	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah anti malware yang disediakan	0 Paket	0	0	0	0	1	200.000.000	1	0	1	0	3	200.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	0 Laporan	0	0	0	0	0	0	12	600.000.000	12	800.000.000	24	1.400.000.000		
		02.2.01.04.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan keamanan informasi	0 layanan	1	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000.000	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah sosialisasi/bimtek dan monev sertifikasi elektronik	0 Kegiatan	0	0	1	60.000.000	13	300.000.000	13	0	13	0	40	360.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah sosialisasi dan monev sertifikasi elektronik	0 kegiatan	0	0	2	300.000.000	0	0	0	0	0	0	2	300.000.000	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi	0 Kali	0	0	80	40.000.000	120	300.000.000	120	0	120	0	440	340.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi	40 Kali	0	0	120	300.000.000	0	0	0	0	0	0	120	300.000.000	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	0 Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	0	73	600.000.000	73	800.000.000	73	1.400.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
		02.2.02.	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah titik yang diamankan pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS)	0 Titik	0	0	8	315.000.000	15	600.000.000	23	600.000.000	31	850.000.000	31	2.365.000.000			
		02.2.02.01.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi dalam menyelenggarakan jaring sandi	0 kegiatan	2	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.000.000	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon	
				Terpenuhinya pemeliharaan jaringan santel setiap bulannya	0 Bulan	0	0	3	115.000.000	12	100.000.000	12	0	12	0	39	215.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
				Jumlah paket pemeliharaan jaringan Santel	0 Bulan	0	0	12	30.000.000	0	0	0	0	0	0	12	30.000.000	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon	
				Jumlah sosialisasi dalam menyelenggarakan jaring komunikasi sandi	0 Kegiatan	0	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	0	2	0	8	200.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
				Jumlah sosialisasi dalam menyelenggarakan jaring komunikasi sandi	0 Kegiatan	0	0	2	70.000.000	0	0	0	0	0	0	2	70.000.000	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon	
				Jumlah perangkat daerah yang menggunakan jaringan fiber optik Ophc Olt (jaringan komunikasi Perangkat Daerah berstandar keamanan persandian)	0 Perangkat Daerah	0	0	0	10	400.000.000	10	0	13	0	33	400.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		
				Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	0 Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	0	73	600.000.000	73	850.000.000	73	1.450.000.000			
				Menurunnya pengaduan masyarakat terkait keberadaan menara telekomunikasi	10 PERSEN	10		0		0		0		0		10				
				Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,25 POIN	3,55	7.197.785.000	3,57	8.164.154.800	3,59	8.693.204.800	3,61	17.645.000.000	3,63	19.355.800.000	3,63	61.055.944.600		
		01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	75 PERSEN	80	1.536.700.000	85	1.621.504.800	90	1.888.704.800	95	5.495.000.000	100	5.735.000.000	100	16.276.909.600			
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	75 PERSEN	80	881.000.000	85	1.585.650.000	90	1.363.500.000	95	6.334.000.000	100	7.245.800.000	100	17.409.950.000			
				Terpenuhinya peningkatan disiplin aparaturnya dalam berpakaian dinas	75 PERSEN	0	53.000.000	100	53.000.000	100	58.000.000	100	65.000.000	100	100.000.000	100	329.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100 PERSEN	100	4.682.085.000	100	4.859.000.000	100	5.333.000.000	100	5.531.000.000	100	5.895.000.000	100	26.300.085.000		
				Persentase dokumen perencanaan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 PERSEN	100	45.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	100	220.000.000	100	380.000.000	100	740.000.000		
		01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang dibuat dalam satu tahun	0 Dokumen	12	120.000.000	14	120.000.000	15	150.000.000	16	220.000.000	17	380.000.000	74	990.000.000		
		01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	2 dokumen	2	45.000.000	2	45.000.000	2	50.000.000	0	0	0	0	6	140.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	4	100.000.000	5	180.000.000	9	280.000.000		
		01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	9 dokumen	10	75.000.000	12	75.000.000	13	100.000.000	0	0	0	0	35	250.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0	0	0	0	0	0	12	120.000.000	12	200.000.000	24	320.000.000		
		01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan keuangan daerah yang dibuat dalam satu tahun	0 Dokumen	14	4.607.085.000	14	4.784.000.000	14	5.233.000.000	14	5.531.000.000	14	5.895.000.000	70	26.050.085.000		
		01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan	0 Pegawai	23	4.561.085.000	23	4.738.000.000	29	5.128.000.000	0	0	0	0	29	14.427.085.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Kabupaten Cirebon
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	0	0	0	0	0	0	30	5.331.000.000	30	5.545.000.000	30	10.876.000.000		
		01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	1	13.000.000	1	13.000.000	1	50.000.000	0	0	0	0	3	76.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000	1	150.000.000	2	250.000.000		
		01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	13 dokumen	13	33.000.000	13	33.000.000	13	55.000.000	0	0	0	0	39	121.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0	0	0	0	0	0	13	100.000.000	13	200.000.000	26	300.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis pakaian dinas/ pakaian khusus hari-hari tertentu beserta kelengkapannya yang disediakan	0 Jenis	1	53.000.000	1	53.000.000	1	58.000.000	1	65.000.000	1	100.000.000	5	329.000.000		
		01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas / pakaian khusus hari-hari tertentu beserta kelengkapannya	59 stel	60	53.000.000	60	53.000.000	60	58.000.000	0	0	0	0	60	164.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	0	0	0	0	0	1	65.000.000	1	100.000.000	2	165.000.000		
		01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah yang disediakan	0 Layanan	9	721.700.000	9	763.700.000	9	810.900.000	9	5.045.000.000	9	5.235.000.000	45	12.576.300.000		
		01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	1 jenis	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah lampu yang disediakan	0 buah	0	0	100	10.000.000	100	10.000.000	0	0	0	0	200	20.000.000		
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	0	0	0	0	0	4	10.000.000	4	20.000.000	8	30.000.000		
		01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	24 jenis	4	300.000.000	24	300.000.000	24	300.000.000	0	0	0	0	52	900.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	0	0	0	0	0	24	4.500.000.000	24	4.600.000.000	48	9.100.000.000		
		01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	2 jenis	3	25.000.000	1	18.500.000	5	18.500.000	0	0	0	0	5	62.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Tersedianya bahan bakar untuk genset setiap bulannya	0 liter	0	0	331,2	4.000.000	331,2	4.000.000	0	0	0	0	662,4	8.000.000		
				Tersedianya isi ulang tabung gas	0 Tabung	0	0	12	2.500.000	12	2.500.000	0	0	0	0	24	5.000.000		
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0	0	0	0	0	0	25	25.000.000	25	35.000.000	50	60.000.000		
		01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya jumlah makanan dan minuman rapat pegawai	0 dus	0	0	800	8.000.000	800	8.000.000	0	0	0	0	1.600	16.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	0	0	0	0	0	12	8.000.000	12	10.000.000	24	18.000.000		
		01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	15 jenis	12	19.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.700.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Tersedianya paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan setiap bulan	0 paket	0	0	12	19.700.000	12	19.900.000	0	0	0	0	24	39.600.000		
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0	0	0	0	0	0	12	20.000.000	12	30.000.000	24	50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 jenis	3	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon	
				Tersedianya bahan bacaan koran lokal dan nasional	0 Eksemplar	0	0	5.280	36.000.000	5.280	36.000.000	0	0	0	10.560	72.000.000			
				Jumlah penyediaan jasa publikasi melalui surat kabar	0 publikasi	0	0	0	5	20.000.000	0	0	0	0	5	20.000.000			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0	0	0	0	0	16	60.000.000	16	75.000.000	32	135.000.000			
		01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK yang disediakan	38 jenis	32	54.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	54.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon	
				Tersedianya paket Alat Tulis Kantor setiap bulan	0 paket	0	0	12	57.000.000	12	59.000.000	0	0	0	24	116.000.000			
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0	0	0	0	0	12	62.000.000	12	75.000.000	24	137.000.000			
		01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya jumlah makanan dan minuman tamu	766 dus	1.300	13.000.000	800	8.000.000	800	8.000.000	0	0	0	2.900	29.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon	
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0	0	0	0	0	12	10.000.000	12	15.000.000	24	25.000.000			
		01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	0 Laporan	140	275.000.000	160	300.000.000	180	325.000.000	0	0	0	480	900.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0	0	0	0	0	200	350.000.000	220	375.000.000	420	725.000.000			
		01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan yang disediakan	0 Jenis	2	536.000.000	2	690.000.000	2	970.000.000	2	1.200.000.000	2	1.725.000.000	10	5.121.000.000		
		01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional yang disediakan	1 Unit	1	350.000.000	2	500.000.000	3	775.000.000	0	0	0	6	1.625.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon	
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	0	0	0	0	5	1.000.000.000	3	1.500.000.000	8	2.500.000.000			
		01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang disediakan	5 jenis	7	186.000.000	8	190.000.000	8	195.000.000	0	0	0	23	571.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0	0	0	0	0	15	200.000.000	15	225.000.000	30	425.000.000			
		01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan yang disediakan	0 Jenis	6	815.000.000	6	857.804.800	6	1.077.804.800	6	980.000.000	6	1.250.000.000	30	4.980.609.600		
		01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa layanan telekomunikasi, air, listrik selama 1 tahun	4 jenis	3	375.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	375.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon	
				Jumlah jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik selama 1 tahun	0 Tagihan	0	0	36	380.000.000	36	400.000.000	0	0	0	72	780.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0	0	0	0	0	0	36	450.000.000	36	500.000.000	72	950.000.000		
	01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor (pramu kantor/operator komputer) setiap bulannya	12 orang	4	5.000.000	4	97.804.800	4	97.804.800	0	0	0	0	4	200.609.600	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kab Cirebon
				Tersedianya jumlah petugas jasa keamanan dan ketertiban kantor tiap bulan	3 orang	3	180.000.000	3	190.000.000	3	290.000.000	0	0	0	0	3	660.000.000		
				Jumlah luasan kantor yang dibersihkan	1.896 M2	1.896	180.000.000	1.896	190.000.000	1.896	290.000.000	0	0	0	0	1.896	660.000.000		
				Jumlah gedung kantor yang dipelihara	0 Gedung	3	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3	75.000.000		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0	0	0	0	0	0	36	530.000.000	36	750.000.000	72	1.280.000.000		
	01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis sarana dan prasarana yang dipelihara	0 Jenis	8	345.000.000	8	895.650.000	8	393.500.000	8	4.604.000.000	8	4.770.800.000	40	11.008.950.000		
	01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas roda dua dan roda empat yang diberikan bahan bakar	100 Unit	15	100.000.000	15	100.000.000	16	100.000.000	0	0	0	0	16	300.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	0 Unit	0	0	0	0	16	50.000.000	0	0	0	0	16	50.000.000		
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0	0	0	0	0	0	16	150.000.000	16	200.000.000	16	350.000.000		
	01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus perizinannya	21 Unit	22	13.000.000	22	13.650.000	23	14.500.000	0	0	0	0	67	41.150.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0	0	0	0	0	0	23	20.000.000	24	25.800.000	47	45.800.000		
	01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	4 Jenis	5	32.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5	32.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kab Cirebon
				Jumlah pemeliharaan AC	0 kali	0	0	15	13.000.000	20	14.000.000	0	0	0	0	35	27.000.000		
				Jumlah pemeliharaan komputer	0 kali	0	0	15	8.000.000	15	8.000.000	0	0	0	0	30	16.000.000		
				Jumlah pemeliharaan printer	0 kali	0	0	10	7.000.000	10	8.000.000	0	0	0	0	20	15.000.000		
				Jumlah pemeliharaan kamera	0 kali	0	0	2	2.000.000	2	2.000.000	0	0	0	0	4	4.000.000		
				Jumlah pemeliharaan scanner	0 kali	0	0	2	2.000.000	2	2.000.000	0	0	0	0	4	4.000.000		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0	0	0	0	0	0	50	34.000.000	50	45.000.000	100	79.000.000		
	01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor yang diperbaiki	1 Paket	1	200.000.000	1	750.000.000	1	195.000.000	0	0	0	0	3	1.145.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	0	0	0	0	0	2	4.400.000.000	2	4.500.000.000	4	8.900.000.000		
TOTAL PENDANAAN						26.368.402.000	40.508.154.800	44.829.004.800	125.758.000.000	133.388.800.000	370.852.361.600								

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NANAN ABDUL MANAN, S.STP., M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19800703 199810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Sunan Drajat No.15 Telp. (0231) 8330580

Website : www.diskominfo.cirebonkab.go.id

e-mail : diskominfo@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 840/Kep.47-sekret/2022

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa penetapan IKU harus sejalan dengan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon yang telah dilakukan *Focus Group Discussion* di Internal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon yang kemudian diasistensi, direview dan dievaluasi oleh Bidang-Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembar Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D. 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022**

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

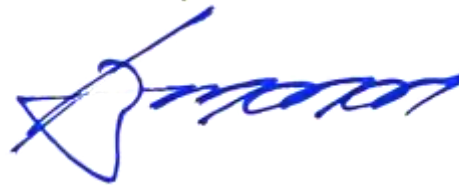
KEDUA : Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang ingin dicapai dengan standar rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

- KEEMPAT : Isi dan uraian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 18 Januari 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIREBON**



NANAN ABDUL MANAN, S.STP., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19800703 199810 1 001

Tabel Indikator Kinerja Utama Tahun 2022
Dinas dan Informatika Kabupaten Cirebon Komunikasi

No	Sasaran/Outcome/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Indeks Domain Tata Kelola	Bidang Teknologi Informatika	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Peta kondisi penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi • Formulasi Pengukuran: $= \frac{\sum \text{jawaban} \times \text{bobot}}{\sum \text{pertanyaan}}$ • Jenis Data: Non Kumulatif • Sumber Data: Hasil <i>self assessment</i> dan observasi dari Kemenpan RB
2	Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Mewujudkan pemerintah Kabupaten Cirebon menuju informatif • Formulasi Pengukuran: $= \frac{(\text{Verifikasi SAQ} + \text{VLA} + \text{Visitasi})}{\text{Total Komponen}}$ SAQ = Self Assessment Quesioner VLA = Verifikasi Lanjutan Acak • Jenis Data: Non Kumulatif • Sumber Data: Hasil <i>self assessment</i> dan observasi dari Komisi Informasi
3	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Bidang Statistik, Persandian dan E-Government	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Urusan Pemerintahan statistik sektoral pada pemerintahan Kabupaten Cirebon selain bertanggungjawab pada ketersediaan data statistik sektoral harus juga termanfaatkan • Formulasi Pengukuran: $= \frac{(\% \text{ dokumen yang dihasilkan} + \% \text{ keterisian data SIPD})}{\text{Total Komponen}} \times 100\%$ • Jenis Data: Non Kumulatif • Sumber Data: Hasil pengolahan data

No	Sasaran/Outcome/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data
4	Terwujudnya penyelenggaraan persandian	Indeks KAMI	Bidang Statistik, Persandian dan E-Government	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Alat evaluasi untuk menganalisis tingkat kematangan penerapan keamanan informasi di sebuah organisasi berdasarkan kriteria pada SNI ISO/IEC 27001:2013 • Formulasi pengukuran: $= \frac{\sum \text{jawaban} \times \text{bobot}}{\sum \text{pertanyaan}}$ • Jenis Data: Non Kumulatif • Sumber Data: Hasil <i>assessment</i> berdasarkan pedoman/instrumen <i>assessment</i> keamanan informasi
5	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Indeks kepuasan masyarakat	Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon • Formulasi pengukuran: $= \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ • Jenis Data: Non Kumulatif • Sumber Data: Hasil survey internal terhadap layanan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon**

NANAN ABDUL MANAN, S.STP., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19800703 199810 1 001

Tabel Target Kinerja Tahun 2022
Dinas dan Informatika Kabupaten Cirebon Komunikasi

No	Sasaran/Outcome/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Indeks Domain Tata Kelola	POIN	2.77
2	Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	POIN	45
3	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral	PERSEN	65
4	Terwujudnya penyelenggaraan persandian	Indeks KAMI	LEVEL	2
5	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Indeks kepuasan masyarakat	POIN	3.59

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon**



NANAN ABDUL MANAN, S.STP., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19800703 199810 1 001

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SASARAN STRATEGIS : KESATU

SASARAN STRATEGI														
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi														
INDIKATOR KINERJA		TARGET												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Indeks Domain Tata Kelola SPBE														2,77 poin
NO	AKSI/STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Peningkatan ketersediaan infrastruktur TIK dan aplikasi yang terintegrasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

OUTPUT/ KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)													
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota															
Jumlah layanan domain utama yang diperpanjang layanannya			Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	√													
Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas, terpenuhinya pemeliharaan Fiber Optik dan router wireless yang difasilitasi Dinas Kominfo, Jumlah peralatan dan perlengkapan suku cadang fiber optik WAN yang dibelanjakan			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota															
Jumlah dokumen perencanaan e-governmen			Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						√						√	√	

OUTPUT/ KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Presentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan dan menyimpan data di pusat data pemerintah, Jumlah pemeliharaan NOC, Jumlah peralatan dan perlengkapan suku cadang NOC yang dibelanjakan			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Jumlah aplikasi yang dikembangkan dan dipelihara dalam meningkatkan komunikasi berbasis elektronik pemerintah daerah			Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Jumlah aplikasi yang mendukung smart city			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik				√	√	√					√	√
Jumlah aplikasi yang dibangun dan dikembangkan dalam mendukung pemerintahan berbasis elektronik			Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Jumlah peserta seminar dalam rangka mendukung implementasi smart city			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas			√		√							

Sumber, November 2022
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon

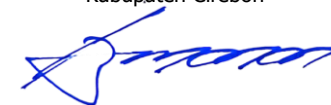


NANAN ABDUL MANAN, S.STP., M.Si

Pembina Tk I
NIP. 19800703 199810 1 001

OUTPUT/ KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Jumlah diseminasi informasi melalui media cetak dan radio			Layanan Hubungan Media	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Jumlah wartawan yang menjadi peserta uji kompetensi wartawan dan mendapat sertifikat			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik							√					
Terpenuhinya operasional kegiatan Komisi Informasi Kabupaten Cirebon setiap bulannya			Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Jumlah kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Cirebon			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas						√						

Sumber, November 2022
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon



NANAN ABDUL MANAN, S.STP., M.Si

Pembina Tk I
NIP. 19800703 199810 1 001

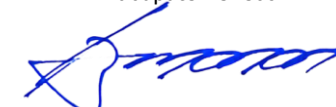
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SASARAN STRATEGIS : KETIGA

SASARAN STRATEGI													
Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah													
INDIKATOR KINERJA		TARGET											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral													65%
NO	AKSI/STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang tervalidasi dan terverifikasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

OUTPUT/ KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota													
Jumlah buku statistik daerah/profil daerah			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral			√									
Jumlah kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral			Membangun Metadata Statistik Sektoral			√		√	√	√	√	√			
Jumlah aplikasi satu data yang akan dibangun dan dikembangkan dan jumlah elemen data pada SIPD yang sudah terisi oleh perangkat daerah			Pengembangan Infrastruktur		√			√		√		√	√		
Jumlah survei statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS			Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah										√		

Sumber, November 2022
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon



NANAN ABDUL MANAN, S.STP., M.Si

Pembina Tk I
NIP. 19800703 199810 1 001

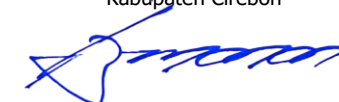
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SASARAN STRATEGIS : KEEMPAT

SASARAN STRATEGI														
Terwujudnya penyelenggaraan persandian														
INDIKATOR KINERJA		TARGET												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Indeks Keamanan Informasi (KAMI)														Level II
NO	AKSI/STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Meningkatkan pembinaan keamanan informasi dan persandian daerah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

OUTPUT/ KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
Jumlah sosialisasi/bimtek dan monev sertifikasi elektronik serta jumlah pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi		Jumlah sosialisasi dan monev sertifikasi elektronik dan Jumlah pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	√	√					√	√	√	√	√	
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota													
Terpenuhinya pemeliharaan jaringan santel, dan jumlah sosialisasi dalam menyelenggarakan jaring komunikasi sandi			Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							√	√				

Sumber, November 2022
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon

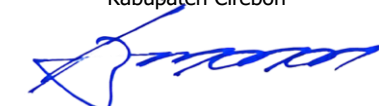


NANAN ABDUL MANAN, S.STP., M.Si

Pembina Tk I
NIP. 19800703 199810 1 001

NO	AKSI/STRATEGI			JADWAL PELAKSANAAN											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor, tersedianya jumlah petugas jasa keamanan dan ketertiban kantor serta jumlah luasan kantor yang dipelihara			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Jumlah kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 yang diberikan bahan bakar			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus perijinannya			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	√	√	√	√	√	√		√		√	√	
Jumlah pemeliharaan AC, komputer, printer			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		√		√		√		√		√		

Sumber, November 2022
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon



NANAN ABDUL MANAN, S.STP., M.Si

Pembina Tk I
NIP. 19800703 199810 1 001

LAPORAN FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN BULAN DESEMBER 2022
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BIAYA	SUMBER DANA	VOLUME	LOKASI	REALISASI KEUANGAN		SISA DALAM DPA		REALISASI FISIK	KET.
							(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	48.030.400,00	PUD	12 bln	DISKOMINFO	48.022.000,00	99,98%	8.400,00	0,02%	99,98%	
		2 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	53.350.000,00	PUD	12 bln	DISKOMINFO	53.350.000,00	100,00%	-	0,00%	100,00%	
		3 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	150.635.800,00	PUD	12 bln	DISKOMINFO	150.448.954,00	99,88%	186.846,00	0,12%	99,88%	
		4 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	211.603.300,00	PUD	12 bln	DISKOMINFO	211.053.300,00	99,74%	550.000,00	0,26%	99,74%	
		5 Pelayanan Informasi Publik	616.894.700,00	PUD	12 bln	DISKOMINFO	616.614.894,00	99,95%	279.806,00	0,05%	99,95%	
		6 Layanan Hubungan Media	1.220.935.900,00	PUD	12 bln	DISKOMINFO	1.220.935.900,00	100,00%	-	0,00%	100,00%	
		7 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	228.603.800,00	PUD	12 bln	DISKOMINFO	219.584.800,00	96,05%	9.019.000,00	3,95%	96,05%	
		8 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	253.665.000,00	PUD	12 bln	DISKOMINFO	253.621.680,00	99,98%	43.320,00	0,02%	99,98%	
		9 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	109.685.000,00	PUD	12 bln	DISKOMINFO	107.918.000,00	98,39%	1.767.000,00	1,61%	98,39%	
02.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.800.000,00	PUD	12 bln	DISKOMINFO	19.800.000,00	100,00%	-	0,00%	100,00%	
		2 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.885.721.904,00	PUD	12 bln	DISKOMINFO	2.882.453.120,00	99,89%	3.268.784,00	0,11%	99,89%	
		1 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	119.024.300,00	PUD	12 bln	DISKOMINFO	119.024.300,00	100,00%	-	0,00%	100,00%	

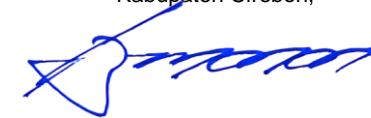
NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BIAYA	SUMBER DANA	VOLUME	LOKASI	REALISASI KEUANGAN		SISA DALAM DPA		REALISASI FISIK	KET.
							(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	716.442.220,00	PUD	12 bln	DISKOMINFO	714.981.110,00	99,80%	1.461.110,00	0,20%	99,80%	
		3 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	67.116.450,00	PUD	12 bln	DISKOMINFO	67.112.130,00	99,99%	4.320,00	0,01%	99,99%	
		4 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	202.748.000,00	PUD	12 bln	DISKOMINFO	202.743.680,00	100,00%	4.320,00	0,00%	100,00%	
		5 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	295.666.800,00	PUD	12 bln	DISKOMINFO	293.469.553,00	99,26%	2.197.247,00	0,74%	99,26%	
		6 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	63.267.050,00	PUD	12 bln	DISKOMINFO	63.128.908,00	99,78%	138.142,00	0,22%	99,78%	
03	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL											
	- Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota											
		1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	17.744.150,00	PUD	12 bln	DISKOMINFO	17.622.300,00	99,31%	121.850,00	0,69%	99,31%	
		2 Membangun Metadata Statistik Sektoral	14.700.000,00	PUD	12 bln	DISKOMINFO	14.700.000,00	100,00%	-	0,00%	100,00%	
		3 Pengembangan Infrastruktur	114.576.000,00	PUD	12 bln	DISKOMINFO	114.560.011,00	99,99%	15.989,00	0,01%	99,99%	
		4 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	172.589.500,00	PUD	12 bln	DISKOMINFO	172.051.000,00	99,69%	538.500,00	0,31%	99,69%	
04	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI											
	- Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											
		1 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	175.146.200,00	PUD	12 bln	DISKOMINFO	175.137.560,00	100,00%	8.640,00	0,00%	100,00%	
	- Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota											
		1 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20.737.850,00	PUD	12 bln	DISKOMINFO	20.737.850,00	100,00%	-	0,00%	100,00%	
05	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.946.400,00	PUD	12 bln	DISKOMINFO	43.946.400,00	100,00%	-	0,00%	100,00%	
		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48.499.450,00	PUD	12 bln	DISKOMINFO	48.499.450,00	100,00%	-	0,00%	100,00%	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BIAYA	SUMBER DANA	VOLUME	LOKASI	REALISASI KEUANGAN		SISA DALAM DPA		REALISASI FISIK	KET.
							(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.683.999.700,00	PUD	12 bln	DISKOMINFO	4.332.907.939,00	92,50%	351.091.761,00	7,50%	92,50%	
		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.999.900,00	PUD	12 bln	DISKOMINFO	12.999.900,00	100,00%	-	0,00%	100,00%	
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	33.999.900,00	PUD	12 bln	DISKOMINFO	33.999.900,00	100,00%	-	0,00%	100,00%	
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	38.529.345,00	PUD	12 bln	DISKOMINFO	38.529.345,00	100,00%	-	0,00%	100,00%	
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.385.000,00	PUD	12 bln	DISKOMINFO	2.385.000,00	100,00%	-	0,00%	100,00%	
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.821.920,00	PUD	12 bln	DISKOMINFO	88.821.920,00	100,00%	-	0,00%	100,00%	
		3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.693.400,00	PUD	12 bln	DISKOMINFO	2.693.400,00	100,00%	-	0,00%	100,00%	
		4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.500.000,00	PUD	12 bln	DISKOMINFO	1.500.000,00	100,00%	-	0,00%	100,00%	
		5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.266.500,00	PUD	12 bln	DISKOMINFO	14.266.500,00	100,00%	-	0,00%	100,00%	
		6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.958.000,00	PUD	12 bln	DISKOMINFO	25.138.189,00	93,25%	1.819.811,00	6,75%	93,25%	
		7 Penyediaan Bahan/Material	50.010.200,00	PUD	12 bln	DISKOMINFO	50.010.200,00	100,00%	-	0,00%	100,00%	
		8 Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.500.000,00	PUD	12 bln	DISKOMINFO	1.500.000,00	100,00%	-	0,00%	100,00%	
		9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.756.850,00	PUD	12 bln	DISKOMINFO	41.756.850,00	100,00%	-	0,00%	100,00%	
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	349.348.352,00	PUD	12 bln	DISKOMINFO	328.933.310,00	94,16%	20.415.042,00	5,84%	94,16%	
		2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	438.229.800,00	PUD	12 bln	DISKOMINFO	437.115.423,00	99,75%	1.114.377,00	0,25%	99,75%	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BIAYA	SUMBER DANA	VOLUME	LOKASI	REALISASI KEUANGAN		SISA DALAM DPA		REALISASI FISIK	KET.
							(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77.380.000,00	PUD	12 bln	DISKOMINFO	76.750.000,00	99,19%	630.000,00	0,81%	99,19%	
		2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.302.000,00	PUD	12 bln	DISKOMINFO	5.605.900,00	49,60%	5.696.100,00	50,40%	49,60%	
		3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.840.000,00	PUD	12 bln	DISKOMINFO	15.840.000,00	100,00%	-	0,00%	100,00%	
JUMLAH			13.762.651.041,00				13.362.270.676,00	97,09%	400.380.365,00	2,91%	97,09%	

Sumber, 31 Desember 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon,



NANAN ABDUL MANAN, S.STP., M.Si.
Pembina Tk. I

NIP. 19800703 199810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Sunan Drajat No.15 Telp. (0231) 8330580

Website : www.diskominfo.cirebonkab.go.id

e-mail : diskominfo@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 103/Kep. 42-Sekret/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA KOMUNIKASI DAN
INFOMATIKA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Paragraf 1 Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
13. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.36-Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2022, sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Tim tersebut bertugas :
1. Menghimpun data sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2022;
 2. Mengelola dan menyusun data tersebut dalam bentuk Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
 3. Menyampaikan hasil penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : Sumber
pada tanggal : 16 Januari 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIREBON,**



NANAN ABDUL MANAN, S.STP., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19800703 199810 1 001

**DAFTAR SUSUNAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA KOMUNIKASI DAN
INFOMATIKA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022**

Pelindung/ Penasehat : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon
Penanggung Jawab : Plt. Sekretaris Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Cirebon
Ketua Tim : Ahmad Samsudin, S.Sos
Sekretaris : Cucu Perisa, S.Sos
Anggota : 1. Achmad Tauhid, SE
2. Sri Rahayu
3. Tomi Hartono

Ditetapkan di : Sumber
pada tanggal : 16 Januari 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIREBON,**



NANAN ABDUL MANAN, S.STP., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19800703 199810 1 001



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



2022

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN

PEMERINTAH KAB. CIREBON

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2022 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil pemantauan dan evaluasi SPBE tahun 2022 dapat menggambarkan penerapan tata kelola SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPBE yang terpadu. Selain itu, pemantauan dan evaluasi SPBE juga diharapkan dapat berdampak pada terciptanya layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah. Berkat adanya kerja sama dan sinergi yang baik tersebut, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE tahun 2022 dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Jakarta, 31 Januari 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata

Laksana

NIP. 197208081996032001

PEMANTAUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2022

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2022, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE yang dilakukan pada tahun 2022 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Pemantauan ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian Pemantauan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri dan penilaian dokumen.

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses	Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi Teknis
1. Rintisan Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan proses tata kelola dilaksanakan secara <i>ad-hoc</i> .	1. Informasi Layanan SPBE dalam bentuk satu arah
2. Terkelola Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi	2. Interaksi Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah
3. Terstandarisasi Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi	3. Transaksi Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan
4. Terintegrasi dan Terukur Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif	4. Kolaborasi Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan lain
5. Optimum Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas	5. Optimalisasi Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal

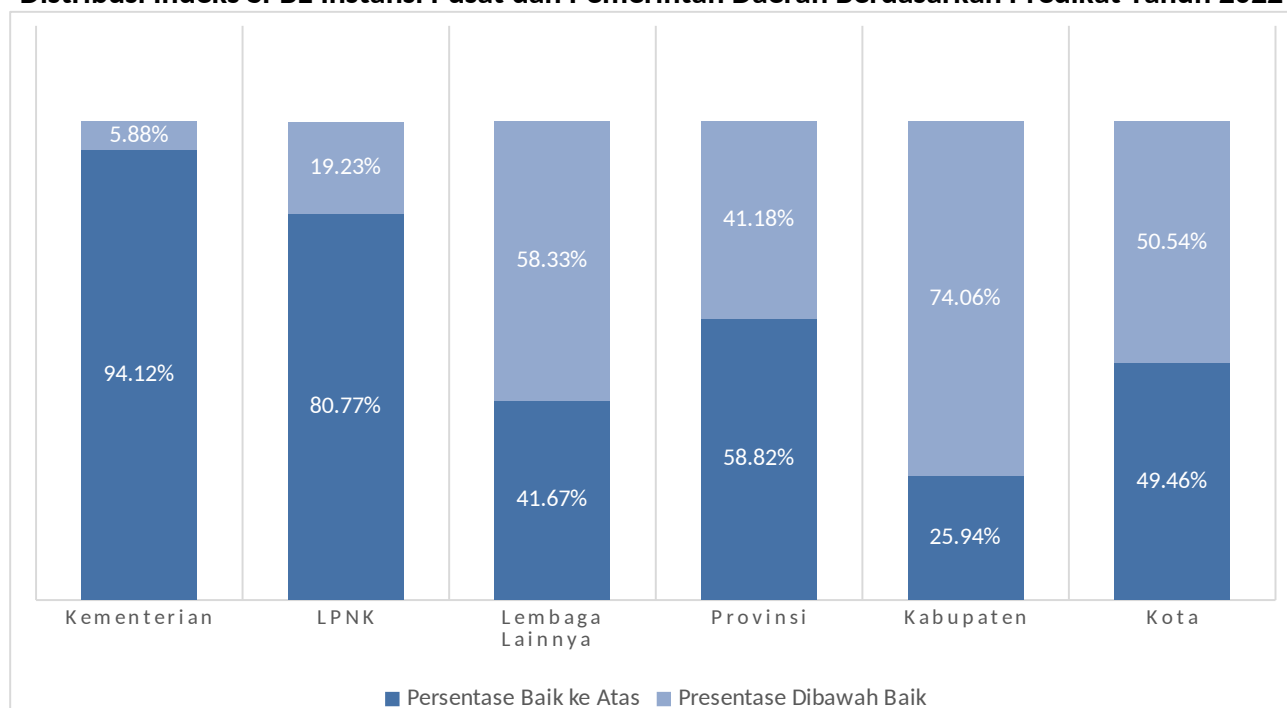
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2022

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 - 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 - < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 - < 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 - < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 - 5,0	Memuaskan	2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 - < 3,5	Baik *)	4	1,8 - < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang		
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																			
1	4,2 - 5,0		Memuaskan																			
2	3,5 - < 4,2		Sangat Baik																			
3	2,6 - < 3,5		Baik *)																			
4	1,8 - < 2,6	Cukup																				
5	< 1,8	Kurang																				
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																					
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																					
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																					
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																					

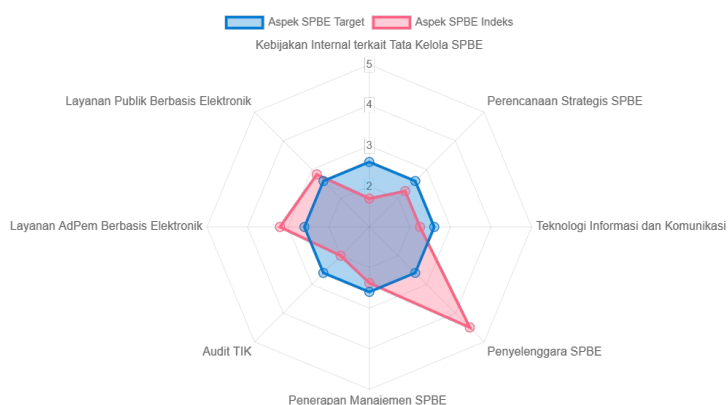
*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,35	3,14	2,92	2,33	2,74	2,17	2,50
Domain Kebijakan	2,39	3,08	2,88	2,39	2,69	2,23	2,61
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,39	3,08	2,88	2,39	2,69	2,23	2,61
Domain Tata Kelola	1,85	2,86	2,59	1,94	2,27	1,64	1,98
Perencanaan Strategis	1,70	2,63	2,33	1,90	2,00	1,53	1,70
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,92	2,93	2,77	2,04	2,40	1,68	2,11
Penyelenggaraan SPBE	2,02	3,16	2,75	1,83	2,57	1,78	2,28
Domain Manajemen	1,32	2,01	1,64	1,36	1,51	1,21	1,36
Penerapan Manajemen SPBE	1,35	2,14	1,62	1,37	1,55	1,23	1,41
Audit TIK	1,24	1,66	1,69	1,34	1,38	1,15	1,23
Domain Layanan SPBE	2,97	3,72	3,58	2,86	3,45	2,79	3,18
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,03	3,71	3,58	3,07	3,46	2,85	3,23
Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,89	3,74	3,58	2,55	3,44	2,71	3,09

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2022



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2022
SPBE	2,66
Domain Kebijakan SPBE	1,70
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	1,70
Domain Tata Kelola SPBE	2,70
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	2,25
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	2,25
<i>Penyelenggara SPBE</i>	4,50
Domain Manajemen SPBE	2,27
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	2,38
<i>Audit TIK</i>	2,00
Domain Layanan SPBE	3,05
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	3,20
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	2,83

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2021	Nilai Tingkat Kematangan 2022
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	2	4
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	2	1
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	2	1
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	2	1
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3	1
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	3	1
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem	3	2
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan	2	2
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	2	2
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	1	2
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	2
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2	2
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	3	2
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1	3
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3	2
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	1	2
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	3	3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	1	2
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1	5
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3	4
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1	2
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1	3
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1	3
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1	2
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1	3
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1	2
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1	2
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1	2
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1	2
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1	2
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	1	3
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	1	3
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	1	3
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	1	3
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	3	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara /	3	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	1	2
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4	4
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4	3
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	3	2
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	1	3
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	2	3

45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	1	3
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	1	3
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3	3



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN
KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT
Nomor 7 Tahun 2022**

Tentang

**HASIL MONITORING, EVALUASI, DAN PEMERINGKATAN PENERAPAN KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK DI JAWA BARAT TAHUN 2022**

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang:

- a. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya menetapkan standar petunjuk teknis standar layanan informasi publik;
- b. Bahwa sebagai bentuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik diperlukan kualifikasi yang dijadikan tolak ukur;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tentang Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pemerinkkatan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Di Jawa Barat Tahun 2022.

Mengingat:

- a. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Memperhatikan:

Hasil Rapat Verifikasi Akhir MONEV dan Pemeringkatan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik di Jawa Barat Tahun 2022 bersama Tim Penilai Independen MONEV 2021 tanggal 5 Oktober 2022 dan Rapat Pleno Komisioner terkait Pemeringkatan Badan Publik Tahun 2022 tanggal 16 November 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pemeringkatan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Jawa Barat Tahun 2022.
- KEDUA** : Bahwa hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pemeringkatan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat Tahun 2022 dengan berdasarkan kualifikasi per Kategori Badan Publik sebagaimana tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Bahwa hasil keputusan ini sepenuhnya merupakan kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan tidak dapat diganggu gugat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 30 November 2022

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Ketua,



Ijang Faisal

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 7
TAHUN : 2022
**TENTANG : HASIL MONITORING, EVALUASI, DAN PEMERINGKATAN
PENERAPAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA
BADAN PUBLIK DI JAWA BARAT TAHUN 2022**

A. Kategori Badan Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota yang Informatif

1. Pemerintah Kabupaten Bandung
2. Pemerintah Kota Cirebon
3. Pemerintah Kabupaten Sumedang
4. Pemerintah Kota Tasikmalaya
5. Pemerintah Kota Bekasi
6. Pemerintah Kota Bandung
7. Pemerintah Kabupaten Purwakarta
8. Pemerintah Kota Depok
9. Pemerintah Kabupaten Kuningan
10. Pemerintah Kabupaten Cirebon
11. Pemerintah Kabupaten Bogor
12. Pemerintah Kabupaten Pangandaran
13. Pemerintah Kabupaten Karawang

B. Kategori Badan Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota yang Menuju Informatif

1. Pemerintah Kota Bogor

Kategori Badan Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota yang Cukup Informatif

1. Pemerintah Kabupaten Subang
2. Pemerintah Kota Banjar
3. Pemerintah Kota Cimahi
4. Pemerintah Kota Sukabumi
5. Pemerintah Kabupaten Garut
6. Pemerintah Kabupaten Majalengka
7. Pemerintah Kabupaten Ciamis

C. Kategori Badan Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota yang Kurang Informatif

1. Pemerintah Kabupaten Sukabumi
2. Pemerintah Kabupaten Bekasi
3. Pemerintah Kabupaten Indramayu
4. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

D. Kategori Badan Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota yang Tidak Informatif

1. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
2. Pemerintah Kabupaten Cianjur

E. Kategori Badan Publik Partai Politik Tingkat Jawa Barat yang Informatif

1. DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Jawa Barat
2. DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jawa Barat
3. DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Jawa Barat
4. DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat
5. DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat
6. DPW Partai Nasioanl Demokrat (Nasdem) Jawa Barat
7. DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat
8. DPD Partai Demokrat Jawa Barat
9. DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat
10. DPW Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Jawa Barat

F. Kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang Informatif

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
3. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
5. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat
7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat
8. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
9. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
12. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat
13. Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat
14. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat
15. Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
16. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
17. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat

G. Kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang Menuju Informatif

1. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat
4. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
5. Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat
6. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

H. Kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang Cukup Informatif

1. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat
2. Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat
3. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat
7. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat
8. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat

I. Kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang Kurang Informatif

1. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat
2. Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat
4. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat

J. Kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang Tidak Informatif

1. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat
2. Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat
3. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat

K. Kategori Badan Publik BUMD Yang Informatif NOL/ BELUM ADA

L. Kategori Badan Publik BUMD Yang Menuju Informatif NOL/ BELUM ADA

M. Kategori Badan Publik BUMD Yang Cukup Informatif

1. PT. Jasa dan Kepariwisata (Jaswita) Jawa Barat
2. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB)

N. Kategori Badan Publik BUMD Yang Kurang Informatif

1. PT. Jasa Sarana
2. PT. Jamkrida Jabar

O. Kategori Badan Publik BUMD Yang Tidak Informatif

1. PT Tirta Gemah Ripah
2. PT. Agro Jabar
3. PT. Agronesia
4. PT. Migas Hulu Jabar
5. PT. Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB)
6. PD. Agribisnis dan Pertambangan
7. PT. Migas Hilir Jabar

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Ketua,



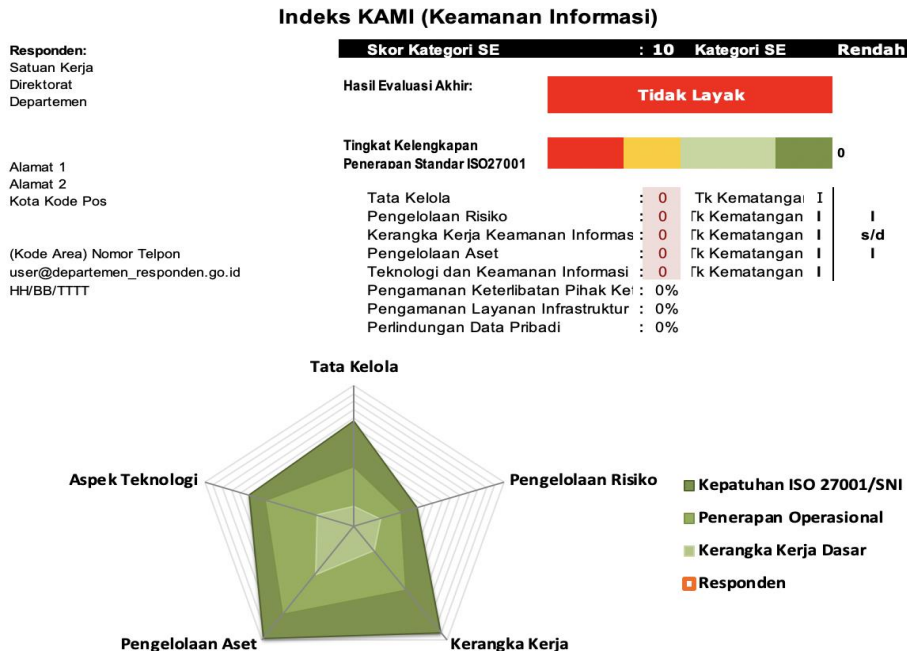
Ijang Faisal

Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)

Versi 4.1, November 2019



Mengenai Indeks KAMI



Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi. Alat evaluasi ini tidak ditujukan untuk menganalisa kelayakan atau efektifitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan Instansi/Perusahaan. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai area yang menjadi target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar ISO/IEC 27001:2013.

Bentuk evaluasi yang diterapkan dalam indeks KAMI dirancang untuk dapat digunakan oleh suatu organisasi dari berbagai tingkatan, ukuran, maupun tingkat kepentingan penggunaan TIK dalam mendukung terlaksananya proses yang ada. Data yang digunakan dalam evaluasi ini nantinya akan memberikan *snapshot* indeks kesiapan - dari aspek kelengkapan maupun kematangan - kerangka kerja keamanan informasi yang diterapkan dan dapat digunakan sebagai pembandingan dalam rangka menyusun langkah perbaikan dan penetapan prioritasnya.

Alat evaluasi ini kemudian bisa digunakan secara berkala untuk mendapatkan gambaran perubahan kondisi keamanan informasi sebagai hasil dari program kerja yang dijalankan, sekaligus sebagai sarana untuk menyampaikan peningkatan kesiapan kepada pihak yang terkait (*stakeholders*).

Khusus untuk Instansi Pemerintah, penggunaan dan publikasi hasil evaluasi Indeks KAMI merupakan bentuk tanggungjawab penggunaan dana publik sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran mengenai kebutuhan keamanan informasi. Pertukaran informasi dan diskusi dengan Instansi pemerintah lainnya sebagai bagian dari penggunaan alat evaluasi Indeks KAMI ini juga menciptakan alur komunikasi antar pengelola keamanan informasi di sektor pemerintah sehingga semua pihak dapat mengambil manfaat dari *lesson learned* yang sudah dilalui.

Petunjuk Penggunaan Alat Evaluasi Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)

Alat evaluasi Indeks KAMI ini dapat digunakan oleh organisasi dengan skala nasional, maupun yang berukuran kecil. Penggunaan di Instansi pemerintah dapat dilakukan di tingkat pusat maupun satuan kerja yang ada di tingkatan Direktorat Jenderal, Badan, Pusat atau Direktorat untuk mendapatkan gambaran mengenai kematangan program kerja keamanan informasi yang dijalankannya. Evaluasi ini dianjurkan untuk dilakukan oleh pejabat yang secara langsung bertanggungjawab dan berwenang untuk mengelola keamanan informasi di seluruh cakupan instansinya.

Proses evaluasi dilakukan melalui sejumlah pertanyaan di masing-masing area di bawah ini:

- Kategori Sistem Elektronik yang digunakan Instansi
- Tata Kelola Keamanan Informasi
- Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi
- Kerangka Kerja Keamanan Informasi
- Pengelolaan Aset Informasi, dan
- Teknologi dan Keamanan Informasi
- Suplemen: Area evaluasi untuk aspek Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan, Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan (*Cloud Service*) dan Perlindungan Data Pribadi.

Pertanyaan yang ada belum tentu dapat dijawab semuanya, akan tetapi yang harus diperhatikan adalah jawaban yang diberikan harus merefleksikan kondisi penerapan keamanan informasi SESUNGGUHNYA. Alat evaluasi ini hanya akan memberikan nilai tambah bagi semua pihak apabila pengisiannya menggunakan azas keterbukaan dan kejujuran.

Sebelum mulai menjawab pertanyaan terkait kesiapan pengamanan informasi, responden diminta untuk mendefinisikan Kategori Sistem Elektronik di Instansinya. Definisi ini bisa dijabarkan untuk tingkat Satuan Kerja baik di tingkat Kementerian/Lembaga, ataupun untuk satuan kerja yang lebih kecil, sampai ke Unit Eselon III. Responden juga diminta untuk mendeskripsikan infrastruktur TIK yang ada dalam satuan kerjanya secara singkat. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengelompokkan Sistem Elektronik yang digunakan instansi ke "tingkat" tertentu: Rendah, Tinggi dan Strategis. Dengan pengelompokan ini nantinya bisa dilakukan pemetaan terhadap instansi yang mempunyai karakteristik Sistem Elektornik yang sama.

Pertanyaan dikelompokkan untuk 2 keperluan. Pertama, pertanyaan dikategorikan berdasarkan tingkat kesiapan penerapan pengamanan sesuai dengan **kelengkapan** kontrol yang diminta oleh standar ISO/IEC 27001:2013. Dalam pengelompokan ini responden diminta untuk memberi tanggapan mulai dari area yang terkait dengan bentuk kerangka kerja dasar keamanan informasi (pertanyaan diberi label "1"), efektifitas dan konsistensi penerapannya (label "2"), sampai dengan kemampuan untuk selalu meningkatkan kinerja keamanan informasi (label "3"). Tingkat terakhir ini sesuai dengan kesiapan minimum yang diprasyaratkan oleh proses sertifikasi standar ISO/IEC 27001:2013.

Setiap jawaban diberikan skor yang nantinya dikonsolidasi untuk menghasilkan angka

Status Pengamanan	Kategori Pengamanan		
	1	2	3
Tidak Dilakukan	0	0	0
Dalam Perencanaan	1	2	3
Dalam Penerapan atau Diterapkan Sebagian	2	4	6
Diterapkan secara Menyeluruh	3	6	9

(Catatan: untuk keseluruhan area pengamanan, pengisian pertanyaan dengan label "3" hanya dapat memberikan hasil apabila semua pertanyaan terkait dengan label "1" dan "2" sudah diisi dengan status minimal "Diterapkan Sebagian")

dengan latar belakang area untuk tingkat maksimal kematangan 1 s/d 3. Dalam diagram ini bisa dilihat perbandingan antara kondisi kesiapan sebagai hasil dari proses evaluasi dengan acuan tingkat kematangan yang ada.

Dengan membaca diagram ini, pimpinan instansi dapat melihat kebutuhan pembenahan yang diperlukan dan korelasi antara berbagai area penerapan keamanan informasi. Adapun korelasi antara Kategori Sistem Elektronik dengan Status Kesiapan didefinisikan melalui tabel berikut:

KATEGORI SISTEM ELEKTRONIK				
Rendah		Skor Akhir		Status Kesiapan
10	15	0	174	Tidak Layak
		175	312	Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar
		313	535	Cukup Baik
		536	645	Baik
Tinggi		Skor Akhir		Status Kesiapan
16	34	0	272	Tidak Layak
		273	455	Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar
		456	583	Cukup Baik
		584	645	Baik
Strategis		Skor Akhir		Status Kesiapan
35	50	0	333	Tidak Layak
		334	535	Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar
		536	609	Cukup Baik
		610	645	Baik

Pengelompokan kedua dilakukan berdasarkan tingkat **kematangan** penerapan pengamanan dengan kategorisasi yang mengacu kepada tingkatan kematangan yang digunakan oleh keangka kerja COBIT atau CMMI. Tingkat kematangan ini nantinya akan digunakan sebagai alat untuk melaporkan pemetaan dan pemeringkatan kesiapan keamanan informasi di Kementerian/Lembaga.

Untuk keperluan Indeks KAMI, tingkat kematangan tersebut didefinisikan sebagai:

- Tingkat I - Kondisi Awal
- Tingkat II - Penerapan Kerangka Kerja Dasar
- Tingkat III - Terdefinisi dan Konsisten
- Tingkat IV - Terkelola dan Terukur
- Tingkat V - Optimal

Untuk membantu memberikan uraian yang lebih detil, tingkatan ini ditambah dengan tingkatan antara - I+, II+, III+, dan IV+, sehingga total terdapat 9 tingkatan kematangan. Sebagai awal, semua responden akan diberikan kategori kematangan Tingkat I. Sebagai padanan terhadap standar ISO/IEC 2700:2013, tingkat kematangan yang diharapkan untuk ambang batas minimum kesiapan sertifikasi adalah Tingkat III+.

Ilustrasi di bawah menunjukkan label pengelompokan kematangan (kolom di sebelah kanan nomor urut) dan kelengkapan (kolom di sebelah kiri pertanyaan).

Bagian II: Tata Kelola Keamanan Informasi			
Bagian ini mengevaluasi kesiapan bentuk tata kelola keamanan informasi beserta Instansi/fungsi, tugas dan tanggung jawab pengelola keamanan informasi.			
[Penilaian] Tidak Dilakukan; Dalam Perencanaan; Dalam Penerapan atau Diterapkan Sebagian; Diterapkan Secara Menyeluruh			Status
#		Fungsi/Instansi Keamanan Informasi	
2.1	II	1	Apakah pimpinan Instansi anda secara prinsip dan resmi bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program keamanan informasi (misal yang tercantum dalam ITSP), termasuk penetapan kebijakan terkait?
2.2	II	1	Apakah Instansi anda memiliki fungsi atau bagian yang secara spesifik mempunyai tugas dan tanggungjawab mengelola keamanan informasi dan menjaga kepatuhannya?
2.3	II	1	Apakah pejabat/petugas pelaksana pengamanan informasi mempunyai wewenang yang sesuai untuk menerapkan dan menjamin kepatuhan program keamanan informasi?
2.4	II	1	Apakah penanggungjawab pelaksanaan pengamanan informasi diberikan alokasi sumber daya yang sesuai untuk mengelola dan menjamin kepatuhan program keamanan informasi?
2.5	II	1	Apakah peran pelaksana pengamanan informasi yang mencakup semua keperluan dipetakan dengan lengkap, termasuk kebutuhan audit internal dan persyaratan segregasi kewenangan?
2.6	II	1	Apakah Instansi anda sudah mendefinisikan persyaratan/standar kompetensi dan keahlian pelaksana pengelolaan keamanan informasi?
2.7	II	1	Apakah semua pelaksana pengamanan informasi di Instansi anda memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai sesuai persyaratan/standar yang berlaku?
2.8	II	1	Apakah instansi anda sudah menerapkan program sosialisasi dan peningkatan pemahaman untuk keamanan informasi, termasuk kepentingan kepatuhannya bagi semua pihak yang terkait?
2.9	II	2	Apakah Instansi anda menerapkan program peningkatan kompetensi dan keahlian untuk pejabat dan petugas pelaksana pengelolaan keamanan informasi?
2.10	II	2	Apakah instansi anda sudah mengintegrasikan keperluan/persyaratan keamanan informasi dalam proses kerja yang ada?

Kedua pengelompokan ini dapat dipetakan (lihat gambar di bawah) untuk memberikan dua sudut pandang yang berbeda: tingkat kelengkapan pengamanan dan tingkat kematangan pengamanan. Instansi responden dapat menggunakan metrik ini sebagai target program keamanan informasi.



Indeks KAMI sebaiknya digunakan 2X dalam setahun sebagai alat untuk melakukan tinjauan ulang kesiapan keamanan informasi sekaligus untuk mengukur keberhasilan inisiatif perbaikan yang diterapkan, dengan pencapaian tingkat kelengkapan atau kematangan tertentu.

Suplemen

Perkembangan teknologi yang pesat dan pola bisnis yang dinamis menyebabkan munculnya risiko keamanan informasi baru. Keterlibatan pihak ketiga dalam rantai pasok (supply chain) layanan suatu instansi/perusahaan menimbulkan risiko terkait keberadaan/keterlibatan pihak eksternal tersebut. Layanan berbasis infrastruktur awan (Cloud) memberikan peluang efisiensi dan peningkatan kinerja yang sangat signifikan bagi instansi/perusahaan, akan tetapi risiko terkait data yang berada pada pengendalian pihak ketiga (penyelenggara layanan) perlu dimitigasi. Sedangkan disahkannya peraturan terkait perlindungan data pribadi oleh banyak negara memerlukan kerangka kerja yang secara spesifik membahas bagaimana data pribadi yang ada/digunakan dalam instansi/perusahaan diamankan sesuai dengan persyaratan hukum.

Untuk menilai kesiapan instansi/perusahaan dalam mengelola risiko di 3 (tiga) area baru ini, pada revisi 4.0 disediakan modul suplemen yang membahas aspek kesiapan pengamanan untuk ketiga aspek tersebut.

Penggunaan modul suplemen untuk evaluasi kesiapan Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga, Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan dan Perlindungan Data Pribadi digunakan sesuai konteks atau cakupan yang ada. Responden hanya perlu menjawab area evaluasi yang berlaku.

Butir-butir evaluasi kesiapan pengamanan yang disusun untuk setiap area merupakan persyaratan dasar yang bagi instansi/perusahaan yang terpapar risiko terkait ketiga area tersebut.

Hasil penilaian evaluasi kesiapan Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga, Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan dan Perlindungan Data Pribadi disampaikan dalam bentuk persentase (%) dengan obyektif/sasaran pencapaian maksimal.

Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)

Identitas Instansi atau Perusahaan

*Satuan Kerja
Direktorat
Departemen*

Alamat

*Alamat 1
Alamat 2
Kota Kode Pos*

Nomor Telpon

(Kode Area) Nomor Telpon

Email

user@departemen_responden.go.id

Pengisi Lembar Evaluasi

Nama Staf atau Pejabat

Jabatan

Jabatan Struktural/Fungsional

Tanggal Pengisian

HH/BB/TTTT

Deskripsi Ruang Lingkup

Isi dengan deskripsi ruang lingkup struktur organisasi (Departemen, Bagian atau Satuan Kerja) dan infrastruktur TIK

Bagian I: Kategori Sistem Elektronik		
Bagian ini mengevaluasi tingkat atau kategori sistem elektronik yang digunakan		
[Kategori Sistem Elektronik] Rendah; Tinggi; Strategis		Status
#	Karakteristik Instansi/Perusahaan	
1.1	Nilai investasi sistem elektronik yang terpasang [A] Lebih dari Rp.30 Miliar [B] Lebih dari Rp.3 Miliar s/d Rp.30 Miliar [C] Kurang dari Rp.3 Miliar	B
1.2	Total anggaran operasional tahunan yang dialokasikan untuk pengelolaan Sistem Elektronik [A] Lebih dari Rp.10 Miliar [B] Lebih dari Rp.1 Miliar s/d Rp.10 Miliar [C] Kurang dari Rp.1 Miliar	B
1.3	Memiliki kewajiban kepatuhan terhadap Peraturan atau Standar tertentu [A] Peraturan atau Standar nasional dan internasional [B] Peraturan atau Standar nasional [C] Tidak ada Peraturan khusus	B
1.4	Menggunakan teknik kriptografi khusus untuk keamanan informasi dalam Sistem Elektronik [A] Teknik kriptografi khusus yang disertifikasi oleh Negara [B] Teknik kriptografi sesuai standar industri, tersedia secara publik atau dikembangkan sendiri [C] Tidak ada penggunaan teknik kriptografi	B
1.5	Jumlah pengguna Sistem Elektronik [A] Lebih dari 5.000 pengguna [B] 1.000 sampai dengan 5.000 pengguna [C] Kurang dari 1.000 pengguna	A
1.6	Data pribadi yang dikelola Sistem Elektronik [A] Data pribadi yang memiliki hubungan dengan Data Pribadi lainnya [B] Data pribadi yang bersifat individu dan/atau data pribadi yang terkait dengan kepemilikan badan usaha [C] Tidak ada data pribadi	B
1.7	Tingkat klasifikasi/kekritisitas Data yang ada dalam Sistem Elektronik, relatif terhadap ancaman upaya penyerangan atau penerobosan keamanan informasi [A] Sangat Rahasia [B] Rahasia dan/ atau Terbatas [C] Biasa	B
1.8	Tingkat kekritisitas proses yang ada dalam Sistem Elektronik, relatif terhadap ancaman upaya penyerangan atau penerobosan keamanan informasi [A] Proses yang berisiko mengganggu hajat hidup orang banyak dan memberi dampak langsung pada layanan publik [B] Proses yang berisiko mengganggu hajat hidup orang banyak dan memberi dampak tidak langsung [C] Proses yang hanya berdampak pada bisnis perusahaan	A
1.9	Dampak dari kegagalan Sistem Elektronik [A] Tidak tersedianya layanan publik berskala nasional atau membahayakan pertahanan keamanan negara [B] Tidak tersedianya layanan publik dalam 1 propinsi atau lebih [C] Tidak tersedianya layanan publik dalam 1 kabupaten/kota atau lebih	C
1.10	Potensi kerugian atau dampak negatif dari insiden ditembusnya keamanan informasi Sistem Elektronik (sabotase, terorisme) [A] Menimbulkan korban jiwa [B] Terbatas pada kerugian finansial [C] Mengakibatkan gangguan operasional sementara (tidak membahayakan dan mengakibatkan kerugian finansial)	C
Skor penetapan Kategori Sistem Elektronik		24

Bagian II: Tata Kelola Keamanan Informasi			
Bagian ini mengevaluasi kesiapan bentuk tata kelola keamanan informasi beserta instansi/perusahaan/fungsi, tugas dan tanggung jawab pengelola keamanan informasi.			
[Penilaian] Tidak Dilakukan; Dalam Perencanaan; Dalam Penerapan atau Diterapkan Sebagian; Diterapkan Secara Menyeluruh			Status
#		Fungsi/Organisasi Keamanan Informasi	
2.1	II	1 Apakah pimpinan instansi/perusahaan anda secara prinsip dan resmi bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program keamanan informasi (misal yang tercantum dalam ITSP), termasuk penetapan kebijakan terkait?	Diterapkan Secara Menyeluruh
2.2	II	1 Apakah instansi/perusahaan anda memiliki fungsi atau bagian yang secara spesifik mempunyai tugas dan tanggungjawab mengelola keamanan informasi dan menjaga kepatuhannya?	Diterapkan Secara Menyeluruh
2.3	II	1 Apakah pejabat/petugas pelaksana pengamanan informasi mempunyai wewenang yang sesuai untuk menerapkan dan menjamin kepatuhan program keamanan informasi?	Diterapkan Secara Menyeluruh
2.4	II	1 Apakah penanggungjawab pelaksanaan pengamanan informasi diberikan alokasi sumber daya yang sesuai untuk mengelola dan menjamin kepatuhan program keamanan informasi?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
2.5	II	1 Apakah peran pelaksana pengamanan informasi yang mencakup semua keperluan dipetakan dengan lengkap, termasuk kebutuhan audit internal dan persyaratan segregasi kewenangan?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
2.6	II	1 Apakah instansi/perusahaan anda sudah mendefinisikan persyaratan/standar kompetensi dan keahlian pelaksana pengelolaan keamanan informasi?	Dalam Perencanaan
2.7	II	1 Apakah semua pelaksana pengamanan informasi di instansi/perusahaan anda memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai sesuai persyaratan/standar yang berlaku?	Dalam Perencanaan
2.8	II	1 Apakah instansi/perusahaan anda sudah menerapkan program sosialisasi dan peningkatan pemahaman untuk keamanan informasi, termasuk kepentingan kepatuhannya bagi semua pihak yang terkait?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
2.9	II	2 Apakah instansi/perusahaan anda menerapkan program peningkatan kompetensi dan keahlian untuk pejabat dan petugas pelaksana pengelolaan keamanan informasi?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
2.10	II	2 Apakah instansi/perusahaan anda sudah mengintegrasikan keperluan/persyaratan keamanan informasi dalam proses kerja yang ada?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
2.11	II	2 Apakah instansi/perusahaan anda sudah mengidentifikasi data pribadi yang digunakan dalam proses kerja dan menerapkan pengamanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
2.12	II	2 Apakah tanggungjawab pengelolaan keamanan informasi mencakup koordinasi dengan pihak pengelola/pengguna aset informasi internal dan eksternal maupun pihak lain yang berkepentingan, untuk mengidentifikasi persyaratan/kebutuhan pengamanan (misal: pertukaran informasi atau kerjasama yang melibatkan informasi penting) dan menyelesaikan permasalahan yang ada?	Dalam Perencanaan
2.13	II	2 Apakah pengelola keamanan informasi secara proaktif berkoordinasi dengan satker terkait (SDM, Legal/Hukum, Umum, Keuangan dll) dan pihak eksternal yang berkepentingan (misal: regulator, aparat keamanan) untuk menerapkan dan menjamin kepatuhan pengamanan informasi terkait proses kerja yang melibatkan berbagai pihak?	Dalam Perencanaan
2.14	III	2 Apakah tanggungjawab untuk memutuskan, merancang, melaksanakan dan mengelola langkah kelangsungan layanan TIK (<i>business continuity</i> dan <i>disaster recovery plans</i>) sudah didefinisikan dan dialokasikan?	Dalam Perencanaan
2.15	III	2 Apakah penanggungjawab pengelolaan keamanan informasi melaporkan kondisi, kinerja/efektifitas dan kepatuhan program keamanan informasi kepada pimpinan instansi/perusahaan secara rutin dan resmi?	Dalam Perencanaan
2.16	III	2 Apakah kondisi dan permasalahan keamanan informasi di instansi/perusahaan anda menjadi konsiderans atau bagian dari proses pengambilan keputusan strategis di instansi/perusahaan anda?	Dalam Perencanaan
2.17	IV	3 Apakah pimpinan satuan kerja di instansi/perusahaan anda menerapkan program khusus untuk mematuhi tujuan dan sasaran kepatuhan pengamanan informasi, khususnya yang mencakup aset informasi yang menjadi tanggungjawabnya?	Dalam Perencanaan
2.18	IV	3 Apakah instansi/perusahaan anda sudah mendefinisikan metrik, parameter dan proses pengukuran kinerja pengelolaan keamanan informasi yang mencakup mekanisme, waktu pengukuran, pelaksanaannya, pemantauannya dan eskalasi pelaporannya?	Dalam Perencanaan
2.19	IV	3 Apakah instansi/perusahaan anda sudah menerapkan program penilaian kinerja pengelolaan keamanan informasi bagi individu (pejabat & petugas) pelaksanaannya?	Dalam Perencanaan
2.20	IV	3 Apakah instansi/perusahaan anda sudah menerapkan target dan sasaran pengelolaan keamanan informasi untuk berbagai area yang relevan, mengevaluasi pencapaiannya secara rutin, menerapkan langkah perbaikan untuk mencapai sasaran yang ada, termasuk pelaporan statusnya kepada pimpinan instansi/perusahaan?	Dalam Perencanaan
2.21	IV	3 Apakah instansi/perusahaan anda sudah mengidentifikasi legislasi, perangkat hukum dan standar lainnya terkait keamanan informasi yang harus dipatuhi dan menganalisa tingkat kepatuhannya?	Dalam Perencanaan
2.22	IV	3 Apakah instansi/perusahaan anda sudah mendefinisikan kebijakan dan langkah penanggulangan insiden keamanan informasi yang menyangkut pelanggaran hukum (pidana dan perdata)?	Dalam Perencanaan
Total Nilai Evaluasi Tata Kelola			39

Bagian III: Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi			
Bagian ini mengevaluasi kesiapan penerapan pengelolaan risiko keamanan informasi sebagai dasar penerapan strategi keamanan informasi.			
[Penilaian] Tidak Dilakukan; Dalam Perencanaan; Dalam Penerapan atau Diterapkan Sebagian; Diterapkan Secara Menyeluruh			Status
#		Kajian Risiko Keamanan Informasi	
3.1	II	1 Apakah instansi/perusahaan anda mempunyai program kerja pengelolaan risiko keamanan informasi yang terdokumentasi dan secara resmi digunakan?	Dalam Perencanaan
3.2	II	1 Apakah instansi/perusahaan anda sudah menetapkan penanggung jawab manajemen risiko dan eskalasi pelaporan status pengelolaan risiko keamanan informasi sampai ke tingkat pimpinan?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
3.3	II	1 Apakah instansi/perusahaan anda mempunyai kerangka kerja pengelolaan risiko keamanan informasi yang terdokumentasi dan secara resmi digunakan?	Dalam Perencanaan
3.4	II	1 Apakah kerangka kerja pengelolaan risiko ini mencakup definisi dan hubungan tingkat klasifikasi aset informasi, tingkat ancaman, kemungkinan terjadinya ancaman tersebut dan dampak kerugian terhadap instansi/perusahaan anda?	Dalam Perencanaan
3.5	II	1 Apakah instansi/perusahaan anda sudah menetapkan ambang batas tingkat risiko yang dapat diterima?	Dalam Perencanaan
3.6	II	1 Apakah instansi/perusahaan anda sudah mendefinisikan kepemilikan dan pihak pengelola (<i>custodian</i>) aset informasi yang ada, termasuk aset utama/penting dan proses kerja utama yang menggunakan aset tersebut?	Dalam Perencanaan
3.7	II	1 Apakah ancaman dan kelemahan yang terkait dengan aset informasi, terutama untuk setiap aset utama sudah teridentifikasi?	Dalam Perencanaan
3.8	II	1 Apakah dampak kerugian yang terkait dengan hilangnya/terganggunya fungsi aset utama sudah ditetapkan sesuai dengan definisi yang ada?	Dalam Perencanaan
3.9	II	1 Apakah instansi/perusahaan anda sudah menjalankan inisiatif analisa/kajian risiko keamanan informasi secara terstruktur terhadap aset informasi yang ada (untuk nantinya digunakan dalam mengidentifikasi langkah mitigasi atau penanggulangan yang menjadi bagian dari program pengelolaan keamanan informasi)?	Dalam Perencanaan
3.10	II	1 Apakah instansi/perusahaan anda sudah menyusun langkah mitigasi dan penanggulangan risiko yang ada?	Dalam Perencanaan
3.11	III	2 Apakah langkah mitigasi risiko disusun sesuai tingkat prioritas dengan target penyelesaiannya dan penanggungjawabnya, dengan memastikan efektifitas penggunaan sumber daya yang dapat menurunkan tingkat risiko ke ambang batas yang bisa diterima dengan meminimalisir dampak terhadap operasional layanan TIK?	Dalam Perencanaan
3.12	III	2 Apakah status penyelesaian langkah mitigasi risiko dipantau secara berkala, untuk memastikan penyelesaian atau kemajuan kerjanya?	Dalam Perencanaan
3.13	IV	2 Apakah penyelesaian langkah mitigasi yang sudah diterapkan dievaluasi, melalui proses yang obyektif/terukur untuk memastikan konsistensi dan efektifitasnya?	Dalam Perencanaan
3.14	IV	2 Apakah profil risiko berikut bentuk mitigasinya secara berkala dikaji ulang untuk memastikan akurasi dan validitasnya, termasuk merevisi profil tersebut apabila ada perubahan kondisi yang signifikan atau keperluan penerapan bentuk pengamanan baru?	Dalam Perencanaan
3.15	V	3 Apakah kerangka kerja pengelolaan risiko secara berkala dikaji untuk memastikan/meningkatkan efektifitasnya?	Dalam Perencanaan
3.16	V	3 Apakah pengelolaan risiko menjadi bagian dari kriteria proses penilaian obyektif kinerja efektifitas pengamanan?	Dalam Perencanaan
Total Nilai Evaluasi Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi			19

Bagian IV: Kerangka Kerja Pengelolaan Keamanan Informasi			
Bagian ini mengevaluasi kelengkapan dan kesiapan kerangka kerja (kebijakan & prosedur) pengelolaan keamanan informasi dan strategi penerapannya.			
[Penilaian] Tidak Dilakukan; Dalam Perencanaan; Dalam Penerapan atau Diterapkan Sebagian; Diterapkan Secara Menyeluruh			Status
#		Penyusunan dan Pengelolaan Kebijakan & Prosedur Keamanan Informasi	
4.1	II	1	Apakah kebijakan dan prosedur maupun dokumen lainnya yang diperlukan terkait keamanan informasi sudah disusun dan dituliskan dengan jelas, dengan mencantumkan peran dan tanggung jawab pihak-pihak yang diberikan wewenang untuk menerapkannya?
4.2	II	1	Apakah kebijakan keamanan informasi sudah ditetapkan secara formal, dipublikasikan kepada semua staf/karyawan termasuk pihak terkait dan dengan mudah diakses oleh pihak yang membutuhkannya?
4.3	II	1	Apakah tersedia mekanisme untuk mengelola dokumen kebijakan dan prosedur keamanan informasi, termasuk penggunaan daftar induk, distribusi, penarikan dari peredaran dan penyimpanannya?
4.4	II	1	Apakah tersedia proses (mencakup pelaksana, mekanisme, jadwal, materi, dan sarasannya) untuk mengkomunikasikan kebijakan keamanan informasi (dan perubahannya) kepada semua pihak terkait, termasuk pihak ketiga?
4.5	II	1	Apakah keseluruhan kebijakan dan prosedur keamanan informasi yang ada merefleksikan kebutuhan mitigasi dari hasil kajian risiko keamanan informasi, maupun sasaran/obyektif tertentu yang ditetapkan oleh pimpinan instansi/perusahaan?
4.6	II	1	Apakah tersedia proses untuk mengidentifikasi kondisi yang membahayakan keamanan informasi dan menetakannya sebagai insiden keamanan informasi untuk ditindak lanjuti sesuai prosedur yang diberlakukan?
4.7	II	1	Apakah aspek keamanan informasi yang mencakup pelaporan insiden, menjaga kerahasiaan, HAKI, tata tertib penggunaan dan pengamanan aset maupun layanan TIK tercantum dalam kontrak dengan pihak ketiga?
4.8	II	2	Apakah konsekuensi dari pelanggaran kebijakan keamanan informasi sudah didefinisikan, dikomunikasikan dan ditegakkan?
4.9	II	2	Apakah tersedia prosedur resmi untuk mengelola suatu pengecualian terhadap penerapan keamanan informasi, termasuk proses untuk menindak lanjuti konsekuensi dari kondisi ini?
4.10	III	2	Apakah organisasi anda sudah menerapkan kebijakan dan prosedur operasional untuk mengelola implementasi <i>security patch</i> , alokasi tanggung jawab untuk memonitor adanya rilis <i>security patch</i> baru, memastikan pemasangannya dan melaporkannya?
4.11	III	2	Apakah organisasi anda sudah membahas aspek keamanan informasi dalam manajemen proyek yang terkait dengan ruang lingkup?
4.12	III	2	Apakah organisasi anda sudah menerapkan proses untuk mengevaluasi risiko terkait rencana pembelian (atau implementasi) sistem baru dan menanggulangi permasalahan yang muncul?
4.13	III	2	Apakah organisasi anda sudah menerapkan proses pengembangan sistem yang aman (<i>Secure SDLC</i>) dengan menggunakan prinsip atau metode sesuai standar platform teknologi yang digunakan?
4.14	III	2	Apabila penerapan suatu sistem mengakibatkan timbulnya risiko baru atau terjadinya ketidakpatuhan terhadap kebijakan yang ada, apakah ada proses untuk menanggulangi hal ini, termasuk penerapan pengamanan baru (<i>compensating control</i>) dan jadwal penyelesaiannya?
4.15	III	2	Apakah tersedia kerangka kerja pengelolaan perencanaan kelangsungan layanan TIK (<i>business continuity planning</i>) yang mendefinisikan persyaratan/konsiderans keamanan informasi, termasuk penjadwalan uji cobanya?
4.16	III	3	Apakah perencanaan pemulihan bencana terhadap layanan TIK (<i>disaster recovery plan</i>) sudah mendefinisikan komposisi, peran, wewenang dan tanggungjawab tim yang ditunjuk?
4.17	III	3	Apakah uji coba perencanaan pemulihan bencana terhadap layanan TIK (<i>disaster recovery plan</i>) sudah dilakukan sesuai jadwal?
4.18	IV	3	Apakah hasil dari perencanaan pemulihan bencana terhadap layanan TIK (<i>disaster recovery plan</i>) dievaluasi untuk menerapkan langkah perbaikan atau pembenahan yang diperlukan - misal, apabila hasil uji coba menunjukkan bahwa proses pemulihan tidak bisa (gagal) memenuhi persyaratan yang ada?
4.19	IV	3	Apakah seluruh kebijakan dan prosedur keamanan informasi dievaluasi kelayakannya secara berkala?
#		Pengelolaan Strategi dan Program Keamanan Informasi	
4.20	II	1	Apakah organisasi anda mempunyai strategi penerapan keamanan informasi sesuai hasil analisa risiko yang penerapannya dilakukan sebagai bagian dari rencana kerja organisasi?
4.21	II	1	Apakah organisasi anda mempunyai strategi penggunaan teknologi keamanan informasi yang penerapan dan pemutakhirannya disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan profil risiko?
4.22	III	1	Apakah strategi penerapan keamanan informasi direalisasikan sebagai bagian dari pelaksanaan program kerja organisasi anda?
4.23	III	1	Apakah organisasi anda memiliki dan melaksanakan program audit internal yang dilakukan oleh pihak independen dengan cakupan keseluruhan aset informasi, kebijakan dan prosedur keamanan yang ada (atau sesuai dengan standar yang berlaku)?
4.24	III	1	Apakah audit internal tersebut mengevaluasi tingkat kepatuhan, konsistensi dan efektivitas penerapan keamanan informasi?
4.25	III	2	Apakah hasil audit internal tersebut dikaji/dievaluasi untuk mengidentifikasi langkah pembenahan dan pencegahan, ataupun inisiatif peningkatan kinerja keamanan informasi?
4.26	III	2	Apakah hasil audit internal dilaporkan kepada pimpinan organisasi untuk menetapkan langkah perbaikan atau program peningkatan kinerja keamanan informasi?
4.27	IV	3	Apabila ada keperluan untuk merevisi kebijakan dan prosedur yang berlaku, apakah ada analisa untuk menilai aspek finansial (dampak biaya dan keperluan anggaran) ataupun perubahan terhadap infrastruktur dan pengelolaan perubahannya, sebagai prasyarat untuk menerapkannya?
4.28	V	3	Apakah organisasi anda secara periodik menguji dan mengevaluasi tingkat/status kepatuhan program keamanan informasi yang ada (mencakup pengecualian atau kondisi ketidakpatuhan lainnya) untuk memastikan bahwa keseluruhan inisiatif tersebut, termasuk langkah pembenahan yang diperlukan, telah diterapkan secara efektif?
4.29	V	3	Apakah organisasi anda mempunyai rencana dan program peningkatan keamanan informasi untuk jangka menengah/panjang (1-3-5 tahun) yang direalisasikan secara konsisten?
Total Nilai Evaluasi Kerangka Kerja			36

Bagian V: Pengelolaan Aset Informasi				
Bagian ini mengevaluasi kelengkapan pengamanan aset informasi, termasuk keseluruhan siklus penggunaan aset tersebut.				
[Penilaian] Tidak Dilakukan; Dalam Perencanaan; Dalam Penerapan atau Diterapkan Sebagian; Diterapkan Secara Menyeluruh			Status	
#		Pengelolaan Aset Informasi		
5.1	II	1	Apakah tersedia daftar inventaris aset informasi dan aset yang berhubungan dengan proses teknologi informasi secara lengkap, akurat dan terpelihara? (termasuk kepemilikan aset)	Diterapkan Secara Menyeluruh
5.2	II	1	Apakah tersedia definisi klasifikasi aset informasi yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku?	Diterapkan Secara Menyeluruh
5.3	II	1	Apakah tersedia proses yang mengevaluasi dan mengklasifikasi aset informasi sesuai tingkat kepentingan aset bagi instansi/perusahaan dan keperluan pengamanannya?	Diterapkan Secara Menyeluruh
5.4	II	1	Apakah tersedia definisi tingkatan akses yang berbeda dari setiap klasifikasi aset informasi dan matriks yang merekam alokasi akses tersebut	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.5	II	1	Apakah tersedia proses pengelolaan perubahan terhadap sistem, proses bisnis dan proses teknologi informasi (termasuk perubahan konfigurasi) yang diterapkan secara konsisten?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.6	II	1	Apakah tersedia proses pengelolaan konfigurasi yang diterapkan secara konsisten?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.7	II	1	Apakah tersedia proses untuk merilis suatu aset baru ke dalam lingkungan operasional dan memutakhirkan inventaris aset informasi?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
			Apakah instansi/perusahaan anda memiliki dan menerapkan kontrol keamanan di bawah ini, sebagai kelanjutan dari proses penerapan mitigasi risiko?	
5.8	II	1	Definisi tanggungjawab pengamanan informasi secara individual untuk semua personil di instansi/perusahaan anda	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.9	II	1	Tata tertib penggunaan komputer, email, internet dan intranet	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.10	II	1	Tata tertib pengamanan dan penggunaan aset instansi/perusahaan terkait HAKI	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.11	II	1	Peraturan terkait instalasi piranti lunak di aset TI milik instansi/perusahaan	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.12	II	1	Peraturan penggunaan data pribadi yang mensyaratkan pemberian ijin tertulis oleh pemilik data pribadi	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.13	II	1	Pengelolaan identitas elektronik dan proses otentikasi (<i>username & password</i>) termasuk kebijakan terhadap pelanggarannya	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.14	II	1	Persyaratan dan prosedur pengelolaan/pemberian akses, otentikasi dan otorisasi untuk menggunakan aset informasi	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.15	II	1	Ketetapan terkait waktu penyimpanan untuk klasifikasi data yang ada dan syarat penghancuran data	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.16	II	1	Ketetapan terkait pertukaran data dengan pihak eksternal dan pengamanannya	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.17	II	1	Proses penyidikan/investigasi untuk menyelesaikan insiden terkait kegagalan keamanan informasi	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.18	II	1	Prosedur <i>back-up</i> dan uji coba pengembalian data (<i>restore</i>) secara berkala	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.19	II	2	Ketentuan pengamanan fisik yang disesuaikan dengan definisi zona dan klasifikasi aset yang ada di dalamnya	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.20	III	2	Proses pengecekan latar belakang SDM	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.21	III	2	Proses pelaporan insiden keamanan informasi kepada pihak eksternal ataupun pihak yang berwajib.	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.22	III	2	Prosedur penghancuran data/aset yang sudah tidak diperlukan	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.23	III	2	Prosedur kajian penggunaan akses (<i>user access review</i>) dan hak aksesnya (<i>user access rights</i>) berikut langkah pembenahan apabila terjadi ketidaksesuaian (<i>non-conformity</i>) terhadap kebijakan yang berlaku	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.24	III	2	Prosedur untuk <i>user</i> yang mutasi/keluar atau tenaga kontrak/ <i>outsourse</i> yang habis masa kerjanya.	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.25	III	3	Apakah tersedia daftar data/informasi yang harus di- <i>back-up</i> dan laporan analisa kepatuhan terhadap prosedur <i>backup</i> -nya?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.26	III	3	Apakah tersedia daftar rekaman pelaksanaan keamanan informasi dan bentuk pengamanan yang sesuai dengan klasifikasinya?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.27	III	3	Apakah tersedia prosedur penggunaan perangkat pengolah informasi milik pihak ketiga (termasuk perangkat milik pribadi dan mitra kerja/ <i>vendor</i>) dengan memastikan aspek HAKI dan pengamanan akses yang digunakan?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
#			Pengamanan Fisik	
5.28	II	1	Apakah sudah diterapkan pengamanan fasilitas fisik (lokasi kerja) yang sesuai dengan kepentingan/klasifikasi aset informasi, secara berlapis dan dapat mencegah upaya akses oleh pihak yang tidak berwenang?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.29	II	1	Apakah tersedia proses untuk mengelola alokasi kunci masuk (fisik dan elektronik) ke fasilitas fisik?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.30	II	1	Apakah infrastruktur komputasi terlindungi dari dampak lingkungan atau api dan berada dalam kondisi dengan suhu dan kelembaban yang sesuai dengan prasyarat pabrikannya?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.31	II	1	Apakah infrastruktur komputasi yang terpasang terlindungi dari gangguan pasokan listrik atau dampak dari petir?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.32	II	1	Apakah tersedia peraturan pengamanan perangkat komputasi milik instansi/perusahaan anda apabila digunakan di luar lokasi kerja resmi (kantor)?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.33	II	1	Apakah tersedia proses untuk memindahkan aset TIK (piranti lunak, perangkat keras, data/informasi dll) dari lokasi yang sudah ditetapkan (termasuk pemutakhiran lokasinya dalam daftar inventaris)?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.34	II	2	Apakah konstruksi ruang penyimpanan perangkat pengolah informasi penting menggunakan rancangan dan material yang dapat menanggulangi risiko kebakaran dan dilengkapi dengan fasilitas pendukung (deteksi kebakaran/asap, pemadam api, pengatur suhu dan kelembaban) yang sesuai?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.35	II	2	Apakah tersedia proses untuk memeriksa (inspeksi) dan merawat: perangkat komputer, fasilitas pendukungnya dan kelayakan keamanan lokasi kerja untuk menempatkan aset informasi penting?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.36	II	2	Apakah tersedia mekanisme pengamanan dalam pengiriman aset informasi (perangkat dan dokumen) yang melibatkan pihak ketiga?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.37	II	2	Apakah tersedia peraturan untuk mengamankan lokasi kerja penting (ruang server, ruang arsip) dari risiko perangkat atau bahan yang dapat membahayakan aset informasi (termasuk fasilitas pengolah informasi) yang ada di dalamnya? (misal larangan penggunaan telpon genggam di dalam ruang server, menggunakan kamera dll)	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.38	III	3	Apakah tersedia proses untuk mengamankan lokasi kerja dari keberadaan/kehadiran pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan instansi/perusahaan anda?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
			Total Nilai Evaluasi Pengelolaan Aset	115

Bagian VI: Teknologi dan Keamanan Informasi			
Bagian ini mengevaluasi kelengkapan, konsistensi dan efektifitas penggunaan teknologi dalam pengamanan aset informasi.			
[Penilaian] Tidak Dilakukan; Dalam Perencanaan; Dalam Penerapan atau Diterapkan Sebagian; Diterapkan Secara Menyeluruh			Status
#		Pengamanan Teknologi	
6.1	II	1 Apakah layanan TIK (sistem komputer) yang menggunakan internet sudah dilindungi dengan lebih dari 1 lapis pengamanan?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
6.2	II	1 Apakah jaringan komunikasi disegmentasi sesuai dengan kepentingannya (pembagian instansi/perusahaan, kebutuhan aplikasi, jalur akses khusus, dll)?	Diterapkan Secara Menyeluruh
6.3	II	1 Apakah tersedia konfigurasi standar untuk keamanan sistem bagi keseluruhan aset jaringan, sistem dan aplikasi, yang dimutakhirkan sesuai perkembangan (standar industri yang berlaku) dan kebutuhan?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
6.4	II	1 Apakah instansi/perusahaan anda secara rutin menganalisa kepatuhan penerapan konfigurasi standar yang ada?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
6.5	II	1 Apakah jaringan, sistem dan aplikasi yang digunakan secara rutin dipindai untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya celah kelemahan atau perubahan/keutuhan konfigurasi?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
6.6	II	1 Apakah keseluruhan infrastruktur jaringan, sistem dan aplikasi dirancang untuk memastikan ketersediaan (rancangan redundan) sesuai kebutuhan/persyaratan yang ada?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
6.7	II	1 Apakah keseluruhan infrastruktur jaringan, sistem dan aplikasi dimonitor untuk memastikan ketersediaan kapasitas yang cukup untuk kebutuhan yang ada?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
6.8	II	1 Apakah setiap perubahan dalam sistem informasi secara otomatis terekam di dalam log?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
6.9	II	1 Apakah upaya akses oleh yang tidak berhak secara otomatis terekam di dalam log?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
6.10	II	1 Apakah semua log dianalisa secara berkala untuk memastikan akurasi, validitas dan kelengkapan isinya (untuk kepentingan jejak audit dan forensik)?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
6.11	II	1 Apakah instansi/perusahaan anda menerapkan enkripsi untuk melindungi aset informasi penting sesuai kebijakan pengelolaan yang ada?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
6.12	III	2 Apakah instansi/perusahaan anda mempunyai standar dalam menggunakan enkripsi?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
6.13	III	2 Apakah instansi/perusahaan anda menerapkan pengamanan untuk mengelola kunci enkripsi (termasuk sertifikat elektronik) yang digunakan, termasuk siklus penggunaannya?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
6.14	III	2 Apakah semua sistem dan aplikasi secara otomatis mendukung dan menerapkan penggantian <i>password</i> secara otomatis, termasuk menon-aktifkan <i>password</i> , mengatur kompleksitas/panjangnya dan penggunaan kembali <i>password</i> lama?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
6.15	III	2 Apakah akses yang digunakan untuk mengelola sistem (administrasi sistem) menggunakan bentuk pengamanan khusus yang berlapis?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
6.16	III	2 Apakah sistem dan aplikasi yang digunakan sudah menerapkan pembatasan waktu akses termasuk otomatisasi proses <i>timeouts</i> , <i>lockout</i> setelah kegagalan <i>login</i> , dan penarikan akses?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
6.17	III	2 Apakah instansi/perusahaan anda menerapkan pengamanan untuk mendeteksi dan mencegah penggunaan akses jaringan (termasuk jaringan nirkabel) yang tidak resmi?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
6.18	II	1 Apakah instansi/perusahaan anda menerapkan bentuk pengamanan khusus untuk melindungi akses dari luar instansi/perusahaan?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
6.19	II	1 Apakah sistem operasi untuk setiap perangkat <i>desktop</i> dan <i>server</i> dimutakhirkan dengan versi terkini?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
6.20	II	1 Apakah setiap <i>desktop</i> dan <i>server</i> dilindungi dari penyerangan virus (<i>malware</i>)?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
6.21	III	2 Apakah ada rekaman dan hasil analisa (jejak audit - <i>audit trail</i>) yang mengkonfirmasi bahwa antivirus/antimalware telah dimutakhirkan secara rutin dan sistematis?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
6.22	III	2 Apakah adanya laporan penyerangan virus/malware yang gagal/sukses ditindaklanjuti dan diselesaikan?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
6.23	III	2 Apakah keseluruhan jaringan, sistem dan aplikasi sudah menggunakan mekanisme sinkronisasi waktu yang akurat, sesuai dengan standar yang ada?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
6.24	III	2 Apakah setiap aplikasi yang ada memiliki spesifikasi dan fungsi keamanan yang diverifikasi/validasi pada saat proses pengembangan dan uji coba?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
6.25	III	3 Apakah instansi/perusahaan anda menerapkan lingkungan pengembangan dan uji coba yang sudah diamankan sesuai dengan standar platform teknologi yang ada dan digunakan untuk seluruh siklus hidup sistem yang dibangun?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
6.26	IV	3 Apakah instansi/perusahaan anda melibatkan pihak independen untuk mengkaji kehandalan keamanan informasi secara rutin?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
Total Nilai Evaluasi Teknologi dan Keamanan Informasi			81

Bagian VII: Suplemen			
Bagian ini mengevaluasi kelengkapan, konsistensi dan efektivitas penggunaan teknologi dalam pengamanan aset informasi.			
[Penilaian]	Tidak Dilakukan; Dalam Perencanaan; Dalam Penerapan atau Diterapkan Sebagian; Diterapkan Secara Menyeluruh	Status	Skor
7.1	Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan		1,00
7.1.1	Manajemen Risiko dan Pengelolaan Keamanan pihak ketiga		
7.1.1.1	1 Apakah instansi/perusahaan mengidentifikasi risiko keamanan informasi yang ada terkait dengan kerjasama dengan pihak ketiga atau karyawan kontrak?	Dalam Perencanaan	1
7.1.1.2	1 Apakah instansi/perusahaan mengkomunikasikan dan mengklarifikasi risiko keamanan informasi yang ada pada pihak ketiga kepada mereka?	Dalam Perencanaan	1
7.1.1.3	1 Apakah instansi/perusahaan mengklarifikasi persyaratan mitigasi risiko instansi/perusahaan dan ekspektasi mitigasi risiko yang harus dipatuhi oleh pihak ketiga?	Dalam Perencanaan	1
7.1.1.4	1 Apakah rencana mitigasi terhadap risiko yang diidentifikasi tersebut disetujui oleh manajemen pihak ketiga atau karyawan kontrak?	Dalam Perencanaan	1
7.1.1.5	1 Apakah instansi/perusahaan telah menerapkan kebijakan keamanan informasi bagi pihak ketiga secara memadai, mencakup persyaratan pengendalian akses, penghancuran informasi, manajemen risiko penyediaan layanan pihak ketiga, dan NDA bagi karyawan pihak ketiga?	Dalam Perencanaan	1
7.1.1.6	1 Apakah kebijakan tersebut (7.1.1.5) telah dikomunikasikan kepada pihak ketiga dan mereka menyatakan persetujuannya dalam dokumen kontrak, SLA atau dokumen sejenis lainnya?	Dalam Perencanaan	1
7.1.1.7	1 Apakah hak audit TI secara berkala ke pihak ketiga/pihak ketiga telah ditetapkan sebagai bagian dan persyaratan kontrak, dikomunikasikan dan disetujui pihak ketiga? Termasuk di dalamnya akses terhadap laporan audit internal / eksternal tentang kondisi kontrol keamanan informasi pihak ketiga/pihak ketiga?	Dalam Perencanaan	1
7.1.2	Pengelolaan Sub-Kontraktor/Alih Daya pada Pihak Ketiga		
7.1.2.1	1 Apakah pihak ketiga sudah mengidentifikasi risiko terkait alih daya, subkontraktor atau penyedia teknologi/infrastruktur yang digunakan dalam layanannya?	Dalam Perencanaan	1
7.1.2.2	1 Apakah pihak ketiga sudah menerapkan pengendalian risikonya dalam perjanjian dengan mereka atau dokumen sejenis?	Dalam Perencanaan	1
7.1.2.3	1 Apakah pihak ketiga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan alih daya, subkontraktor atau penyedia teknologi/infrastruktur terhadap persyaratan keamanan yang ditetapkan?	Dalam Perencanaan	1
7.1.3	Pengelolaan Layanan dan Keamanan Pihak Ketiga		
7.1.3.1	1 Apakah instansi/perusahaan telah menetapkan proses, prosedur atau rencana terdokumentasi untuk mengelola dan memantau layanan dan aspek keamanan informasi (termasuk pengamanan aset informasi dan infrastruktur milik instansi/perusahaan yang diakses) dalam hubungan kerjasama dengan pihak ketiga?	Dalam Perencanaan	1
7.1.3.2	1 Apakah peran dan tanggung jawab pemantauan, evaluasi dan/atau audit aspek keamanan informasi pihak ketiga telah ditetapkan dan/atau ditugaskan dalam unit organisasi tertentu?	Dalam Perencanaan	1
7.1.3.3	1 Apakah tersedia laporan berkala tentang pencapaian sasaran tingkat layanan (SLA) dan aspek keamanan yang disyaratkan dalam perjanjian komersil (kontrak)?	Dalam Perencanaan	1
7.1.3.4	1 Apakah ada rapat secara berkala untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian sasaran tingkat layanan (SLA) dan aspek keamanan?	Dalam Perencanaan	1
7.1.3.5	1 Apakah hasil pemantauan dan evaluasi terhadap laporan atau pembahasan dalam rapat berkala tersebut didokumentasikan, dikomunikasikan dan ditindaklanjuti oleh pihak ketiga serta dilaporkan kemajuannya kepada instansi/perusahaan?	Dalam Perencanaan	1
7.1.3.6	1 Apakah instansi/perusahaan telah menetapkan rencana dan melakukan audit terhadap pemenuhan persyaratan keamanan informasi oleh pihak ketiga?	Dalam Perencanaan	1
7.1.3.7	1 Apakah hasil audit tersebut ditindaklanjuti oleh pihak ketiga dengan melaporkan rencana perbaikan yang terukur dan bukti-bukti penerapan rencana tersebut?	Dalam Perencanaan	1
7.1.3.8	1 Apakah kondisi terkait denda / penalti karena ketidakpatuhan pihak ketiga terhadap persyaratan dan / atau tingkat layanan telah didokumentasikan, dikomunikasikan, dipahami dan diterapkan?	Dalam Perencanaan	1
7.1.4	Pengelolaan Perubahan Layanan dan Kebijakan Pihak Ketiga		
7.1.4.1	1 Apakah instansi/perusahaan mengelola perubahan yang terjadi dalam hubungan dengan pihak ketiga yang menyangkut antara lain? - Perubahan layanan pihak ketiga; - Perubahan kebijakan, prosedur, dan/atau - Kontrol risiko pihak ketiga?	Dalam Perencanaan	1
7.1.4.2	1 Apakah risiko yang menyertai perubahan tersebut dikaji, didokumentasikan dan ditetapkan rencana mitigasi barunya?	Dalam Perencanaan	1
7.1.5	Penanganan Aset		
7.1.5.1	1 Apakah pihak ketiga memiliki prosedur formal untuk menangani data selama dalam siklus hidupnya mulai dari pembuatan, pendaftaran, perubahan, dan penghapusan / penghancuran aset?	Dalam Perencanaan	1
7.1.5.2	1 Apakah per untuk penghancuran (disposal) data secara aman telah disepakati bersama pihak ketiga (pihak ketiga)?	Dalam Perencanaan	1
7.1.6	Pengelolaan Insiden oleh Pihak Ketiga		
7.1.6.1	1 Apakah pihak ketiga memiliki prosedur untuk pelaporan, pemantauan, penanganan, dan analisis insiden keamanan informasi?	Dalam Perencanaan	1
7.1.6.2	1 Apakah pihak ketiga memiliki bukti-bukti penerapan yang memadai dalam menangani insiden keamanan informasi?	Dalam Perencanaan	1
7.1.7	Rencana Kelangsungan Layanan Pihak Ketiga		
7.1.7.1	1 Apakah pihak ketiga memiliki kebijakan, prosedur atau rencana terdokumentasi untuk mengatasi kelangsungan layanan pihak ketiga dalam keadaan darurat/bencana?	Dalam Perencanaan	1
7.1.7.2	1 Apakah kebijakan, prosedur atau rencana kelangsungan layanan tersebut telah diujicoba, didokumentasikan hasilnya dan dievaluasi efektivitasnya?	Dalam Perencanaan	1
7.1.7.3	1 Apakah pihak ketiga memiliki organisasi atau tim khusus yang ditugaskan untuk mengelola proses kelangsungan layanannya?	Dalam Perencanaan	1
7.2	Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan (Cloud Service)		1,00
7.2.1	1 Apakah instansi/perusahaan sudah melakukan kajian risiko terkait penggunaan layanan berbasis cloud dan menyesuaikan kebijakan keamanan informasi terkait layanan ini?	Dalam Perencanaan	1
7.2.2	1 Apakah instansi/perusahaan sudah menetapkan data apa saja yang akan disimpan/diolah/dipertukarkan melalui layanan berbasis cloud?	Dalam Perencanaan	1
7.2.3	1 Apakah instansi/perusahaan sudah menerapkan langkah pengamanan data pribadi yang disimpan/diolah/dipertukarkan melalui layanan cloud?	Dalam Perencanaan	1

7.2.4	1	Apakah instansi/perusahaan sudah mengkaji, menetapkan kriteria dan memastikan aspek hukum (yurisdiksi, hak dan kewenangan) terkait penggunaan layanan berbasis <i>cloud</i> ?	Dalam Perencanaan	1
7.2.5	1	Apakah instansi/perusahaan sudah mengevaluasi penyelenggara layanan <i>cloud</i> terkait reputasi penyelenggaranya?	Dalam Perencanaan	1
7.2.6	1	Apakah instansi/perusahaan sudah menetapkan standar keamanan teknis penggunaan layanan <i>cloud</i> , termasuk aspek penggunaannya oleh pengguna di internal instansi/perusahaan?	Dalam Perencanaan	1
7.2.7	1	Apakah instansi/perusahaan sudah mengevaluasi kelayakan keamanan layanan <i>cloud</i> termasuk aspek ketersediaannya dan pemenuhan sertifikasi layanan berbasis ISO 27001?	Dalam Perencanaan	1
7.2.8	1	Apakah instansi/perusahaan sudah memiliki kebijakan, strategi dan proses untuk mengganti layanan <i>cloud</i> atau menyediakan fasilitas pengganti apabila terjadi gangguan sementara pada layanan tersebut?	Dalam Perencanaan	1
7.2.9	1	Apakah instansi/perusahaan sudah memiliki proses pelaporan insiden terkait layanan <i>cloud</i> ?	Dalam Perencanaan	1
7.2.10	1	Apakah instansi/perusahaan sudah memiliki proses untuk menghentikan layanan <i>cloud</i> , termasuk proses pengamanan data yang ada (memindahkan dan menghapus data)?	Dalam Perencanaan	1
7.3		Perlindungan Data Pribadi		1,00
7.3.1	1	Apakah instansi/perusahaan sudah mendokumentasikan jenis dan bentuk (dokumen kertas/elektronik) data pribadi yang disimpan, diolah dan dipertukarkan dengan pihak eksternal?	Dalam Perencanaan	1
7.3.2	1	Apakah instansi/perusahaan sudah memetakan alur pemrosesan data di internal dan pertukaran data dengan pihak eksternal, termasuk kapan dan dimana data pribadi tersebut diperoleh?	Dalam Perencanaan	1
7.3.3	1	Apakah proses terkait penyimpanan, pengolahan dan pertukaran data pribadi di instansi/perusahaan sudah didokumentasikan?	Dalam Perencanaan	1
7.3.4	1	Apakah instansi/perusahaan sudah memiliki kebijakan terkait Perlindungan Data Pribadi sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku?	Dalam Perencanaan	1
7.3.5	1	Apakah instansi/perusahaan sudah menunjuk pejabat-pejabat (<i>Data Protection Officer, Data Controller, Data Processor</i>) yang bertanggung-jawab dan berwenang dalam penerapan kebijakan dan proses Perlindungan Data Pribadi?	Dalam Perencanaan	1
7.3.6	1	Apakah instansi/perusahaan sudah menganalisa dampak terkait terungkapnya data pribadi yang disimpan, diolah dan dipertukarkan secara ilegal atau karena insiden lain?	Dalam Perencanaan	1
7.3.7	1	Apakah kajian risiko keamanan pada instansi/perusahaan sudah memasukkan aspek Perlindungan Data Pribadi?	Dalam Perencanaan	1
7.3.8	1	Apakah mekanisme perlindungan data pribadi sudah diterapkan sesuai keperluan mitigasi risiko dan peraturan perundangan yang berlaku?	Dalam Perencanaan	1
7.3.9	1	Apakah instansi/perusahaan sudah menjalankan program peningkatan pemahaman/kepedulian kepada seluruh pegawai terkait Perlindungan Data Pribadi, termasuk hal-hal terkait Peraturan Perundangan yang	Dalam Perencanaan	1
7.3.10	1	Apakah instansi/perusahaan sudah mendapatkan persetujuan dari pemilik data pribadi saat mengambil data tersebut, termasuk penjelasan hak pemilik data, apa saja yang akan diberlakukan pada data pribadi tersebut dan menyimpan catatan persetujuan tersebut ?	Dalam Perencanaan	1
7.3.11	1	Apakah instansi/perusahaan sudah memiliki proses untuk melaporkan insiden terkait terungkapnya data pribadi?	Dalam Perencanaan	1
7.3.12	1	Apakah instansi/perusahaan sudah menerapkan proses yang menjamin hak pemilik data pribadi untuk mengakses data tersebut?	Dalam Perencanaan	1
7.3.13	1	Apakah instansi/perusahaan sudah menerapkan proses yang terkait dapat memastikan data pribadi tersebut akurat dan termutakhirkan?	Dalam Perencanaan	1
7.3.14	1	Apakah instansi/perusahaan sudah menerapkan proses terkait periode penyimpanan data pribadi dan penghapusan/pemusnahannya sesuai dengan peraturan atau perjanjian dengan pemilik data?	Dalam Perencanaan	1
7.3.15	1	Apakah instansi/perusahaan sudah menerapkan proses terkait penghapusan/pemusnahan data apabila sudah tidak ada keperluan yang sah untuk menyimpan/mengolahnya lebih lanjut atau atas permintaan pemilik data dan menyimpan catatan proses tersebut?	Dalam Perencanaan	1
7.3.16	1	Apakah instansi/perusahaan sudah menerapkan proses terkait pengungkapan data pribadi atas permintaan resmi aparat penegak hukum?	Dalam Perencanaan	1

Indeks KAMI (Keamanan Informasi)

Responden:
 Satuan Kerja
 Direktorat
 Departemen

Skor Kategori SE : 24 Kategori SE Tinggi

Hasil Evaluasi Akhir:

Tidak Layak

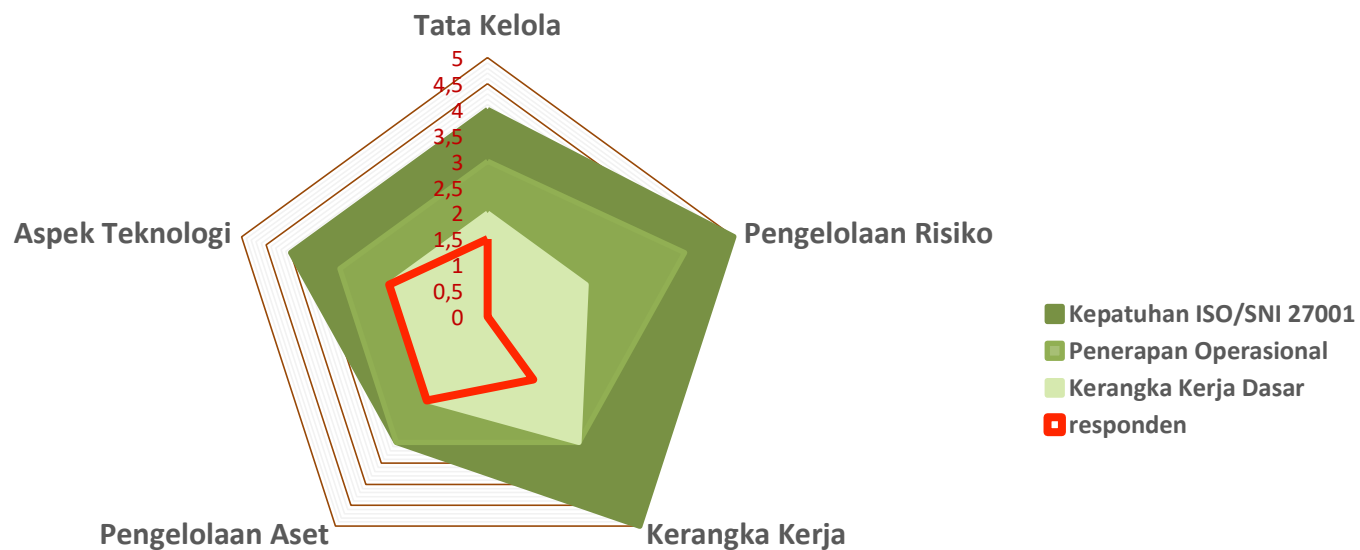
Tingkat Kelengkapan Penerapan
 Standar ISO27001 sesuai Kategori



Alamat 1
 Alamat 2
 Kota Kode Pos

(Kode Area) Nomor Telpn
 user@departemen_responden.go.id
 HH/BB/TTTT

Tata Kelola	: 39	Tk Kematangan: I+	I s/d II
Pengelolaan Risiko	: 19	Tk Kematangan: I	
Kerangka Kerja Keamanan Informasi	: 36	Tk Kematangan: I+	
Pengelolaan Aset	: 115	Tk Kematangan: II	
Teknologi dan Keamanan Informasi	: 81	Tk Kematangan: II	
Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga	: 33%		
Pengamanan Layanan Infrastruktur Awa	: 33%		
Perlindungan Data Pribadi	: 33%		



**PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN
DAN PER UNSUR PELAYANAN**

UNIT PELAYANAN : JARINGAN INTERNET

NO.	NAMA RESPONDEN	NILAI UNSUR PELAYANAN									Ket
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	R1	4	4	4	4	4	3	3	4	4	Kec. Gunung Jati
002	R2	4	4	4	4	4	4	3	3	4	Kec. Gunung Jati
003	R3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	Kec. Gunung Jati
004	R4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	Kec. Gunung Jati
005	R5	3	4	3	4	4	4	4	3	4	Kec. Gunung Jati
006	R6	3	4	3	4	3	3	3	2	3	Kec. Gunung Jati
007	R7	4	4	3	4	4	4	3	3	4	Kec. Gunung Jati
008	R8	3	3	4	4	4	4	3	4	3	Kec. Jamblang
009	R9	3	3	4	4	4	4	3	4	3	Kec. Jamblang
010	R10	4	4	4	3	4	3	4	3	4	Kec. Jamblang
011	R11	4	4	4	4	4	3	3	4	4	Kec. Jamblang
012	R12	4	4	4	4	4	4	3	3	4	Kec. Jamblang
013	R13	3	3	3	4	3	3	4	3	4	Kec. Jamblang
014	R14	4	4	3	4	4	4	3	3	4	Kec. Jamblang
015	R15	3	4	3	4	4	4	4	3	4	Kec. Mundu
016	R16	3	4	3	4	3	3	3	2	3	Kec. Mundu
017	R17	4	4	3	4	4	4	3	3	4	Kec. Mundu
018	R18	3	3	3	4	3	3	4	3	4	Kec. Mundu
019	R19	4	4	3	4	4	4	3	3	4	Kec. Mundu
020	R20	3	4	3	4	4	4	4	3	4	Kec. Mundu
021	R21	3	4	3	4	3	3	3	2	3	Kec. Babakan
022	R22	4	4	3	4	4	4	3	3	4	Kec. Babakan
023	R23	4	4	4	3	4	3	4	3	4	Kec. Babakan
024	R24	4	4	4	4	4	3	3	4	4	Kec. Babakan
025	R25	4	4	4	4	4	4	3	3	4	Kec. Babakan
026	R26	3	3	3	4	3	3	4	3	4	Kec. Babakan
027	R27	4	4	3	4	4	4	3	3	4	Kec.Karangsembung
028	R28	3	4	3	4	4	4	4	3	4	Kec.Karangsembung
029	R29	3	4	3	4	3	3	3	2	3	Kec.Karangsembung
030	R30	4	4	3	4	4	4	3	3	4	Kec.Karangsembung
031	R31	4	4	4	3	4	3	3	2	2	Kec.Karangsembung
032	R32	4	4	4	3	3	3	3	4	4	Kec.Karangsembung
033	R33	3	4	4	4	3	3	3	4	4	Kec. Losari
034	R34	4	4	4	4	4	3	3	4	4	Kec. Losari
035	R35	4	4	4	4	4	3	3	4	4	Kec. Losari
036	R36	4	4	4	2	2	3	3	4	4	Kec. Losari
037	R37	4	3	3	4	3	3	3	3	3	Kec. Losari
038	R38	4	3	3	3	3	3	3	3	4	Kec. Losari
039	R39	3	3	4	4	4	4	4	4	4	Kec. Pabedilan
040	R40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kec. Pabedilan
041	R41	4	4	4	4	4	4	3	3	4	Kec. Pabedilan
042	R42	3	3	3	3	3	3	4	3	4	Kec. Pabedilan
043	R43	4	3	3	4	4	4	4	3	4	Kec. Pabedilan
044	R44	4	3	3	4	4	4	4	3	4	Kec. Pabedilan
045	R45	3	4	4	4	4	4	4	4	4	Kec. Pabedilan
046	R46	3	4	4	4	3	3	3	2	4	Kec. Gebang
047	R47	3	4	4	4	4	3	3	4	4	Kec. Gebang
048	R48	3	4	4	4	3	3	3	2	3	Kec. Gebang
049	R49	3	4	4	4	3	3	3	2	4	Kec. Gebang
050	R50	3	3	4	4	4	4	4	4	4	Kec. Gebang
051	R51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kec. Gebang
052	R52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kec. Pangenan
053	R53	4	4	4	4	4	4	4	4	3	Kec. Pangenan
054	R54	3	3	4	4	4	4	4	4	4	Kec. Pangenan
055	R55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kec. Pangenan
056	R56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kec. Pangenan
057	R57	3	4	4	4	3	3	3	2	4	Kec. Pangenan
058	R58	4	4	4	4	3	4	4	4	3	Kec. Panguragan
059	R59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kec. Panguragan
060	R60	3	3	4	4	4	4	4	4	4	Kec. Panguragan
061	R61	4	4	4	4	3	3	3	4	4	Kec. Panguragan
062	R62	4	4	4	2	2	3	3	4	4	Kec. Panguragan
063	R63	4	4	4	4	4	4	4	3	4	Kec. Panguragan
064	R64	4	4	4	4	4	4	4	4	3	Kec. Panguragan
065	R65	4	4	4	4	4	4	4	2	3	Kec. Suranenggala
066	R66	4	4	4	4	4	3	3	4	4	Kec. Suranenggala
067	R67	4	4	4	4	4	4	3	3	4	Kec. Suranenggala
068	R68	3	3	3	4	3	3	4	3	4	Kec. Suranenggala
069	R69	4	4	3	4	4	4	3	3	4	Kec. Suranenggala
070	R70	3	4	3	4	4	4	4	3	4	Kec. Suranenggala
071	R71	3	4	3	4	3	3	3	2	3	Kec. Suranenggala

NO.	NAMA RESPONDEN	NILAI UNSUR PELAYANAN									Ket
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	R148	3	3	4	4	4	4	4	4	4	Kec. Depok
149	R149	4	4	4	4	3	3	3	4	4	Kec. Depok
150	R150	4	4	4	2	2	3	3	4	4	Kec. Depok
151	R151	4	3	3	4	3	3	3	3	3	Kec. Depok
152	R152	4	3	3	3	3	3	3	3	4	Kec. Depok
153	R153	3	3	4	4	4	4	4	4	4	Kec. Depok
154	R154	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kec. Weru
155	R155	4	4	4	4	4	4	3	3	4	Kec. Weru
156	R156	3	3	3	3	3	3	4	3	4	Kec. Weru
157	R157	4	3	3	4	4	4	4	3	4	Kec. Weru
158	R158	4	3	3	4	4	4	4	3	4	Kec. Weru
159	R159	3	4	4	4	4	4	4	4	4	Kec. Weru
160	R160	3	4	4	4	4	4	4	4	4	Kec. Weru
161	R161	3	4	4	4	3	3	3	3	4	Kec. Kedawang
162	R162	3	4	4	4	4	3	3	4	4	Kec. Kedawang
163	R163	3	4	4	4	3	3	3	3	3	Kec. Kedawang
164	R164	3	4	4	4	3	3	3	3	4	Kec. Kedawang
165	R165	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kec. Kedawang
166	R166	3	3	4	4	4	4	4	4	4	Kec. Kedawang
167	R167	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kec. Tengah tani
168	R168	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kec. Tengah tani
169	R169	4	4	4	4	4	4	3	3	4	Kec. Tengah tani
170	R170	3	3	3	3	3	3	4	3	4	Kec. Tengah tani
171	R171	4	4	4	4	3	3	3	4	4	Kec. Tengah tani
172	R172	4	4	4	2	2	3	3	4	4	Kec. Tengah tani
173	R173	4	3	3	4	3	3	3	3	3	Kec. Talun
174	R174	4	3	3	3	3	3	3	3	4	Kec. Talun
175	R175	3	3	4	4	4	4	4	4	4	Kec. Talun
176	R176	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kec. Talun
177	R177	4	4	4	4	4	4	3	3	4	Kec. Talun
178	R178	3	3	3	3	3	3	4	3	4	Kec. Talun
179	R179	4	3	3	4	4	4	4	3	4	Kec. Talun
180	R180	4	3	3	4	4	4	4	3	4	Kec. Plered
181	R181	3	4	4	4	4	4	4	4	4	Kec. Plered
182	R182	3	4	4	4	3	3	3	2	4	Kec. Plered
183	R183	3	4	4	4	4	3	3	4	4	Kec. Plered
184	R184	3	4	4	4	3	3	3	2	3	Kec. Plered
185	R185	3	4	4	4	3	3	3	2	4	Kec. Plered
186	R186	3	3	4	4	4	4	4	4	4	Kec. Plered
187	R187	4	4	4	4	3	3	3	4	4	Kec. Ciledug
188	R188	4	4	4	2	2	3	3	4	4	Kec. Ciledug
189	R189	4	3	3	4	3	3	3	3	3	Kec. Ciledug
190	R190	4	3	3	3	3	3	3	3	4	Kec. Ciledug
191	R191	3	3	4	4	4	4	4	4	4	Kec. Ciledug
192	R192	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kec. Ciledug
193	R193	4	4	4	4	4	4	3	3	4	Kec. Pasaleman
194	R194	3	3	3	3	3	3	4	3	4	Kec. Pasaleman
195	R195	4	3	3	4	4	4	4	3	4	Kec. Pasaleman
196	R196	4	3	3	4	4	4	4	3	4	Kec. Pasaleman
197	R197	3	4	4	4	4	4	4	4	4	Kec. Pasaleman
198	R198	3	4	4	4	3	3	3	2	4	Kec. Pasaleman
199	R199	3	4	4	4	4	3	3	4	4	Kec. Pasaleman
200	R200	3	4	4	4	3	3	3	2	3	Kec. Waled
201	R201	3	4	4	4	3	3	3	2	4	Kec. Waled
202	R202	3	4	4	4	3	3	3	2	4	Kec. Waled
203	R203	4	4	4	4	3	3	3	4	4	Kec. Waled
204	R204	4	4	4	2	2	3	3	4	4	Kec. Waled
205	R205	4	3	3	4	3	3	3	3	3	Kec. Waled
206	R206	4	3	3	3	3	3	3	3	4	Kec. Pabuaran
207	R207	3	3	4	4	4	4	4	4	4	Kec. Pabuaran
208	R208	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kec. Pabuaran
209	R209	4	4	4	4	4	4	3	3	4	Kec. Pabuaran
210	R210	3	3	3	3	3	3	4	3	4	Kec. Pabuaran
211	R211	4	3	3	4	4	4	4	3	4	Kec. Pabuaran
212	R212	4	3	3	4	4	4	4	3	4	Kec. Lemahabang
213	R213	3	4	4	4	4	4	4	4	4	Kec. Lemahabang
214	R214	3	4	4	4	3	3	3	2	4	Kec. Lemahabang
215	R215	3	4	4	4	4	3	3	4	4	Kec. Lemahabang
216	R216	3	4	4	4	3	3	3	2	3	Kec. Lemahabang
217	R217	3	4	4	4	3	3	3	2	4	Kec. Lemahabang
218	R218	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kec. Lemahabang
219	R219	4	4	4	4	4	4	4	4	3	Kec. Susukan Lebak
220	R220	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kec. Susukan Lebak
221	R221	4	4	3	4	4	4	4	4	3	Kec. Susukan Lebak
222	R222	4	4	3	4	4	4	3	3	4	Kec. Susukan Lebak
223	R223	3	3	3	3	3	3	4	3	4	Kec. Susukan Lebak

NO.	NAMA RESPONDEN	NILAI UNSUR PELAYANAN									Ket
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	R224	4	4	3	3	3	3	3	3	3	Kec. Susukan Lebak
225	R225	4	4	4	4	3	3	3	4	4	Kec. Susukan Lebak
226	R226	4	4	4	2	2	3	3	4	4	Kec. Sedong
227	R227	4	3	3	4	3	3	3	3	3	Kec. Sedong
228	R228	4	3	3	3	3	3	3	3	4	Kec. Sedong
229	R229	3	3	4	4	4	4	4	4	4	Kec. Sedong
230	R230	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kec. Sedong
231	R231	4	4	4	4	4	4	3	3	4	Kec. Sedong
232	R232	3	3	3	3	3	3	4	3	4	Kec. Sedong
233	R233	4	3	3	4	4	4	4	3	4	Kec. Beber
234	R234	4	3	3	4	4	4	4	3	4	Kec. Beber
235	R235	3	4	4	4	4	4	4	4	4	Kec. Beber
236	R236	3	4	4	4	3	3	3	2	4	Kec. Beber
237	R237	3	4	4	4	4	3	3	4	4	Kec. Beber
238	R238	3	4	4	4	3	3	3	2	3	Kec. Beber
239	R239	3	4	4	4	3	3	3	2	4	Kec. Beber
240	R240	4	4	3	4	4	4	3	3	4	Kes. Astanajapura
241	R241	3	3	3	3	3	3	4	3	4	Kes. Astanajapura
242	R242	4	4	4	4	4	4	3	3	4	Kes. Astanajapura
243	R243	3	3	3	3	3	3	4	3	4	Kes. Astanajapura
244	R244	4	4	4	4	3	3	3	3	4	Kes. Astanajapura
245	R245	4	3	4	4	3	3	3	3	3	Kes. Astanajapura
246	R246	4	4	4	4	3	3	3	3	4	Kec. Greged
247	R247	4	4	4	4	4	4	4	3	4	Kec. Greged
248	R248	4	4	3	4	4	4	4	3	4	Kec. Greged
249	R249	4	4	4	4	3	3	3	4	4	Kec. Greged
250	R250	4	4	4	2	2	3	3	4	4	Kec. Greged
251	R251	4	3	3	4	3	3	3	3	3	Kec. Greged
252	R252	4	3	3	3	3	3	3	3	4	Kec. Greged
253	R253	3	3	4	4	4	4	4	4	4	Kec. Sumber
254	R254	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kec. Sumber
255	R255	4	4	4	4	3	4	4	4	3	Kec. Sumber
256	R256	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kec. Sumber
257	R257	3	3	4	4	4	4	4	4	4	Kec. Sumber
258	R258	4	4	4	4	3	3	3	4	4	Kec. Sumber
259	R259	4	4	4	2	2	3	3	4	4	Kec. Sumber
260	R260	3	4	4	4	3	3	3	2	4	Kec. Karangwareng
261	R261	3	4	4	4	4	3	3	4	4	Kec. Karangwareng
262	R262	3	4	4	4	3	3	3	2	3	Kec. Karangwareng
263	R263	3	4	4	4	3	3	3	2	4	Kec. Karangwareng
264	R264	3	3	3	4	4	4	4	4	4	Kec. Karangwareng
265	R264	4	4	3	4	4	4	3	3	4	Kec. Karangwareng
	ΣNilai /Unsur	965	982	980	1010	942	944	934	885	1016	
	NRR / Unsur	3,642	3,706	3,698	3,811	3,555	3,562	3,525	3,340	3,834	
	NRR tertbg/ unsur	0,401	0,408	0,407	0,419	0,391	0,392	0,388	0,367	0,422	*)
											3,594
	IKM Unit pelayanan										**) 89,85

Keterangan :

- U1 s.d. U14 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang per unsur = NRR per unsur x 0,071

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan pelayanan	3,642
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,706
U3	Waktu Penyelesaian	3,698
U4	Biaya/Tarif	3,811
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,555
U6	Kompetensi Pelaksana	3,562
U7	Perilaku Pelaksana	3,525
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,340
U9	Sarana dan Prasarana	3,834

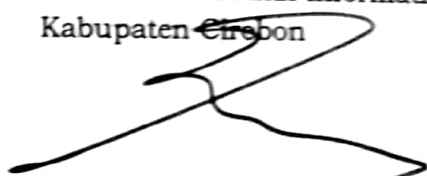
IKM UNIT PELAYANAN : 89,85

Mutu Pelayanan :

- A** (Sangat Baik) : 81,26 - 100,00
- B** (Baik) : 62,51 - 81,25
- C** (Kurang Baik) : 43,76 - 62,50
- D** (Tidak Baik) : 25,00 - 43,75



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jln. Sunan Drajat No.15 Telp. (0231) 8330580
Sumber

Nomor SOP	050/1148/Sekret
Tanggal Pembuatan	03 November 2017
Tanggal Revisi (ditinjau kembali)	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon  SUGENG DARSONO, SE., MM NIP. 19620718 198603 1 003

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan/ Sekretariat

Nama SOP
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Revisi atas Laporan Kinerja
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

Kualifikasi Pelaksana

- Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja SKPD.

<p>7. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon</p>	
<p>Keterkaitan</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOP Alur surat masuk dan surat keluar - SOP Pencarian Data dan Informasi - SOP Perjanjian Kinerja - SOP pengadaan barang dan jasa - SOP Pengarsipan 	<p>Peralatan / Perlengkapan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Renstra SKPD - Format penyusunan LAKIP - Dokumen Penetapan Kinerja - Format Pengukuran Kinerja - Data dan Informasi Capaian Kinerja SKPD - Laporan Realisasi Keuangan
<p>Peringatan</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p>
<p>LAKIP sebagai dokumen pertanggungjawaban atas kinerja SKPD. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan LAKIP ini tidak akan berjalan lancar.</p>	<p>Indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja</p>

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu baku			Ket
		Sekdis	Kasubag PEP	Arsiparis	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan penyusunan LAKIP DISKOMINFO					Disposisi Surat	20 menit	Disposisi surat	
2	Mengumpulkan format penyusunan data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat					Format penyusunan LAKIP DISKOMINFO	1 hari	Format penyusunan LAKIP DISKOMINFO	
3	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja kepada masing-masing bidang dan sekretariat					Format penyusunan LAKIP DISKOMINFO	2 jam	Format penyusunan LAKIP DISKOMINFO	
4	Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat					Format penyusunan LAKIP DISKOMINFO	1 jam	Format penyusunan LAKIP DISKOMINFO	
5	Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul					Format penyusunan LAKIP DISKOMINFO	1 hari	Draft LAKIP DISKOMINFO	
6	Membuat dokumen LAKIP DISKOMINFO					Draft LAKIP DISKOMINFO	1 minggu	Dokumen LAKIP DISKOMINFO	
7	Mengoreksi Dokumen LAKIP DISKOMINFO					Dokumen LAKIP DISKOMINFO	1 hari	Dokumen LAKIP DISKOMINFO	
8	Menyampaikan Dokumen LAKIP kepada Kadis untuk memintakan persetujuan					Dokumen LAKIP DISKOMINFO	3 jam	Dokumen LAKIP	
9	Penandatanganan dokumen LAKIP DISKOMINFO oleh Kepala Dinas					Dokumen LAKIP DISKOMINFO	10 menit	Disposisi persetujuan dokumen LAKIP	
10	Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat					Konsep surat pengantar	20 menit	Surat Pengantar	

11	Penggandaan Dokumen LAKIP					Dokumen LAKIP DISKOMINFO	30 menit	Dokumen LAKIP DISKOMINFO	
12	Pengiriman dokumen LAKIP DISKOMINFO ke BAPELITBANGDA dan pengarsipan					Dokumen LAKIP DISKOMINFO	15 menit	Dokumen LAKIP DISKOMINFO	

